

LAPORAN HASIL
PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TOBELO
HALMAHERA UTARA
(Suatu Pendekatan Budaya Lokal)



Oleh:
Dr. Ansar Tohe, M. Fil.I

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
TAHUN 2018

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TOBELO
HALMAHERA UTARA

(Suatu Pendekatan Budaya Lokal)



Oleh:

Dr. Ansar Tohe, M. Fil.I

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
TAHUN 2018

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Identitas Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Ansar Tohe, M. Fil.I

Pangkat/ Golongan : Pembina/IV/b

Alamat : Dufa-Dufa, Ternate

2. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penyelesaian Konflik Antar Umat di Tobelo Halmahera Utara

Kategori : Individu

Bidang Ilmu : Studi Agama

Lokasi Penelitian : Tobelo, Halmahera Utara

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

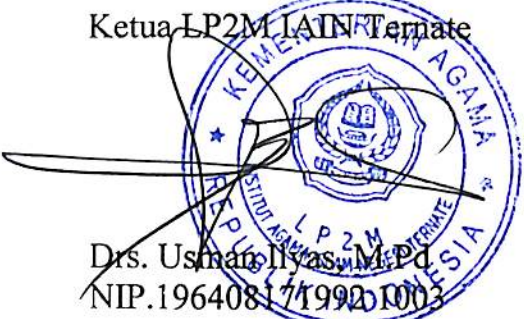
Biaya Penelitian : Rp.50. 000.000/DIPA IAIN Ternate

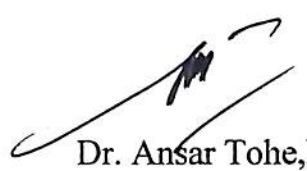
Mengetahui

Ternate, 15 Desember 2018

Ketua LP2M IAIN Ternate


Peneliti


Drs. Usman Ilyas, M.Pd
NIP.1964081719921003


Dr. Ansar Tohe, M.Fil.I
NIP.19950711 199403 1002

Menyetujui

Rektor IAIN Ternate


Drs. Samlan Ahmad, M.Pd
NIP.19621127 199403 1002

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

(Suatu Pendekatan Budaya Lokal)

ABSTRAK

Nama : Ansar Tohe
NIP : 19650711 199403 1002
Konsentrasi : Studi Agama
Judul Penelitian : Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Tobelo
(Suatu Pendekatan Budaya Lokal)

Penelitian ini berkenaan dengan Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Tobelo Halmahera Utara. Sejumlah kerusuhan dan konflik sosial telah terjadi berbagai daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Ambon (mulai 1998), Poso (mulai 1998), Maluku Utara (2000), dan di beberapa tempat lain sehingga merambat sampai ke Tobelo, Konflik Tobelo Halmahera Utara yang dikenal dengan papilo berdarah serta Sosol berdarah (Kao-Malifut). Dan memakan korban yang cukup banyak dari kedua kelompok yang bertikai. Islam maupun Kristen. Demikian juga peristiwa pembajakan di pulau Kahatola. Dan sebagian kabupaten lain di Maluku Utara. Konflik yang bernuansa SARA ini membuat akar budaya dan kerukunan umat beragama dapat tercabik-cabik serta keharmonisan Agama turut terganggu. Adapun latar belakang Konflik di antara umat beragama di sebabkan oleh faktor keagamaan dan non keagamaan. Kedua faktor ini yang sering memicu dan penyebab ketidak kerukunan beragama, faktor keagamaan berkaitan dengan doktrin agama masing-masing yang berhubungan dengan nilai kebenaran. Dan faktor nonkeagamaan antara, kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, perbedaan nilai sosial budaya, kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Agama dapat dipahami dalam dua pendekatan yaitu pendekatan normativitas (teologis-normatif) dan pendekatan historitas (historis-kritis). Adapun menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Mengapa terjadi konflik Antarumat Beragama ? Bagaimana relasi antarumat beragama Pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara ? Bagaimana Penyelesaian konflik Antarumat Beragama berbasis budaya lokal di Tobelo Halmahera Utara ?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan penyelesaian konflik, untuk mengetahui relasi dan kerukunan beragama, dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penyelesaian antar umat agama berbasis kearifan lokal.

Jenis penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan multi disiplin; Pendekatan teologis, filosofis, sosiologis, antropologis dan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam pengolahan data dan analisis data, penulis menferivikasi, menyederhanakan, mengabstrakkan semua data yang diperoleh dari lapangan kemudian data dianalisis secara mendalam dan komprehensif lalu ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode berpikir induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tobelo adalah salah satu wilayah yang memiliki latar belakang kultur dan budaya keagamaan yang pluralis di simbol "*Hibua Lama*" dan "*Marimoi ngone foturu*" sebagai wada perekat yang di jadikan sebagai solusi terhadap penyelesaian konflik dan model kerukunan umat beragama pasca konflik di Tobelo

Halmahera Utara. Kajian – kajian yang telah dilakukan dan melahirkan sebuah hipotesa bahwa konflik di Maluku dan Maluku Utara pada awalnya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik. Eskalasi konflik meningkat cepat karena mereka yang bertikai melibatkan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas . agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik, karena itu isu agama itu muncul belakangan. Namun demikian isu agama tetap dijadikan sebagai legitimasi politik oleh pihak yang berkepentingan dan menginginkan Maluku Utara khususnya Tobelo Halmahera Utara dalam keadaan tidak aman. Dan isu sara tetap laku di jual pada waktu kerusuhan berlangsung pada saat konflik di bumi Maluku Kieraha dan imbasnya masih dirasakan sampai saat ini khususnya di daerah rusuh pasca konflik di Tobelo dan sekitarnya.

Konflik horizontal yang melanda Propinsi Maluku Utara dan berimbas ke Tobelo Halmahera Utara dari berbagai lini, merupakan potensi konflik yang maha dahsyat, bila agama tidak dipahami secara benar dan akan melahirkan sikap keagamaan secara eksklusivesme, dan bukan secara inklusif di kalangan umat beragama. Perbedaan agama dan budaya merupakan suatu kekuatan positif, dan dapat mempersatukan bangsa dan saling toleransi. Sebab perbedaan merupakan perekat bangsa terbesar yang patut di hargai dan dihormati.

Menjadi temuan penelitian ini adalah penyelesaian konflik antar umat beragama di Tobelo harus di bangun di atas nilai-nilai kearifan lokal hibuah lamo, hubungan antara kedua belah pihak Islam-Kristen tetap terjaga dan terpelihara di atas nilai kekeluargaan *giadutu dan gia nongoru*, tanpa harus saling meniadakan agama, suku dan adat . Pasca konflik kerukunan antar umat bergama tetap terjaga dengan baik sehingga relasi antara Islam-Kristen tetap terjalin damai saling menghormati , rukun, dan harmoni serta tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, di harapkan pula agar pertemuan antara Islam dan Kristen di daerah ini tidak dalam konteks saling meniadakan tetapi sebaliknya saling menghormati dan melindungi masing-masing sesama antar umat beragama dalam rangka menciptakan kedamaian sejati.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah karya penulis sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, dibuat atau dibantu orang lain, secara keseluruhan atau sebahagian, maka hasil karya ini batal demi hukum.

Ternate, 15 Desember 2018

Peneliti



Dr. Ansar Tohe, M.Fil.I
NIP.19950711 199403 1002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik dan Integrasi.....	17
1. Perspektif Konflik	17
2. Pemetaan Konflik.....	18
3. Konstruksi Sosial Konflik.....	19
4. Fenomenologi Konflik	22
5. Konflik dan Integrasi.....	24
B. Konflik Agama dan Budaya.....	24
1. Pengertian Agama	24
2. Pola dan Karakteristik Agama	26
3. Fungsi dan Tujuan Agama	27
C. Agama dan Interaksi Sosial	30
1. Agama Sebagai “Modal Sosial”	30
2. Interaksi Sosial	33
3. Faktor-faktor dan Ciri-ciri Interaksi Sosial	34
D. Kerukunan Antar Umat Beragama	38
1. Pengertian Kerukunan	38
2. Konsep Toleransi Beragama	40
3. Dotrin Tentang Toleransi Antar Umat Beragama	41
4. Landasan Yuridis dan Normatif Kerukunan Beragama	43
5. Teologi Kerukunan Beragama	46

6. Prularitas Agama Suatu “Keharusan”	48
E. Kerangka Konseptual	50

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	51
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Lokasi Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Observasi.....	56
2. Interview	56
3. Studi Dokumentasi	57
E. Instrumen Penelitian	57
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
G. Pengujian Keabsahan Data	58

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	59
1. Keadaan Geografis	59
2. Keadaan Penduduk.....	63
3. Keadaan Umat Beragama.....	64
4. Asal Usul Orang Tobelo.....	67
5. Sistem Kekerabatan.....	71
6. Sistem Kepercayaan Orang Tobelo (<i>Konsep Jou Gikimoi</i>)	73
B. Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Tobelo... 78	
1. Kerukunan Agama Dalam Perspektif Budaya Lokal (<i>Hibua Lamo</i>)	92
2. Potensi Konflik	102
3. Potensi Kerukunan Antarumat Beragama	109
4. Kondisi Aktual Kerukunan Masyarakat	109
5. Faktor-faktor Eksternal dan Internal Ketidakerukunan	111
C. Hubungan/Relasi Antarumat Beragama di Tobelo Halmahera Utara.....	113
D. Upaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik	150

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	179
B. Implikasi	181

DAFTAR PUSTAKA.....	183
LAMPIRAN.....	192

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

(Suatu Pendekatan Budaya Lokal)

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Maluku Utara sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat kerajaan di Nusantara yang terletak di kawasan Timur Indonesia yang sangat agamais dan religius, hal ini dapat dilihat dari latar belakang sejarah Maloko kieraha (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) Propinsi Maluku Utara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.¹ Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, hal ini dapat dibuktikan dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia, yang senantiasa mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang termaktup dalam Falsafah Pancasila.² Sikap beragama itu dapat tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadah menurut Agama dan kepercayaannya itu.

Negara tidak hanya melindungi dan memberi kebebasan dalam kehidupan beragama tetapi juga memberi peluang dan dorongan kepada pemeluk untuk mengembangkan internal agama masing-masing tanpa mempengaruhi agama dan kepercayaan lainnya. Masyarakat Indonesia tetap mengakui kemajemukan dan pluralitas dari beraneka ragam suku, budaya dan agama memiliki tantangan yang sangat berat untuk menciptakan pesatuan dan kesatuan

¹Lihat M. Yusuf Abdulrahman (ed.), *Ternate Bandar Jalur Sutra* (Ternate: LinTas, 2001), h. 57.

²Pancasila sebagai idologi dapat mempersatukan kita secara politis, dapat mewakili dan menyaring berbagai kepentingan, mengandung pluralisme agama, dan dapat menjamin kebebasan beragama. Lihat A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan Demograsi, HAM & Masyarakat Madani* (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), h. 22.

bangsa, tetap dalam kerangka falsafah “Bhineka Tunggal Ika” satu bangsa, satu bahasa, satu Negara dan satu ideologi, maka persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

Kemajemukan masyarakat dan agama dalam konteks beragama dalam kehidupan beragama, selain dapat menimbulkan dinamika kehidupan juga dapat menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan hidup beragama.³ Apalagi keadaan tersebut lebih di pertajam lagi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik atau sebaliknya gangguan terhadap kerukunan hidup beragama merupakan dampak atau digerakkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jika keadaan itu di biarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kerusakan masyarakat, mengganggu kehidupan kerukunan hidup beragama dan kehidupan sosial lainnya. Pada intinya mengganggu stabilitas pembangunan daerah maupun nasional dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Perbedaan latar belakang budaya dan agama (*Cultural and religious differences*) yang merekat pada bangsa Indonesia, di satu pihak dapat merupakan potensi penguatan bangsa . namun pihak lain justru menjadi faktor disintegratif bangsa itu sendiri. Jika tidak dimenagement dengan baik atau dikelola secara tepat dan benar akan melahir disintegrasi dan perpecahan Bangsa, terutama dalam bidang pembangun Agama. Perbedan agama dan budaya melahirkan suatu kekuatan energi positif untuk mempersatukan bangsa saling toleransi bukan melahirkan sikap intoleransi. “Sebab perbedaan merupakan perekat bangsa terbesar yang patut dihargai dan di hormati”,⁴ bukan sebaliknya perbedaan melahirkan potensi konflik yang akan melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

³Pluralisme sudah menjadi bagian dari ideologi nasional yang dirumuskan menjadi Bhinneka Tunggal Ika suatu istilah yang berasal dari Empuh Tantular, yang artinya kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*). lihat Budi Munawar Rahman, *Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. L2.

⁴ Yusuf Kalla, (Headline Metro TV, 22 -10-2016).

Realitas memperlihatkan bahwa kebudayaan daerah mengalami degradasi yang luar biasa yang disebabkan karena tuntutan perubahan dari dalam masyarakat sendiri terutama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, juga dorongan yang kuat dari luar masyarakat yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. Maka apabila hal ini tidak disikapi maka kebudayaan daerah akan menjadi lemah dan pada saatnya pupus. Yang berakibat pada masyarakat tidak lagi memiliki identitas, tidak lagi memiliki kehormatan karena kehilangan nilai-nilai adat seatorannya. Demikian juga nilai-nilai lokal "*Hibuah Lama dan Marimoi Ngone Faturu*" yang dapat mempersatukan antar umat beragama.

Sejumlah kerusuhan dan konflik sosial telah terjadi berbagai daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Ambon (mulai 1998), Poso (mulai 1998), Maluku utara (2000), dan di beberapa tempat lain sehingga meramba sampai ke Tobelo, Konflik Tobelo Halmahera Utara yang dikenal dengan papilo berdarah serta Sosol berdarah (Kao-Malifud). Dan memakan korban yang cukup banyak dari kedua kelompok yang bertikai. Islam maupun kristen. Demikian juga peristiwa pembajakan di pulau Kahatola. Dan sebagian kabupaten lain di maluku Utara. Konflik yang bernuansa SARA ini membuat akar budaya dan kerukunan umat beragama dapat tercabik-cabik serta keharmonisan Agama turut terganggu. Adapun latar belakang Konflik diantara umat beragama di sebabkan oleh faktor keagamaan dan non keagamaan. Kedua faktor ini yang sering memicu dan penyebab ketidak kerukunan beragama, faktor keagamaan berkaitan dengan doktrin agama masing-masing yang berhubungan dengan nilai kebenaran. Dan faktor nonkeagamaan antara, kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, perbedaan nilai sosial budaya, kemajuan teknologi informasi dan transportasi.

Konflik adalah kekuatan jika dikelola dengan dengan baik, jika tidak dikelola dan memenage secara sistimatis akan menjadi bom waktu yang menghancurkan sendi-sendi

kehidupan masyarakat dan Fasilitas Pemerintah. Kronologis konflik di Maluku Utara paling tidak merupakan bias dari konflik Ambon, apabila dikaitkan dengan kedatangan pengungsi dari Ambon Provinsi Maluku Utara. Tanda-tanda pecahnya konflik di mulai dari peristiwa antara pemuda desa Talaga dan desa Bataka di kecamatan Ibu Halmahera Barat. Walaupun dapat di selesaikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, namun secara keseluruhan perpecahan tidak signifikan untuk meredam isu konflik kerana peristiwa itu kemudian berubah menjadi kerusuhan yang bersifat *massive* di Maluku Utara.

Awal konflik di Maluku Utara pertama kali dimulai di wilayah (Kao- Malifut) pulau Halmahera Utara kemudian meluas ke wilayah pulau Tidore, Ternate, daratan Halmahera lainnya, Morotai dan kepulauan Sula. Rentang waktu konflik di Maluku Utara terbilang singkat mulai dari Agustus 1999 sampai Juni 2001; namun mengakibatkan korban jiwa yang banyak yaitu 2.410 jiwa dan kerugian material tidak terhitung jumlahnya.⁵ Kemudian konflik dahsyat di Tobelo, Galela dan Jailolo pada tanggal 26 desember 1999 - 7 Januari 2000, beberapa ratus orang yang terbunuh dan jumlah korban cukup banyak di perkirakan sekitar 2000 jiwa.⁶ Menurut data konflik komunal yang terjadi di 14 Propinsi diseluruh Indonesia 1999-2003 Maluku Utara adalah jumlah korban meninggal terbanyak 2.794. Dari total jumlah 11.160 keseluruhan di Indonesia. Sumber data resmi Propinsi Maluku Utara (2000) jumlah korban jiwa sebanyak 2.083. Dan jumlah korban di Tobelo sebanyak 10.77 orang, Islam 877, kristen 200 orang. Serta kerugian harta benda dan materi lain tidak terhitung jumlahnya. Indikator ini menunjukkan bahwa konflik kekerasan sosial, memerlukan penanganan khusus untuk mencari solusi perdamaian di Tobelo Halmahera Utara.

Hal utama yang ingin disampaikan dalam penelitian ini bahwa peristiwa konflik yang terjadi tahun 1999/2000 di Maluku Utara masih berkaitan dengan konflik dimasa lalu. Paling

⁵M. Junaidi, *Sejarah konflik dan perdamaian di Maluku Utara; Refleksi terhadap sejarah Moloku Kie Raha* (Ternate: tt), h. 222.

⁶Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 209.

tidak akan menggambarkan kepada kita bahwa peristiwa konflik yang mengemuka tidak dalam “ruang yang kosong” atau telah ada sebelumnya. Dinamika masyarakat Maluku Utara yang ditandai dengan konflik terjadi sejak zaman dahulu, mulai dari masa kepemimpinan tradisional, terbentuknya struktur pemerintahan kerajaan, masuknya Islam, kedatangan bangsa Eropa, dan penyebaran agama Kristen dan terakhir pada peristiwa konflik 1999/2000. Dalam catatan sejarah, kepulauan Maluku dikenal sebagai wilayah Moloko Kie Raha, yang pengaruhnya meliputi seluruh wilayah Maluku, Halmahera, Papua (Raja Ampat), Flores dan Timor, daratan Sulawesi Tengah (Banggai), Sulawesi Selatan (Selayar) dan Sulawesi bagian Utara & Gorontalo, Filipina (Mindanao). Konfederasi Moloko Kie Raha adalah usaha untuk menyatukan kerajaan-kerajaan dan suku bangsa yang ada di Kepulauan Maluku.⁷

Tobelo adalah sebuah kota kecamatan penting di Maluku Utara. Kota ini merupakan daerah pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi andalan dari beberapa kecamatan disekitarnya. Di daerah ini, sentral ekonomi dan perdagangan dipusatkan, sehingga tidak mengherankan daerah ini tumbuh pesat dengan beragam etnis dan kultur. Berbagai lapisan masyarakat dari berbagai daerah berada di kota kecil ini. Oleh karena itu, tindakan –tindakan barbarian menjadi kebanggaan karena di lakukan atas nama Tuhan. Prinsip dasar keselamatan antara masing-masing pemeluk agama menjadi senjata mematikan bagi tercapainya solidaritas bersama. Pada masa-masa awal, klaim sejarah keselamatan yang eksklusif dianggap wajar dan merupakan instrumen yang efektif untuk menegaskan identitas diri.

Tobelo Halmahera Utara adalah salah satu wilayah yang memiliki latar belakang sosial budaya, ekonomi dan agama yang pluralis di bawah simbol” *hibua lamo*” maupun “*adat seatoran*” yang dijadikan obyek penelitian pembinaan kerukunan beragama pasca konflik sangat diharapkan tercipta kerukunan masyarakat dan agama dapat tercipta kembali seperti

⁷Lihat. M. Jusuf Abdulrahman, *Ternate Jalur Bandar Sutra*, h. 56. Bandingkan dengan Abjan Yahya, dkk (Tim)., *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. ix.

sedia kala yang hidup berdampingan antara pemeluk agama yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara “Halmahera Utara AMAN, ADIL, DAMAI dan SEJAHTERA dalam suasana Kekeluargaan Sejati, Maju dan mampu Bersaing dan Tetap dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Halmahera Utara (Tobelo) adalah bagian dari Bangsa Indonesia tetap mengakui pluralitas dari beraneka ragam suku, budaya dan Agama memiliki tantangan yang sangat berat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, tetap dengan falsafah “Bhineka Tunggal Ika” satu bangsa, satu bahasa, satu Negara dan satu ideologi, maka persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Untuk itu upaya pembinaan kehidupan beragama diarahkan agar dapat terpelihara kemurnian Agama, tumbuhnya kerukunan dinamis, serta terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun, mengamankan dan melestarikan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta keutuhan NKRI.

Adapun yang menjadi latar belakang pemilihan judul penelitian tersebut diatas antara lain; 1).Tobelo merupakan ibu kota Kabupaten baru di Halmahera Utara yang sangat maju dan plural dinamika kehidupan masyarakat dan agama sering terjadi benturan antara Kristen-Islam. 2). Konflik komunal yang bernuansa SARA di Maluku Utara, bermula dari Halmahera Utara (Tobelo-Kao dan Malifut) tentang perebutan Tapal batas Wilayah Lingkar Tambang Emas (NHM) sebagai aset ekonomi daerah. 3). Konsentrasi dan mobilisasi masa pada waktu rusuh (1999/2000) Pasukan Merah (Martir kristen), mengatur strategi perang, tempat pengungsi, dan korban rusuh terbanyak berada di Tobelo kemudian berimbas ke daerah lain yang ada diwilayah Propinsi Maluku Utara.4). Masyarakat Tobelo sebelum konflik hidup rukun, aman dan damai di bawah simbol adat hibuah lamo sebagai “perekat”, Namun setelah

rusuh masyarakat tercerai-berai, kehidupan bertengga, kerukunan beragama turut terganggu atau tidak harmonis dalam kehidupan masyarakat Tobelo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah analisis Penyelesaian konflik antarumat beragama suatu pendekatan budaya lokal di Tobelo Halmahera Utara. Mengenai akar konflik antarumat beragama, dan mengapa terjadinya Konflik di Tobelo, relasi antarumat beragama sebelum dan sesudah konflik, Upaya pembinaan kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal di Tobelo Halmahera Utara. Penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sebelum terjadi kerusuhan yang bernuansa keagamaan, kerukunan beragama dalam masyarakat sangat rukun, damai, dan harmonis dengan latar belakang adat istiadat dan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat dibawah simbol “ *Hibua Lamo*” menjadi lambang pemersatu. Namun setelah kerusuhan sosial yang bernuansa SARA terjadi, tatanan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama turut terganggu serta tidak harmonis diantara pemeluk agama.

Penelitian ini bertolak dari suatu asumsi bahwa upaya rekonsiliasi masyarakat Tobelo Halmahera Utara pasca konflik melalui dialog antarumat beragama dengan pendekatan kearifan lokal untuk menciptakan masyarakat aman, damai, rukun dan tercipta harmonisasi di Tobelo Halmahera Utara. Yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi konflik antarumat Beragama ?
2. Bagaimana relasi antarumat beragama Pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara ?
3. Bagaimana Penyelesaian konflik antarumat Beragama berbasis budaya lokal di Tobelo Halmahera Utara ?

C. *Kajian Pustaka*

Penelitian ini diperkuat dengan telaah dan informasi yang ditulis oleh sejumlah penulis dalam bentuk buku dan Hasil Penelitian yang berkaitan dengan konflik Horizontal yang pernah melanda daerah Maluku Utara lebih khusus Tobelo Halmahera Utara. Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kolerasi penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenisnya yang sudah pernah dilakukan, sebagai sebuah langkah ikhtiar untuk menghindari terjadinya pengulangan atau persamaan dalam obyek penelitian terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik antar agama di Tobelo Maluku Utara dalam pendekatan Fenomenologi berbasis kearifan lokal (Hibua Lamo). Banyak penulis yang telah membahas konflik Maluku dan berbagai upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditekankan pada aspek yang belum diteliti kajian terdahulu agar pembahasan lebih lengkap dan akurasi antara lain kajian terdahulu adalah sebagai berikut :

Abdur Rozaki, “ Resolusi Konflik Berbasisi Kearifan Lokal”, Flamma, V.24, 2004.

Budi Setyono, “ Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi,” Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol.3 No. 2, 2013.

Cate Buchanan, *Pengelolaan konflik di Indonesia – sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Centre For Humanitarian Dialogue, 2001).

Ebin E. Darius, *Hubungan Kristen Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara* : Tesis Universitas Halmahera, 2008. Upaya untuk menjaling relasi kembali sesudah konflik dilakukan dengan pendekatan kekerabatan dan ikatan kesekuan . Tingkat kecurigaan masyarakat masih begitu tinggi. Perhatian besar diberikan pada proses Birokrasi pemerintahan dan pada bidang politik praktis membuat masyarakat seringkali terkotak-kotak dalam sekat-sekat agama.

Ruddy Tindage, *Damai Sejati : Rekonsiliasi di Tobelo, Kajian Teologi dan Komunikasi*. Jakarta: YAKOMA-PGI, 2006.

Wasisto Raharjo Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi konflik keagamaan* (Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 2, Nopember 2012. Tulisan ini menganalisis kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan di masyarakat pasca konflik Maluku .

Hamza Tualeka, *Konflik dan integrasi sosial Bernuansa keagamaan*. Disertasi yang tidak diterbitkan, Surabaya: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2010). Terdapat signifikansi *Pela Gandung* sebagai resolusi konflik di Maluku.

Buku lain yang tulis oleh; Kasman Hi. Ahmad, et. al, *Damai Yang Terkoyak, Catatan Kelam dari Bumi Halamahera ,2000*. Buku ini berusaha menjelaskan dan memberi informasi tentang kronologi konflik berdarah yang melulu lantakanan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, dan tercabik-cabiknya akar budaya serta kearifan local yang selama ini diperpegangi oleh masyarakat Halmahera utara sebagai sumber perekat kerukunan dan toleransi beragama di masa silam dengan Falsafah “HIBUALAMO”

Tahir Sapsuha, *Pendidikan Pasca konflik (Pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara)*, Yogyakarta, PT Lkis, 2013 . Dalam penelitian konflik di Tobelo Halmahera Utara terkait dengan konflik, buku itu lebih menitikberatkan pada pendidikan pasca konflik dan relasi antar umat beragama, sehingga konsep pendidikan yang berbasis multikultural sedini mungkin di tanamkan kepada anakdidik siswa sekolah dasar sampai menengah sehingga dapat menghargai antara pemeluk agama serta menciptakan kehidupan yang aman dan damai pasca konflik Tobelo dan Maluku Utara pada umumnya. Pendidikan agama menjadi solusi alternatif di daerah rawan konflik, juga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan potensi konflik sosial yang timbul karena perbedaan agama.

Makbul A.H.Din, *Komunikasi Antarumat Berbeda Agama dalam konstruksi Budaya Lokal (Studi Kasus pada Komunitas Islam Kristen di Kab. Halmahera Utara)*, UNPAD, Bandung. 2015. Hasil penelitian dalam bentuk disertasi ini lebih menjelaskan berkaitan dengan komunikasi antar umat beragama yang dianggap mandeg karena saling mencurigai pada saat konflik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses komunikasi, persepsi perbedaan agama, etnosentrisme dan prasangka sosial, serta kepercayaan norma budaya di antara komunitas Islam –Kristen di Halmahera Utara (Tobelo-Galela)

Kastor, Rustam, *Konspirasi Politik RMS Dan Kristen Menghancurkan ummat Islam Di Ambon Maluku*. Yogyakarta, Wihdah Press, 2000. Buku ini secara tegas mengungkapkan tentang kronologi peristiwa yang menyebabkan terjadi Tragedi Idul Fitri berdarah, 19 Januari 1999. Dan berusaha merekonstruksi kembali berbagai kejadian, pola pertikaian, serta akibat yang ditimbulkan oleh konflik. Yang di latar belakang oleh kesenjangan ekonomi, persaingan penduduk pendatang dan penduduk asli, agama, dan Konspirasi RMS (Republik Maluku Selatan).

Jan Nanere dkk, Buku berjudul *Halmahera Berdarah*, memuat tentang kronologi yang terjadi di Maluku-Maluku utara adalah lanjutan dari rangkaian kerusuhan sosial dan tragedi kemanusiaan, tulisan ini juga menyajikan fakta data-data tentang kerusuhan, serta jumlah korban jiwa dan materi dari kedua belah pihak baik Islam maupun Kristen di Halmahera Utara (Tobelo).

Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta, Galang Press; 2001. Dalam buku ini menjelaskan tentang tantangan agama menghadapi abad ke-21, yaitu isu globalisasi. Demokratisasi, pluralisme, dan dalam kadar tertentu berbagai benturan kebudayaan diramalkan akan terjadi. Bagaimana masyarakat agama merespon gerak sejarah semacam itu. Benarkah akan menjadi subordinate? Benarkah agama tidak lagi menjadi menarik dalam komunitas manusia yang telah serba mekanik itu. Agama sesungguhnya

mempunyai peran strategis di era global. Demikian juga agama Islam bicara tentang demokrasi, pluralisme, masyarakat madani, dan etika bisnis. Islam itu progresif, dinamis dan mempunyai cita moral dalam pembangunan peradaban umat manusia. Islam sebagai agama perdamaian.

Olaf Schumann, *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan*, cet. I. Jakarta Bpk. Gunung mulia, 2004. Buku ini menjelaskan tentang berbagai masalah yang dihadapi umat beragama di Indonesia, baik kehidupan intern maupun ekstern masing-masing umat beragama, orientasi spiritual dan iman serta hubungan antar aliran yang berbeda. Juga berkaitan dengan posisi dan peran agama-agama dalam masyarakat dan hubungan dengan pemerintah. Kerukunan dan kerja sama Agama-agama di Indonesia, toleransi Beragama, dan hubungan antara Kristen dan Muslim.

Giddins, Antony dan David Held (sd), *Pendekatan Klasik dan Kontemporer Mengenai kelompok, kekuasaan dan konflik*. Konflik berkaitan dengan ekonomi dan kekuasaan.

A. Syafi'i Ma'arif, *et.al. Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleransi*, 2004. Menjelaskan secara fenomenal semua agama bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dengan landasan nilai-nilai transendensi, bahkan agama, diyakini dapat memberi justifikasi bagi tumbuhnya budaya-budaya toleransi dalam konteks dan interaksi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Lahirnya watak kekerasan dalam bentuk konflik berdarah atas nama "agama" yang pernah mewarnai sejarah kemanusiaan di negeri ini, bahkan dibelahan dunia lain, kadang member persepsi, apakah agama telah berubah, ataukah, para pemeluk agama yang tak mampu membumikan nilai-nilai transcendental agama yang begitu suci, sacral dan mulia.

Geor B. Grose, *et.al, The Abraham Connection: A Jew Christian and Muslim in Dialog*, diterjemahkan dengan judul: *Tiga Agama Satu Tuhan*, 1999. Buku memperlihatkan sebagai sebuah model dialog antar agama, yang sangat intelektual-rasional untuk mencari titik temu

agama dengan merujuk ketiga tradisi agama monotheis yang bersumber dari Nabi Ibrahim-Yahudi, Nasrani, dan Islam- tentang Nabi Muhammad, Isa (Yesus) dan Musa, yang menyangkut kenabian dan wahyu, serta ketiga agama semitik ini mengakui adanya satu Tuhan.

Andre Ata Ujan,*et.al. Multikulturalisme; Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, 2011. Buku ini menjelaskan tentang Budaya mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia karena kebudayaan merupakan wahana dimana anak manusia untuk pertama kali dan seterusnya mengalami proses pembelajaran menjadi manusia melalui relasi dengan sesamanya, alam dan yang Maha Tinggi (Tuhan) dalam kehidupan sehari-hari yang konkret dan apa adanya. Dalam buku ini juga menjelaskan pengertian multikulturalisme, kebudayaan dan pembentukan identitas diri, memahami dan menyikapi pluralitas budaya, serta mengelola konflik dan resolusi konflik. Imam Nakha'I, *figih pluralis: Telaah Terhadap Relasi Muslim dan Non Muslim dalam kitab-kitab Kuning*. Buku ini Menjelaskan tentang toleransi dalam keragaman; Pluralitas sebagai Sunatullah, karakteristik budaya damai, budaya damai dalam pandangan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan relasi Muslim dan non Muslim.

Wilfred Cantwell Smith, *What is Scripture? A Comparative Approach* di terjemahkan dengan judul Kitab Suci Agama-Agama, 2005. Menjelaskan tentang pemahaman Kitab suci adalah sebuah realitas dan konsep yang diwarisi dari masa lalu, dan terkait dengan sesuatu yang baru dan pluralism dunia modern. Memahami kitab suci tidak berarti harus mengikuti perkembangan situasi zaman sekarang atau situasi masa lalu. Waktulah yang membuat kita menciptakan konsepsi yang baru. Karena konsep kitab suci adalah berbeda dari apa yang kita bayangkan, atau dipahami oleh banyak orang. Hal ini membutuhkan sebuah konsep kitab suci yang lebih tajam dan kesadaran yang lebih sensitive tentang arti menjadi manusia beragama. Penulis juga berusaha menguraikan kerumitan dialiktis antara wahyu dan sejarah. Buku ini berupaya memkompromikan antara dua pendekatan normativitas-doktrin-teologis dan

Historitas- rasional- empirik, agama tidak dilihat dari defenisi semata, tapi menekan pada aspek tradisi, agama berdasarkan tradisi, yang merupakan manifestasi empiris dari hakikat dan esensi agama.

Studi Agama Normativitas atau Historitas, yang ditulis oleh M. Amin Abdullah adalah melihat ketegangan hubungan antar umat beragama tidak hormanis dalam kehidupan beragama dan bernegara, maka menawarkan dua pendekatan dalam memahami agama yaitu pendekatan Normativitas dan Historitas dalam melihat substansi agama dan symbol-simbol keagamaan. Bahkan lebih jauh Amin Abdullah menawarkan pendekatan Integratif-Interkonektif, dalam Buku *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Menuju sikap terbuka dalam beragama. Bandung : Mizan, 1999. Buku ini mengemukakan tentang hubungan antar umat beragama lebih alean dan dialogis antara Islam dan Kristen. Dan lebih penting karena soal inklusivisme keberagamaan sedang mendapatkan momentumnya. Terutama di Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk dan pluralitas beragama.

Robert N. Bellah, *Byond Belief, Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta Paramadina, 2000. Buku secara tegas menolak pendekatan rasionalitas ilmiah dalam memahami sikap keberagamaan yang masuk kedalam rana keimanan atau kedalam dunia religiusitas yang baru, maka dictum yang dianut adalah” *semua pernyataan keimanan harus ditafsirkan kembali*”. Dunia religiusitas yang baru tidak lagi dimopoli oleh kelompok-kelompok yang menggunakan symbol-simbol Agama. Tetapi agama harus dipahami secara terbuka dan universal.

Buku-buku lain yang membahas persolan Toleransi, kerukunan, dan relasi antar umat beragama, teori-teori agama dan konsep-konsep ketuhanan dalam agama-agama semetik dapat dilihat dalam beberapa buku yang tulis oleh; Said Agil Husen Almunawar, *Fikih*

Hubungan Antar Agama. Jakarta, Ciputat Press; 2003. Karel Steenbrink, *Kawan Dalam pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, Bandung. Mizan 1995. Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, Oxford university Press, New York, 1996. Karen Armstrong, *A History of God : The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, All right under and pan-American Copyright conventions : Ballantine Books, New York, 1993. William Montgomery Watt, *Titik Temu Islam Kristen : Persepsi dan Salah Persepsi*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996..

Dari literatur dan hasil penelitian tersebut diatas, belum ada tulisan atau penelitian lebih spesifik yang berkaitan dengan konflik antarumat beragama Pasca konflik di Maluku Utara (Tobelo) terutama dalam bentuk penelitian Lapangan. Atas dasar inilah, penulis akan menguraikan beberapa hal penting yang belum diuraikan secara spesifik di dalam literatur yang penulis temukan, khususnya berkaitan dengan Konflik Antarumat beragama berbasis multikultural di Maluku Utara.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis menyelesaikan konflik antarumat beragama Pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara.
- b. Untuk membangun relasi antarumat beragama pasca konflik berbasis budaya lokal di Tobelo.
- c. Untuk memberi kontribusi dan solusi dalam penyelesaian konflik antarumat beragama di Tobelo Halmahera utara dengan pendekatan budaya lokal dan menjadi bahan masukan terhadap pemerintah dalam penyelesaian konflik antarumat beragama.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian di harapkan menjadi kontribusi dan khazanah keilmuan bagi peminat studi Agama dan Konflik dalam masyarakat multikultural dan hubungan antar agama.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap pemerintah untuk menyelesaikan resolusi konflik yang bernuansa SARA, sehingga masyarakat dapat hidup rukun, aman dan damai antara pemeluk agama di Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya.
- c. Hasil penelitian dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik yang bernuansa SARA dan malahirkan sikap toleransi antarumat beragama pasca konflik di Tobelo dan Maluku Utara pada umumnya.

Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah daerah dan tokoh agama , masyarakat untuk menyusun program pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama dalam tiga bentuk kerukunan yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah dapat berjalan secara harmonis
- b. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan keagamaan yang strategis agar dapat meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di Halmahera Utara.
- c. Hasil Penelitian ini juga diharapkan menjadi penguatan terhadap lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga adat dalam mengembang misi perdamaian dan rekonsiliasi , Selain itu hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam

pengembangan khazanah intelektual dan menjadi bahan informasi bagi semua pihak khususnya tokoh agama, adat dan pihak-pihak yang terkait di Tobelo dan Maluku Utara pada umumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Konflik dan Integrasi*

1. Perspektif Konflik

*Perspektif Konflik*⁸ Konflik dipakai dalam pengertian lebih umum yaitu perselisihan, pertentangan atau keterangan antara suku, etnis atau antar agama. Dalam konteks ini konflik bisa dalam pengertian batin, budaya maupun sosial yaitu pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.⁹ Dalam teori lain Konflik menurut Subakti adalah benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan perentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok dan kelompok dengan pemerintah.¹⁰ Konflik dalam pandangan Antony Giddens adalah perbedaan kepentingan kelas Bourjuis maupun plotariat, pemilik modal atau industri dan kaum buruh yang tereksplotasi. Konflik kelas adalah perbedaan antara pengetahuan kelas dan dua bentuk kesadaran kelas yakni “kesadaran konflik dan kesadaran revolusioner”. Pengetahuan kelas cenderung merupakan gaya kognitif yang menjadi ciri kelas menengah baru atau bourjuis kecil baru bersifat individualisme dan berorientasi pada karir.¹¹

Dilihat dari sudut pandang konflik, keanekaragaman agama, etnik, dan kebudayaan sering kali tidak dipandang sebagai potensi yang menguatkan, melainkan dijadikan simbol identitas untuk membedakan kelompok sendiri dengan kelompok lain. Kemajemukan sebagai keniscayaan dari pembentukan bangsa masih dianggap sebagai perkara yang nisbi dan relatif. Di atas persepsi ini dapat diamati bagaimana para pengamat antropologi agama melihat bahwa Indonesia bagian barat adalah wilayah kultural Islam. Sementara itu, beberapa daerah

⁸Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, hl.19.

⁹DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h, 757.

¹⁰Lihat Indra Lesang, dkk, *Konflik dan Pergerakan Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 83.

¹¹Anthony Giddens dan David Held (ed). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 43

di Indonesia bagian Timur adalah wilayah kultural Nasrani. Jika pada suatu saat terdapat gejala-gejala yang menunjukkan intensitas kegiatan keagamaan yang berbeda dengan agama mayoritas penduduk maka yang muncul adalah prasangka adanya ekspansi dari apa yang disebut sebagai golongan lain dari mereka.¹² Sikap eksklusif ini tentu menjadi perkara merugikan dalam pembentukan suatu tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kebangsaan "*Bhineka Tunggal Ika*" berbeda-beda akan tetapi tetap satu juga, Indonesia. Falsafah hidup bangsa ini tentunya bertolak belakang dari perumusan dinamika konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik bukanlah keinginan yang dicita-citakan dalam tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, harus diakui, munculnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Berbagai kepentingan individu, kelompok, etnis, dan bahkan ras-ras tertentu saling menyudutkan satu atas lainnya demi kepentingan yang tidak bertujuan kepada kemaslahatan umum.

2. Pemetaan Konflik

Dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada interaksi, konflik selalu saja ada dan konflik merupakan bagian yang tidak dapat terelakkan dalam hidup. Konflik dapat terjadi antarindividu atau antarkelompok. Konflik yang tidak terselesaikan tentunya akan membawa pada dampak yang tidak baik. Di Indonesia, khususnya pasca reformasi atau pasca lengsernya Soeharto, banyak konflik massa terjadi. Konflik tersebut didominasi oleh konflik antar etnis, agama, sosial, dan politik.

Konflik memiliki pengertian, suatu proses pergulatan hingga pertikaian individu dengan individu lainnya atau dalam suatu kelompok. Sebenarnya, konflik pun menyertai individu yang disebut di kemudian dengan konflik batin atau jiwa. Dalam catatan Loekman

¹²Ahmad Syafi'I Mufid, *Dialog Agama*, h. 35.

Soetrisno dijelaskan bahwa konflik bukan selalu mengandung makna yang disfungsional. Konflik bisa bermakna fungsional seiring dengan keberadaannya yang mewujudkan sebagai wahana untuk mendorong terjadinya suatu perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik.¹³

3. Konstruksi Sosial Konflik

Konstruksi Sosial Konflik.¹⁴ Dalam masyarakat majemuk adalah kondisi alamiah yang eksis dalam setiap konteks wilayah Negara bangsa di dunia walaupun tidak setiap Negara bangsa memiliki kemajemukan, dan tingkat kemajemukan yang berbeda. Masyarakat majemuk disusun oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial, seperti identitas keagamaan, keetnisan, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang mendefinisikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok lain. Hal penting yang muncul dalam pemikiran sosiologis terhadap adanya masyarakat majemuk adalah konsekuensi-konsekuensi terhadap beberapa hal penting kehidupan sosial seperti stabilitas dan harmoni sosial dan persaingan identitas dalam arena-arena sosial. Secara umum dari semua konsekuensi tersebut, konsekuensi masyarakat majemuk adalah konflik sosial.

Konflik Maluku Utara sebagai bagian komunalitas dari progresivitas konflik Nasional mengarah pada alasan agama. Percampuran politik lokal merupakan optik konflik internal dan eksternal penduduk Maluku Utara. Pada pertengahan 1990-an, secara politik, Maluku Utara dikuasai oleh dua kubu yang bersaing, dua kekuatan politik PPP dan Golkar. Sultan Ternate memimpin kelompok pertama, sementara Bupati Halmahera tengah memimpin kelompok kedua yang kemudian secara formal didukung oleh Sultan Tidore, yang menjadi rival Sultan Ternate sejak lama. Selanjutnya pertumbuhan politik berikutnya dari dua persaingan tersebut berlangsung usaha untuk saling mendominasi di arena politik lokal. Dari

¹³Loekman Soetrisno, *Konflik Sosial, Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2003), hl. 14.

¹⁴Novri Susan, Pengajar Kelas Pengelolaan Konflik dan Analisis Perdamaian Indonesia, Departemen Sosiologi UNAIR.

persaingan ini pula teror dan intimidasi menjadi fenomena yang terus berjalan.¹⁵ Menurut Tomagola, bahwa dari sebagian sebab kemunculan konflik di Maluku Utara adalah perebutan teritorial agama.¹⁶ Selain itu penyebab lain adalah eksploitasi Australia atas tambang emas yang berada di wilayah Kao-Malifut yang diperebutkan oleh orang-orang kristen dan muslim yang berada di wilayah lingkaran tambang tersebut.¹⁷

Kronologi konflik di beberapa daerah di Maluku Utara, berakar pada masa lalu negeri ini. Peperangan demi peperangan, atas nama apapun, terus saja berlanjut Sejarah Ternate dan Tidore memang kurang damai. Menurut hikayat raja-raja di Maluku Utara, bentrok antara Ternate dan Tidore itu bermula dari perebutan *stampa* (mahkota) yang memberi legitimasi siapa yang paling berhak menjadi koordinator di empat kerajaan di Maluku Utara. Ternate yang dalam tradisi daerah Moloku Kie Raha merupakan adik bungsu, lalu menuntut agar saudara sulung, raja Makian, untuk mengembalikan *stampa* yang dijanjikan untuk Raja Ternate sebagai adik (saudara bungsu).¹⁸ Tidore yang merupakan adik ketiga merasa tersinggung. Dan sejak saat itu kedua kerajaan ini tak pernah akur. Hingga ketika Sultan Nuku dari Tidore, pada abad 17, menyerang Belanda di Ternate, raja-raja Ternate malah berpihak ke Belanda.

Z. Leirissa dalam bukunya, "*Halmahera Timur dan Raja-raja Jailolo*" menyebutkan, lenyapnya Jailolo dari empat kerajaan pada awal abad 17, akibat aneksasi kerajaan Ternate. Indikasi ini juga mencuat ketika raja-raja Makian terpaksa lari ke pulau Bacan. Mereka didesak, hingga harus mengungsi, dan ini kemudian dikenal dengan nama "Marabose".

¹⁵Tamrin Amal Tomagola, *Republik Kapling* (Yogyakarta : Resist Book, 2006), h. 52.

¹⁶Taher Sapsuha : *Pendidikan pasca konflik; Pendidikan Multikultural Berbasis konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*; (Yogyakarta: LKIS, 2013), h. 5

¹⁷Sebab lain adalah kompetisi Jabatan Gubernur oleh Bupati Halmahera Tengah (Bahar Andily) dan Sultan Ternate (Mudaf Syah) pada Propinsi Baru Maluku Utara. Lihat Tamrin Tomagola, dalam Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, h, 210

¹⁸"Mengenal Konflik Antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore" dalam buku, Mukhair Pakkanna & Nurdin Abbas, *Bara di Maluku, Upaya Untuk Mempertahankan Sejengkal Tanah* (Jakarta: Yayasan Lukman Harun, 2000), h. 72-73

Peristiwa ini disebut oleh Sultan Bacan, Gahrul Adyan Syah MBA, terjadi pada tahun 1718. Padahal dalam strata konfederasi empat kerajaan, yang lebih dikenal dengan nama "*Moti Staten Verbond*" atau perjanjian Moti, Makian adalah "saudara sulung" dari empat kerajaan.

Menurut Paul Wehr, konflik merupakan pembawaan sejak lahir di dalam bintang sosial, konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk, konflik adalah disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala ketegangan patologis, konflik adalah ciri yang tidak terhindarkan dari kepentingan negara dan kondisi anarki internasional, konflik adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk, konflik adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat.¹⁹ Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi konflik antara lain:

1. Menggunakan kekuasaan dalam rangka mencegah konflik yang terjadi ke wilayah lain. Kekuasaan ini harus berdasarkan tindakan yang bijak dan tidak dipengaruhi oleh motif yang emosional.
2. Memperlancar usaha kedua belah pihak untuk menurunkan ketegangan melalui cara-cara diplomatis. Situasi panas harus lebih dahulu didinginkan, dengan cara, antara lain: penggunaan metode persuasif tapi bukan dengan paksaan karena hal ini hanya akan mendorong tindakan paksa dari yang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian pada orang atau kelompok lain.
3. Upaya menghindar, itulah watak manusia untuk menghindari konflik sesudahnya yang berkepanjangan. "Menghindarkan diri" adalah salah satu sifat arif yang harus dimiliki masyarakat. Sebuah konflik biasanya berasal dari "mulut" dan dari

¹⁹Disadur dari Paul Wehr, *Conflict Regulation*, (Boulder, CO: Westview Press, 1979), h. 1-8.

ucapan yang menyakiti orang lain. Perlu diingat bahwa kadang-kadang mulut seseorang bisa merugikan dan menciptakan nasib buruk bagi orang lain. Memelihara lidah dan ucapan dengan baik, serta bijak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita.²⁰

Kenyataan sosial objektif yang terlihat dalam hubungan individu dengan lembaga-lembaga sosial dilandasi oleh aturan-aturan atau hukum merupakan produk manusia itu sendiri, bukan merupakan hakikat dari lembaga-lembaga itu. Ciri *coercive* yang menyertai struktur sosial yang objektif merupakan suatu perkembangan aktivitas manusia dalam proses eksternalisasi atau interaksi manusia dengan struktur-struktur sosial yang sudah ada. Kenyataannya aturan sosial tersebut akan terus berhadapan dengan proses eksternalisasi. Dengan memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan dan masalah legitimasi maka kenyataan sosial itu merupakan suatu konstruksi sosial buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam, ke masa kini dan menuju masa depan. Konstruksi sosial itu sendiri pada gilirannya berkarakter plural, relative, dan dinamis.

4. Fenomenologi Konflik

Fenomenologi, adalah gejala atau fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat antar umat beragama, dan fenomenolog menunjukkan bahwa agama perlu di kaji secara serius dan memberi kontribusi terhadap pemahaman penganut agama tentang kemanusiaan dengan cara yang positif bukan hanya dari sisi luar tapi terlebih pada esensi terdalam dari ajaran agama yang dianut oleh pemeluk agama masing-masing.²¹

²⁰William Chang, *Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS, 2003), h. 28-29.

²¹Lihat Peter Connolly (ed)., *Approach to The Study of Religion*, diterjemahkan dengan judul: *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Cet I. Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 105-109.

Menurut Alfred Schutz, Fenomenologi sebagai teori sekaligus sebagai pendekatan, antara lain di kembangkan Alfred Schutz (muridnya Edmund Husserl). Secara operasional teori ini kemudian digunakan dalam ilmu-ilmu sosial termasuk dalam penelitian studi keagamaan untuk meneropong realitas masyarakat agama yang berasal dari kesadaran individu atau kelompok dalam komunitas. Kajian fenomenologi juga mengenai pengetahuan yang berasal dari kesadaran , atau cara bagaimana orang –orang dapat memahami objek dan peristiwa-peristiwa atas pengalaman sadar mereka. Fenomenologi berasumsi “Manusia adalah makhluk kreatif”, berkemauan bebas, dan memiliki beberapa sifat subjektif”, gagasan pokok fenomenologi adalah; bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberi makna secara terhadap apa yang mereka lihat. Interpretasi merupakan proses aktif dalam memberi makna terhadap sesuatu yang diamati, seperti sebuah teks, sebuah tindakan, atau suatu situasi, yang semuanya di sebut pengalaman (experince). Interpretasi merupakan sebuah proses aktif dari pikiran (mind), sebuah tindakan kreatif dalam mencari berbagai kemungkinan makna.

Tentang pengetahuan, Berger menyatakan bahwa banyak orang mengambil pemikiran dari fenomenologi Alfred Schutz. Pemikiran tersebut menjelaskan tiga unsur *pengetahuan* yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yaitu *dunia sehari-hari*, *sosialitas*, dan *makna*. Dunia sehari-hari sebagai dunia yang paling fundamental dan dunia terpenting bagi manusia. Dia menjadi orde tingkat satu (*the first order of reality*), yang sekaligus menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan orde-orde selanjutnya. Kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subjektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren.²²

²² Berger & Luckman, 1990: h. 28

5. Konflik dan Integrasi

Di Indonesia istilah integrasi masih sering dikacaukan dengan istilah pembauran atau asimilasi . Integrasi berarti integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan integrasi pluralisme sosial.²³ Ketiga bentuk integrasi ini di jabarkan sesuai dengan kepentingan kelompok masyarakat atau agama, saling memberi dan menerima dalam hal kebudayaan dan sosial kemasyarakatan yang saling berbeda misalnya di Halmahera Utara banyak kelompok etnis yang mendiami daerah ini antara lain etnis Tobelo, Galela, Loloda, Kao dan Malifut Makian. Dan etnis lain Cina, Jawa, Bugis Makassar, Buton dll. Selama ini sering dipertentangkan antara etnis Pendatang maupun pribumi.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, antara lain:1). Konflik ideologi yang mendasar pada rasa tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain. 2). Sistem strasifikasi sosial yang berubah dan mobilitas sosial individu-individu dan kelompok yang secara sosial. 3). Perjuangan mencapai kekuasaan politik yang semakin tajam untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kolonial yang cenderung mencampuradukan antara pertikaian agama dalam politik. 4). Kebutuhan mencari kambing hitam untuk memusatkan ketegangan akibat perubahan sosial yang begitu cepat. Dari gambaran ini dapat dipahami bahwa paling tidak terdapat tiga faktor utama terjadinya konflik, ideologi strasifikasi sosial dan politik, sedangkan menjadi faktor utama terjadi integrasi adalah adanya kesadaran dan kesatuan kebudayaan, kenyataan artikulasi kebudayaan dan sistem sosial dimanapun.

B. Konflik Agama dan Budaya

1. Pengertian Agama

Agama adalah persoalan yang menyelidiki tentang pengertian apa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh agama, sedangkan persoalan tentang gambaran proses kerja agama

²³A. Ubaidillah dkk, *CIVIC EDUCATION, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Press, 2000), h, 24.

(pelaksanaan ajaran agama) lebih berada dalam pengertian yang fungsional. Atau, dengan kata lain yang pertama lebih menekankan aspek *das sollen* (apa yang seharusnya muncul dari) agama, sementara yang terakhir menekankan aspek *das sein*-nya (apa yang kenyataannya muncul secara empiris dalam sikap keberagamaan). Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa secara idealitas keseluruhan agama mengajarkan pemeluknya untuk mencintai sesama manusia sebagai manifestasi iman kepada Tuhan.

Menurut Talcott Parsons, agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan benda-benda sakral. Kepercayaan kepada yang sakral merupakan “rujukan eksistensi”, bukan norma, karena kepercayaan tersebut tidak berkaitan dengan aksi praktis.²⁴ Perhatian kepercayaan atau agama bukanlah pada dunia empiris, namun pada “*realitas non empiris*” seperti terdapat pada dewa dan Tuhan. Dalam definisi tersebut sebenarnya, agama dilihat sebagai pendukung atau penganut agama tersebut tidak tampak tercakup di dalamnya. Itulah sebenarnya, masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan baik individu maupun kelompok atau masyarakat, pengetahuan, dan keyakinan keagamaan yang berbeda dari pengetahuan dan keyakinan lainnya yang dipunyai manusia, peranan keyakinan keagamaan terhadap kehidupan duniawi dan sebaliknya, dan kelestarian serta perubahan-perubahan keyakinan keagamaan yang dipunyai manusia, tidak tercakup dalam definisi tersebut.

Kehadiran agama bagi setiap individu merupakan misteri yang tidak dapat dirumuskan secara detail dan transparan. Kenyataan ini tentunya dapat dirasakan pada kehadiran yang bernilai spritual. Dari sebagian alasan inilah melihat agama pada aspek definitif akan menuai beberapa kesulitan. Bagi individu yang beragama ketika diajak untuk menelisik secara komprehensif dari pengertian agama, pernyataan atas sulitnya memaknai agama terasa terus akan disampaikan. Beragam kesulitan tersebut muncul atas eksistensi

²⁴ Lihat Bryan S. Turner (ed.), *The New Blackwell Companion To The Sociology Of Religion* : Sosiologi Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 133

agama itu sendiri yang diwujudkan berdasarkan kepada skenario Tuhan terhadap manusia. Dighe menjelaskan bahwa agama merupakan sebuah kreasi yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Keberadaannya diyakini oleh setiap individu sebagai konstruksi atau bangunan yang melindungi manusia dari dunia barbar dan kesalahan-kesalahan pada wilayah sosial.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Dighe tersebut, Mukti Ali juga merasakan perkara yang tidak jauh berbeda dalam merumuskan definisi operasional agama. Menurutnya ada tiga argumentasi yang dapat dijadikan alasan. *Pertama*, pengalaman agama adalah soal batin dan subjektif. *Kedua*, barangkali tidak ada orang yang begitu semangat dan emosional daripada membicarakan agama. *Ketiga*, konsepsi tentang agama sangat ditentukan oleh tujuan orang yang mendefinisikan agama.²⁵ Secara tegas Mukti Ali menegaskan bahwa naluri beragama yang muncul dalam diri setiap individu tidak dapat dinyatakan pada aspek perbedaan yang mengitarinya. Definisi tentang agama harus dilihat pada satu nilai utuh *unity in whole values* dari permulaannya.

2. Pola dan Karakteristik Agama

Menurut Durkheim, terdapat aspek penting yang dapat mendasari keberagaman individu; iman dan ritual.²⁶ Untuk tingkatan pertama ini Durkheim menegaskan bahwa kehadirannya merupakan titik awal individu guna membangun aspek kepercayaannya kepada Tuhan. Sementara itu, dalam kerangka yang kedua, Durkheim menjelaskan bahwa keberadaannya hanyalah bagian *particular of modes* pendukung dalam meneguhkan nilai dasar keimanan yang telah internalisasi dalam jiwa. Dasar aktualitas individu terhadap dua karakter keagamaan ini menjadi pemisah di antara keduanya.

²⁵Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), hl. 13-16.

²⁶Emile Durkheim, "The Elementary Form of Religious Life", dalam *A Reader in Anthropology of Religion*, Michael Lambek, ed., (Australia: Blackwell Publishing, 2002), h. 40.

Senada dengan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Haroon Nasir di atas Abu Bakar Jabir al-Jazaairi menjelaskan bahwa dalam etika yang harus diapresiasi oleh seorang hamba kepada Allah swt., Dia telah menjelaskan pahala yang besar atas penghambaan ini. Pernyataan Abu Bakar Jabir al-Jazaairi di atas didasarkan kepada firman-Nya. (Q.S. An-Nahl: 97). Dalam penjelasan kedua, Haroon Nasir menjelaskan bahwa Tuhan benar-benar menjaga stabilitas hambah-Nya, baik dan buruknya perbuatan tersebut. Tuhan menjanjikan pahala berlipat atas semua kebaikan yang dilakukan oleh hambah-Nya. Untuk penjelasan *ketiga*, Haroon Nasir menegaskan bahwa dalam keberagaman setiap orang tertuju di dalamnya pada suatu keyakinan akan pemberian Tuhan atas semua amal perbuatan yang dikerjakan. Dasar kepercayaan ini menjadi pemicu utama bahwa dalam karakteristik suatu agama, manusia bernaung di bawahnya untuk mendapatkan karunia Tuhan.

3. Fungsi dan Tujuan Agama

Agama dalam pandangan Emile Durkheim dapat mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial. Agama dapat melestarikan masyarakat, memeliharanya dihadapan manusia dalam arti memberi nilai dan menanamkan sifat dasar bagi manusia.²⁷ Termasuk dalam melaksanakan pemujaan dan ritus keagamaan dalam rangka mengukuhkan jati diri kelompok sosial tertentu. Menurut Durkheim agama pada dasarnya merupakan sesuatu yang kolektif.²⁸ Dalam konteks ini, fungsi agama bisa menyediakan dua hal penting. *Pertama*, memberikan suatu (cakrawala) pemahaman tentang dunia luar yang tak terjangkau oleh manusia (*beyond*), dalam arti dimana deprivasi dan fustarasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. *Kedua*, agama adalah sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberi jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk mempertahankan moralnya.

²⁷Lihat J. Dwi Narwoko *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, h. 255.

²⁸ Emile Durkheim, *Sejarah Agama; The Elementary Forms of the Relegius Life* (Yogyakarta: IRCiSod, 2005), h. 8

Agama dalam bingkai sakralnya mengajak umat manusia untuk membangun tatanan masyarakat yang baik dan bijaksana serta berketuhanan. Berpijak pada penegasan ini, agama dalam nilainya yang komunal berorientasi untuk memupuk sebuah kesadaran dalam diri setiap individu pada signifikansi solidaritas. Bangunan solidaritas harus diwujudkan kepada pemeluk agama diluar kepercayaannya. Terjadinya kesenjangan sosial pada kepemelukan individu dalam agama berakar pada putusnya pemahaman mereka akan tujuan dan fungsi agama itu sendiri. Paradigma disiplin sosiologi agama memberi tiga perspektif utama sosiologi yang sering kali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat, yaitu perspektif fungsionalis, konflik, dan interaksionisme simbolik. Untuk mengungkap jarak dan pemisahan di antara ketiga perspektif di atas dapat dilihat pada kategorisasi berikut:

a. Perspektif Fungsionalis

Perspektif fungsionalis memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja dalam suatu cara yang teratur menurut seperangkat peraturan serta nilai yang dianut oleh mereka. Dari perspektif fungsional agama, Durkheim melihat bahwa agama memiliki fungsi sosial signifikan.²⁹

Secara esensial, prinsip-prinsip pokok perspektif fungsional adalah sebagai berikut:

(1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung, dan setiap bagian-bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. (2) Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas

²⁹Dalam pemetaan perspektif ini Durkheim menjeaskan jika masyarakat memerlukan ritual-ritual tertentu tetap eksis, maka konsekuensinya adalah tidak aka ada satu masyarakat yang tidak memiliki sebuah agama atau sesuatu yang berfungsi sama dengan agama. Jadi, walaupun ide-ide agama dianggap salah dan absurd oleh sebagian kalangan, perilaku keagamaan akan selalu ada dalam setiap masyarakat, karena memberikan kekuatan kepada mereka. Ide-ide keagamaan bisa saja diperdebatkan, namun ritual-ritual atau bentuk lain yang berfungsi sama akan selalu dipertahankan. Masyarakat tidak akan eksis tanpa adanya upacara-upacara, dan dengan begitu, agama pun akan selalu ada, baca: Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran*, hl.167.

mereka secara keseluruhan. Untuk itulah, eksistensi dari satu bagian tertentu pada masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya di masyarakat dapat diidentifikasi. (3) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatnya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. (4) Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan ekuilibrium, timbulnya gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni atau stabilitas. (5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi apabila hal tersebut terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Dari ketiga perspektif utama dalam sosiologi di atas, setidaknya sudah bisa dilihat hal-hal yang menjadi pokok kajian para sosiolog dalam pengkaji permasalahan keagamaan di masyarakat. Luasnya cakupan dimensi agama yang ada, sebagai konsekuensi dari kecenderungan para sosiolog dalam mendefinisikan agama secara inklusif, sebenarnya telah membuka kesempatan yang luas munculnya berbagai perspektif. Kemunculan berbagai perspektif tersebut mengarah pada terciptanya kontribusi maksimal bagi upaya-upaya memahami perilaku-perilaku sosial masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan beragam keyakinan dan doktrin-doktrin keagamaan yang ada. Namun demikian, pembahasan sosiologis tentang berbagai fenomena keagamaan yang berkembang di masyarakat selama ini cenderung terpusat di sekitar permasalahan fungsi ganda agama bagi masyarakat, yaitu fungsi integrative dan disintegratif.

b. Perspektif Budaya.

Perspektif Islam, agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, namun kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Agama bersifat mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu

dan tempat. Agama adalah sistem hubungan manusia dengan Tuhan.³⁰ sedangkan budaya bersifat relatif tergantung perkembangan peradaban manusia. Budaya yang merupakan bagian dari agama, ia senantiasa mengalami perubahan berdasarkan cipta, rasa, dan karya manusia.³¹ Menurut Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip Jaih Mubarak bahwa, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia sub-ordinat, berada di bawah agama dan tidak pernah sebaliknya.³² Berbeda dengan agama pada masyarakat primitif. Ia disebut sebagai salah satu pola budaya di samping pola lain; pola sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan filsafat.

C. Agama dan Interaksi Sosial

1. Agama Sebagai “Modal Sosial”.

Dalam interaksi sosial nilai agama, kerukunan dan budaya dipandang sebagai modal sosial dasar masyarakat yang dapat berinteraksi antara satu individu dengan kelompok yang lain. Nilai-nilai dasar ini dalam perespektif sosiologis agama dipandang sebagai habitus.³³ Habitus adalah sistem diposisikan yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable-transposable disposition*) yang berfungsi sebagian generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara obyektif.³⁴

³⁰Lihat Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2014, h. 31.

³¹Pengertian Kebudayaan (*culture*), peradaban (*civilization*), dalam bahasa Arab *tamaddun* atau *madaniyah*. Sedangkan *tsaqafah* berarti kebudayaan. Atau sering menggunakan istilah *al-hadarah*. Bahkan sering menyebut “adab atau Etika) kata lain yang digunakan untuk menyebut sebuah peradaban atau kesusastaan yang lebih bernuansa intelektual. Lihat Rusydi Sulaiman, h. 34

³² Lihat juga dalam Yustion, dkk (Dewan Redaksi), *Islam dan Kebudayaan: Dulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), hlm.. 172-173. Dalam Rusydi Sulaiman, *Ibid*, h, 33

³³ Lihat Bryan S. Turner (ed.) *The New Blackweel Companion To The Sosiologi Of Region “Sosiologi Agama”* (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 359

³⁴ Pierre Bordieu, dalam Recharad Harkat (et.al) *Habitus +Modal) +Ram =poletik sulasastra* (Yogyakarta: 2005), h. vii-x.

Pemikiran Habitus, bermula dari Aristoteles dan St. Thomas Aquinas, pada awalnya dikaitkan dengan Mauss, tetapi dalam penjelasan yang lebih sempurna dalam analisis Elias tentang transformasi tingkah laku dalam sejarah Barat, yang menekankan bagaimana subyek bertubuh bersifat luwes dan sangat mudah dirasuki dalam kaitannya dengan proses-proses sosial skala besar. Namun paparan yang paling terkenal dan berpengaruh tetap berada ada dalam paparan Bourdieu tentang watak bertubuh pro-kognitif yang merangsang bentuk-bentuk khusus orientasi kepada dunia, mengorganisir masing-masing indera dan pengalaman badaniah generasi ke dalam hierarki khususnya, dan menggiring manusia kepada cara-cara khusus untuk mencari tahu dan bertindak.³⁵

Bourdieu memperluas kembali konsep habitus Marcel Mauss, walaupun konsep ini muncul dalam karya Aristoteles, Norbert Elias, Max Weber, dan Edmund Husserl. Ia menggunakan konsep habitus ini dengan cara yang sistematis dalam usaha memecahkan antinomi terkenal dalam ilmu-ilmu humaniora; obyektivisme dan subyektivisme.³⁶ Bourdieu mengkombinasikan teori dan fakta yang bisa diverifikasi, dalam usaha mendamaikan kesulitan-kesulitan, bagaimana memahami subyek di dalam struktur obyektif. Dalam proses itu, ia mencoba mendamaikan pengaruh dari dua hal yaitu latarbelakang sosial dan pilihan bebas terhadap individu. Demikian juga Bourdieu merintis kerangka dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, modal simbolik, serta habitus, rana (field) atau lokasi, doxa, dan

³⁵ Lihat Bryan S. Turner (ed.) *The New Blackwell Companion To The Sosiologi Of Region* "Sosiologi Agama", h. 359

³⁶ Pierre Bourdieu (1930-2002) adalah sosiolog Perancis dan penulis yang terkenal karena pandangan politiknya yang vokal dan keterlibatan dalam isu-isu publik, ia seorang intelektual terkemuka dan menjadi "referensi intelektual" bagi gerakan yang menentang neo-liberalisme dan globalisasi yang berkembang di Perancis dan bagian dunia lain selama 1990-an. Karya termashur "Distinction" dengan teori populer "Habitus". Lihat Satrio Arismunandar, *Pierre Bourdieu dan Pemikirannya Tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik* "Makalah" tt, h. 1- 4

kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika, relasi, dan kekuasaan dalam kehidupan sosial.³⁷

Demikian juga menurut Berger bahwa nilai penting agama dalam sepanjang sejarah sesungguhnya mencerminkan fakta, meskipun agama merupakan produk dari konstruksi sosial, muatan-muatan simbolnya menempatkan kehidupan dan takdir manusia kedalam kosmos sakral yang melampaui realitas sehari-hari. Kosmos ini berfungsi untuk meyakinkan kembali para individu akan kebermaknaan dan realita kehidupan, untuk membekali mereka dengan kerangka konseptual dan eksistensi yang menjadi sarana bagi mereka agar bisa bertindak, membangun identitas berbasis-peran dan mengembangkan sebuah habitus terstruktur yang, secara biologis, kurang dari diri mereka. Dalam konteks ini Berger menumbuhkan minat Weber dengan menganalisis serangkaian teodise (ajaran tentang keadilan dan kasih sayang Tuhan ketika kita mendapatkan hal-hal yang kejam, buruk dan ketidakadilan dalam kehidupan ini) dari hasrat "irasional" agar terserap kedalam *Other* yang menonjol dalam mistisisme agama sehingga ke dalam paparan yang sangat rasional tentang signifikansi universal dari setiap perbuatan manusia didalam kompleksitas karma-samsara dalam agama India) sebagai konstruksi kultur yang tidak bertujuan untuk memberikan kebahagiaan ataupun imbalan/pahala namun makna, terutama dalam kaitannya dengan fakta kejam kematian.³⁸

Bourdieu, menggunakan beberapa terminologi ekonomi untuk menganalisis proses-proses reproduksi sosial dan budaya, tentang bagaimana berbagai bentuk modal cenderung untuk di transfer dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Modal Budaya seperti; kompetensi, keterampilan, kualifikasi juga dapat menjadi sumber salah satu pengenalan dan

³⁷ Doxa (Himne atau Pujian) adalah nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned) yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), menginformasikan tindakan-tindakan dan pemikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (fields). Satrio Arismunandar, h. 1-3

³⁸ Bryan S. Turner, (ed). *Sosiologi Agama*, h. 360

kekerasan simbolik. Kata kunci dari proses ini adalah transformasi warisan simbolik atau ekonomi seseorang (misalnya aksesoris atau harta milik) menjadi modal budaya (seperti: kualifikasi universitas) suatu proses dimana logika ranah-ranah budaya dapat menghalangi atau menghambat, tetapi tidak dapat mencegah.³⁹

Indonesia khususnya Tobelo Halmahera Utara, pemikiran Bourdieu ini bermanfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial budaya, ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. Sebaliknya dapat dilihat secara kritis terjadinya represi dan kekerasan simbolik, yang dilakukan oleh rezim atau kelompok yang berkuasa terhadap masyarakat kelas bawah, yang terpinggirkan dalam proses “pembangunan”.⁴⁰

Agama yang konkrit adalah yang dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, institusi, ritus, simbol, para pemukanya. Semua unsur yang memberi wajah konkrit agama ini bisa mengkristal dalam bentuk penafikan terhadap yang berbeda. Maka sangat rentan pertentangan. Provokasi tidak akan berhasil kalau kebencian tidak ada. Sedikit provokasi saja akan mudah membakar perilaku agresif atau kekerasan terhadap pemeluk agama lain.⁴¹ Kunci masalah terletak pada ‘tidak bisa menerima yang berbeda’ tetapi harus saling menerima dan memahami.

2. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Banyak para ahli sosiologi sepakat bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama bagi

³⁹Satrio Arismunandar, *Pemikiran tentang Habitus*, h. 8

⁴⁰Satrio Arismunandar, *Pemikiran tentang Habitus*, h. 8

⁴¹Haratmoko, *Agama-agama dan Masalah Kekerasan ;Proses dari Imajiner Sosial Ke Kekerasan* , h. 2

terjadinya aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.⁴²

Demikian juga ahli sosiolog Max Weber bahwa metode yang digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan pendekatan *verstehen*. Istilah ini tidak sekedar merupakan introspeksi yang hanya bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain, sebaliknya apa yang dimaksud Weber dengan *Verstehen* adalah kemampuan untuk berempati adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dengan situasi serta tujuan-tujuannya yang dilihat menurut perspektif itu.⁴³ Lebih lanjut Weber mengklasifikasi ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem struktur sosial masyarakat, antara lain ; 1. Rasional instrumental (pertimbangan dan pilihan yang sadar untuk mengambil tindakan), 2. Rasionalitas yang berorientasi nilai, 3. Tindakan tradisional, 4. Tindakan efektif (tindakan ini berdasarkan perasaan atau emosi dan bersifat spontan). Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial yang di kemukakan adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan. Tetapi tindakan sosial apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.⁴⁴

3. Faktor-faktor dan Ciri-ciri Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai hubungan terhadap penafsiran sikap dan pengertian sesama individu dan kelompok. Terjadinya proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

⁴²Lihat. "Pengambilan Peranan Dalam Interaksi Sosial", dalam J. Dwi Narwako & Bagong Sunyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 20.

⁴³Paul, Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 1986, h. 216 .

⁴⁴Lihat J. Dwi Narwako & Bagong Sunyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 19.

dapat bergerak sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan yang bergabung. Diantara Faktor-faktor interaksi sosial meliputi:

- a. Faktor Peniruan (imitasi)
- b. Faktor Sugesti
- c. Faktor Identifikasi
- d. Faktor Simpati

Norma sosial adalah kelakuan standar yang dijadikan pegangan oleh suatu perkumpulan itu diharapkan adalah dengan mematuhi. Pada umumnya norma sosial merupakan garis panduan bagi anggota masyarakat pada waktu menghadapi suatu keadaan yang tertentu. Beberapa norma sosial yang diterima oleh kebanyakan masyarakat adalah larangan terhadap pembunuhan, pencurian dan perampokan. Tanpa norma sosial kehidupan manusia akan terganggu dan masyarakat menjadi kacau-balau.⁴⁵

Untuk dapat membedakan kekuatan yang mengikat norma-norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu:

- a. Cara (*Usage*): lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadap tindakan adalah yang mengakibatkan hukuman berat akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya,
- b. Kebiasaan (*Folkways*): mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua, kebiasaan menghormati orang yang lebih tua merupakan suatu kebiasaan oleh masyarakat dan setiap orang menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut.

⁴⁵Bandingkan dengan J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed), Sosiologi, 2004, 47.

- c. Tata Kelakuan (*Mores*): mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilakukan sebagai alat pengawal, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan di suatu pihak memaksakan suatu perbuatan dan ajaran anggota masyarakat yang menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.
- d. Adat istiadat atau tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan kekuatan mengikat menjadi custom atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat adalah mendapat sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami-istri. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tapi seluruh keluarga, bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya besar. Karena nilai adalah suatu bagian yang terpenting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah apabila secara moral dapat diterima dan dipakati dalam masyarakat.⁴⁶

Pasca konflik benturan antar kelompok, etnis, suku dan agama di Tobelo meskipun sangat sukar di persatukan, tetapi ternyata di beberapa komunitas lain perbedaan yang ada tidak selalu berbuntut dengan konflik yang terbuka, karena masing-masing kelompok sosial menyadari tentang dampak konflik berkepanjangan selalu menimbulkan kerugian dan hubungan sosialnya dapat terganggu dan tidak harmoni dalam masyarakat khususnya antar umat beragama di Tobelo.

⁴⁶Lihat J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* h. 55.

Retaknya kohesi sosial atau ashabiyah dalam masyarakat Tobelo adalah keretakan sistem kekeluargaan, nilai gotong royong, dan kerukunan agama pasca konflik demikian pula dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk menciptakan harmonisasi atau kohesi sosial dapat menggunakan perspektif Ibn Khaldun dalam konsep mengenai Ashabiyah atau solidaritas sosial, kemudian dikembangkan oleh Akbar S Ahmed, berkaitan dengan harmonisasi dapat terjalin dikalangan umat beragama di Tobelo. Faktor budaya, agama, ekonomi dan politik, ada pula faktor lain yang tak kalah pentingnya terjadi kohesi sosial seperti globalisasi, urbanisasi/transmigrasi yang masif, perubahan demografis, modernisasi, mismanajemen pemerintah, kesenjangan miskin kaya, ledakan dan penyebaran penduduk yang cepat, mewabahnya korupsi dll. Pasca konflik terjadi perubahan sikap, pemikiran dan karakter masyarakat yang fundamental, ingin bersaing untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial politik maupun pembangunan di berbagai sektor, perubahan yang terjadi pada fase pasca konflik sangat signifikan. Kondisi ini membuat masyarakat lebih kompetitif, progresif, dan ber peradaban dalam perspektif Ibn Khaldun sebagai masyarakat ramah, penuh solidaritas antar golongan (ashabiyah).⁴⁷ Ashabiyah berasal dari kata ashabat yang berarti mengingat. Secara fungsional ashabiyah menunjukkan pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁴⁸

Terjadi pemberontakan atas kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat kecil dan terjadinya perebutan kekuasaan pada elit politik lokal maupun nasional, kemajuan di

⁴⁷Ashabiyah (Solidaritas sosial); Terjadinya watak peradaban dan berimbang pada kebohongan atau pertentangan kepentingan disebabkan beberapa faktor: 1 Semangat terlibat (tasyayyu) Kepada pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab, 2 Terlalu percaya kepada orang-orang yang menukilkan tergantung pada; *ta'dil* dan *tarjih*, 3. Tidak mampu memahami maksud yang sebenarnya, 4 Asumsi yang tidak beralasan terhadap kebenaran sesuatu, 5 Mengetahui kondisi sesuai dengan realitas yang sebenarnya, 6 Harus memberikan penilaian secara obyektif kepada pemimpin atau penguasa tentang kejujuran. Kebaikan dan keburukan dll. Lihat Ibn Khaldun: *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 57-59

⁴⁸ Jhon L. Esposito (ed). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern* (Jilid I, Bandung: Mizan, 2001), h. 198

bidang ilmu pengetahuan sesuai peradaban manusia itu sendiri. Seorang membangun hubungan baik dengan pemimpin atau raja harus menjaga pergaulan atau solidaritas sosial dapat terjadi atau usaha yang dapat mempertahankan atau memenangkan, hanya dapat dicapai dengan bantuan keturunan secara umum, karena hubungan darah dan kaum kerabat dapat membantu, sementara orang luar dan orang asing tidak, hubungan secara kekeluargaan adalah sesuatu yang alami tetapi sesuatu yang khayali.⁴⁹ Lebih lanjutnya menurut Ibn Khaldun *ashabiyah* merupakan unsur penting dalam membangun negara atau daerah.⁵⁰ Tanpa negara akan mudah runtuh karena tidak memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat, untuk saling kerjasama, membangun sikap saling pengertian, dan bahu-membahu mempertahankan keutuhan negara. Maka dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan dan mengancam eksistensi negara maka negara harus hadir dan tegas dalam menyelesaikan masalah konflik demi kepentingan masyarakat untuk hidup rukun, aman dan damai. *Ashabiyah* merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan, demikian pula dapat melahirkan persatuan dan kesatuan umat.

D. Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan

Term kerukunan berasal dari kata rukun berarti damai, tidak bertengkar atau bersatu. Jadi yang di maksud dengan kerukunan adalah hidup secara berdampingan atau berdamai antara satu dengan yang lainnya, terutama menyangkut kehidupan masyarakat maupun agama yaitu saling menghargai dan menghormati antara sesama pemeluk agama. Secara

⁴⁹ Ibn Khaldun: *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h.223

⁵⁰ Nurul Huda, *Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ashabiyah* (Jurnal " SUHUF ", Vol. 20, .No. I, Mei 2008), h. 41-45.

etimologi kata kerukunan berasal dari bahasa arab “rukun” berarti tiang, dasar, sila. Jamak rukun (rukun) adalah “*arkaan*” artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri berbagai unsur, dari kata arkaan dapat di peroleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan yang setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak dapat berfungsi.⁵¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rukun sebagai berikut : rukun (nomina) (a). Sesuatu yang harus di penuhi saling suatu kerja, seperti : tidak sahnya suatu sembahyang (ibadah) yang tidak cukup saran dan rukunya.(b). Azas berarti dasar sendi semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya misalnya rukun Islam : tiang utama dalam agama islam dan rukun iman atau dasar kepercayaan dalam agama islam.⁵² Rukun berarti a). baik dan damai, tidak bertentangan : hendaknya hidup rukun dengan tetangga. b). bersatu hati, bersepakat : penduduk kampung itu rukun sekali, merukunkan berarti : hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup bersama.⁵³ Secara terminologi dapat dikatakan kerukunan hidup beragama adalah hidup rukun dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati serta bersepakat antara umat yang berbeda agamanya.

Kerukunan hakiki merupakan, kerukunan yang di dorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakiki adalah kerukunan murni, mempunyai nilai dan harga yang tinggi serta bebas dari segala pengaruh dan hipokrisi.⁵⁴ sedangkan kerukunan sementara dan kerukunan politis hanya bersifat semu karena berdasarkan situasi atau peristiwa dan akan berakhir dengan sendirinya ketika peristiwa itu

⁵¹Pengertian kerukunan berasal dari kata “rukun” juga berarti: tiang , penopang atau sandaran. Lihat A.W Munawir, *Kamus Al-Munawar Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif,1997), h.529

⁵²Lihat DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.757

⁵³Lihat Tanja, *Anatomi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia: Sebuah, Tinjauan Sosial Budaya* . Dalam W.Siring, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa* (Jakarta :BPK GM, 2002), h.41-42.

⁵⁴Lihat Said Agil Husen Al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 5.

dianggap selesai atau aman. Dengan demikian kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Jadi pada intinya urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan.⁵⁵

2. Konsep Toleransi Beragama

Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu, berasal dari kata *tolerare* lalu diadopsi ke dalam bahasa inggris *totolerate* mengizinkan atau memperkenankan.⁵⁶ Dalam bahasa arab disebut dengan *tasamuh* berasal dari kata *samaha*, yang berarti kemudahan dan ketentraman. Dalam kamus Bahasa Indonesia berarti bersifat atau bersikap menghargai, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda bertentangan dengan pendapat sendiri.⁵⁷ Secara terminologi toleransi adalah mengakui dan menghormati keyakinan atau perbuatan orang lain tanpa harus menyetujui.

Bila dilihat dari beberapa kutipan yang telah disebutkan diatas, dapatlah dipahami bahwa toleransi itu memiliki kaitannya dengan agama, karena kata “Kepercayaan”, “Keyakinan” dan “aliran” seperti yang diungkapkan dalam kutipan tersebut, jelas menunjukan kepada agama. Justru itu, toleransi yang dimaksudkan disini adalah toleransi beragama. Jadi dapat dikatakan bahwa toleransi mengajarkan agar manusia memiliki sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas faham, pandai menahan diri, bertenggang rasa, menjauhkan cara kekerasan, tidak memaksakan kehendak (pendapat) sendiri,

⁵⁵Lihat Said Agil Husen Al Munawar, h . 5-6.

⁵⁶Webster's new Twen tictth centure of the english language (unabridged ded: tt Willian Collins), inc tth, h. 19.

⁵⁷Abu Hasan, Ibn Faris, Ibn Zakariyah, *Mujam Magayis Fil al-lughah*, Jilid III (tt. Mustafa al-Baby Al-Halaby, 139 H /1971 M) h.65.

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Dari sifat-sifat atau perilaku ini, dalam bahasa arab disebut dengan *Tasamuh*.⁵⁸

Istilah toleransi beragama bisa berarti kesediaan hidup berdampingan antara pemeluk agama yang berbeda sekaligus saling bekerja sama dalam masalah sosial kemasyarakatan, dan tidak dimaksudkan sebagai penerapan percampuran akidah dalam agama. Terkait dengan itu, Umar Hasyim mengatakan bahwa toleransi merupakan pemberian pembebasan kepada semua manusia atau warga masyarakat dalam menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama mereka tidak melanggar syarat-syarat terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.⁵⁹ Bertolak dari pernyataan ini, maka konsekuensi dengan adanya toleransi adalah terciptanya ketertiban dan perdamaian. Dengan begitu, maka semua penganut agama dapat dengan bebas menjalankan agamanya dengan tenang, tanpa ada gangguan dari pihak lain.

3. Doktrin tentang Toleransi Antarumat Beragama

Bila dilihat tujuan pokok toleransi yaitu kerukunan hidup di antara manusia, maka tujuan tersebut merupakan tujuan utama dari misi agama-agama di muka bumi ini, karena semua agama mengajarkan cinta damai dengan sesama manusia. Dalam doktrin kenegaraan Republik Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan falsafah ideologi bangsa. Atas dasar Pancasila inilah, diciptakan adanya toleransi agama, dan terbukti dengan dicantumkannya sila pertama dari Pancasila, yakni “ Ketuhanan Yang Maha Esa “. ⁶⁰ Praktis bahwa semua agama di Indonesia menganut sistem “ Ketuhanan Yang Maha Esa “, termasuk agama Kristen adalah agama yang

⁵⁸Lihat Abu Hasan Ibn Faris Ibn zakariyah, *Mu'jam Maqayis f' al-Lughah* jilid III (t.t.: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1971 M.), h. 65.

⁵⁹Lihat Umar Hasyim, *Toleransi dan Kerukunan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya : Bina Ilmu, 1979), h.22.

⁶⁰Victor I. Tanja, *Pluralisme agama dan problema social: Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998), h. 14.

berketuhanan Esa, bukan berketuhanan tiga (*Trinitas*),⁶¹ Dan agama-agama selainnya tersebut yang ada di Indonesia ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam perspektif teologis Tuhan bukanlah fakta objektif eksternal, melainkan pencerahan yang secara esensial bersifat personal dan objektif dan meyakini esensi Tuhan dengan apa adanya. Tak ada gunanya mendefinisikan Tuhan yang mengadakan perubahan ini, karena dia berada di luar kata-kata dan deskripsi. Tuhan merupakan realitas yang tak terbantahkan. Sejak dahulu orang Yunani telah mengembangkan gagasan tentang Tuhan- seperti Trinitas dan Inkarnasi- yang memisahkan mereka dari monoteis lainnya, namun pengalaman mistik aktual mereka memiliki banyak persamaan dengan pengalaman kaum muslim maupun Yahudi.⁶²

Dengan pluralismenya agama di Indonesia, maka doktrin tentang toleransi harus dijabarkan dalam bentuk kerukunan hidup antar setiap umat beragama. Agama Kristen beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui hukum kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam al-Kitab. Sama halnya dengan agama Hindu yang mengajarkan sikap saling menghormati dan saling menghargai keberadaan umat beragama lain. Juga agama Budha mengajarkan kasih sayang antar sesama manusia tanpa mengenal latar belakang agama masing-masing.⁶³

⁶¹Sebagian masyarakat Indonesia terutama kaum muslim, ada yang berpersepsi bahwa agama Kristen tidak menganut sistem "Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena agama ini menganggap ada tiga Tuhan, yakni Alah Bapak, Alah Ibu, dan Alah Roh Kudus. Namun persepsi seperti ini ternyata disanggah oleh para tokoh agama mereka. Dalam hal ini, Prof. Dr. Pendeta Zakaria J. Ngelow mengatakan bahwa: Kristen menganut monoteisme trinitas yang merujuk pada tritunggal ilahi (Bapak, Putra dan Roh Kudus). Jadi Tuhan dalam agama Kristen hanya satu, yakni suatu paham yang menekankan hakekat ketunggalan diri pribadi ilahi. Bisa diumpamakan: Lilin itu satu (tunggal), namun ia trinitas karena mencakup tiga dimensi, yakni (1) batang lilin itu sendiri; (2) api lilin; dan (3) cahaya lilin yang terpancar. Sekiranya batang lilin saja, namun ia tidak ber-api, maka pasti tidak memancarkan cahaya, dan dalam keadaan demikian, lilin tersebut tidak ada artinya. Jadi sekiranya Alah Bapak saja. Dan tidak ada Alah Anak, dan Alah Roh Kudus, maka keesaan Tuhan tidak ada artinya. Uraian lebih lanjut, lihat Zakaria J. Ngelow *Monoteisme Trinitas Keilahian menurut Iman Kristen* "Makalah seminar" Allaudin Makassar, 17 Maret 1998, h. 3-4.

⁶² Karen Armstrong, *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, terj. Zaimul Am, *Sejarah Tuhan Kisah 4.000 Tahun Pencapaian Tuhan dalam Agama-Agama Manusia* (Bandung: Mizan, 2012), h. 342

⁶³Lihat Zakiyah Darajat, *Perbandingan Agama* (Cet. II Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 140-142.

4. Landasan Yuridis dan Normatif Kerukunan Beragama

Landasan kerukunan beragama baik secara yuridis maupun secara normatif. Secara Yuridis tercantum dalam Tap MPR 1978 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mendagri No I Tahun 1969, dan sempurnakan SKB No. 9 dan 8 2006, kemudian dijabarkan pada Trilogi Kerukunan Beragama. Sebagai realisasi TAP MPR ini, pemerintah melalui Departemen Agama memprogramkan tiga bentuk kerukunan:

1. Kerukunan Internumat Beragama
2. Kerukunan Antarumat Beragama
3. Kerukunan Antarumat Beragama dengan pemerintah.

Secara historis kerukunan beragama di Indonesia, pada awalnya kerukunan antarumat beragama atas prakarsa dan program pemerintah, namun tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah. Jadi esensi kerukunan bukanlah pemerintah tapi adalah umat beragama itu sendiri. Dan jika terjadi perselisihan, baik intern suatu agama maupun antarumat beragama, diselesaikan oleh umat beragama itu sendiri dengan pemerintah sebagai Arbiter atau memediasi tokoh-tokoh agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat beragama. Salah satu wadah yang di bentuk oleh pemerintah adalah Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB), yang beranggotakan organisasi induk keagamaan masing-masing agama. Departemen Agama sendiri membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).⁶⁴

Mewujudkan kerukunan antarumat beragama maka diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama, yaitu: a).Adanya beberapa subjek sebagai unsur utama. B).Tiap subjek berpegang kepada agama masing-masing. 3).Tiap subyek menyatakan diri sebagai

⁶⁴H. Tarmidzi Taher, " *Globalisasi Kerukunan*" dalam Menteri Agama Biografi Sosial Politik (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998), h. 422

partner terhadap subyek lain.⁶⁵ Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka kerukunan antarumat beragama bertujuan untuk:

1. Memelihara eksistensi agama-agama itu sendiri.
2. Memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945
3. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan.
4. Memelihara stabilitas dan ketahanan nasional
5. Membendung dan mengikis paham sekularisme dan atheisme
6. Menunjang dan mensukseskan pembangunan
7. Mewujudkan masyarakat religious (agamawan)

Mengingat urgensi kerukunan dalam memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, maka MPR dalam sidangnya tahun 1978 memutuskan dengan Ketetapan Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV bidang agama angka 1 huruf b: Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, diantar sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Landasan kerukunan beragaman secara normatif al-Qur'an memberikan isyarat, dan petunjuk (QS.Al-Kafirun/109: 6) " *Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku*", dan tidak ada paksaan dalam agama (*La ikraha fiddini*), isyarat ayat ini menunjukkan saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama serta saling toleran dan perbedaan dalam menjalankan agama masing-masing penganut agama. Sehingga dapat bergaul dan

⁶⁵Lihat Kerangan lengkap, Said Agil Husen Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 7, 25.

saling menghargai antara satu dengan lain meskipun berbeda agama dan tanpa ada unsur paksaan dalam beragama, seperti ditegaskan (QS.Al-Kafirun/109: 6).

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.⁶⁶

Dalam perspektif agama Kristen kerukunan agama dapat terlihat dalam kitab Mazmur 133: 1 di katakan "sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ", dan dalam Injil surat Roma 12:9-10 disebutkan " (9) Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.(10) Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat).⁶⁷, hal ini dimaksudkan hidup sesama manusia, bertetangga, bersaudara harus rukun dan damai sekali pun berbeda agama. karena semua manusia berasal dari ciptaan Tuhan. Demikian juga dalam al'Qur-an (QS.Al-Hujurat/49 :13) disebutkan bahwa manusia di ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai, secara normatif, Islam telah memberikan landasan teologis untuk melahirkan sikap hidup yang toleran inklusif, dan menghargai pluralitas.⁶⁸ Sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁹

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* Fitrah Rabbani, h.603.

⁶⁷Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB dan Terjemahan Baru (TB)* Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003), h.. 194

⁶⁸Lihat M. Deden Ridwan, Dalam Kasman Hi. Ahmad, *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleran* (Ternate: UMMU Pres. 2004), h. 96 -97.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* Fitrah Rabbani, h.517

Ayat-ayat yang dikemukakan di atas menunjukkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, yang didasarkan pada pluralisme keagamaan yang harmonis. Kerukunan umat beragama bukan berarti merelativir agama-agama dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam proses sosial kemasyarakatan. Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan.

Arnold Toybee, sejarawan Inggris (1889-1775) secara gamblang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat menyatakan dengan pasti bahwa sebuah agama lebih baik dari agama lain. Demikian juga nada serupa di sampaikan oleh Ramak Krishna (1836 – 1886) pemuka agama mengajak Hindu yang kepada kesatuan agama-agama dunia, yang menerangkan bahwa pada dasarnya agama-agama tidak lain hanyalah jalan-jalan menuju tujuan yang sama, yaitu Tuhan.⁷⁰

5. Teologi Kerukunan Beragama.

Problem teologis yang paling mendasar dalam kehidupan beragama yang sedang dihadapi, adalah bagaimana seorang penganut agama bisa mendefinisikan dirinya ditengah agama-agama lain. Atau dalam istilah teologi kontemporer bagaimana agama bisa berteologi dalam konteks agama-agama.⁷¹ Dalam pergaulan antar beragama, semakin dirasakan intensnya pertemuan agama-agama itu-walaupun disadari pertemuan itu kurang diisi dengan dialog antar iman.

⁷⁰Lihat Alwi Sihab, *Islam Inklusif*, h. 45.

⁷¹Lihat Budi Munawar-Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, cet I. (Jakarta Paramadinah, 2001) h.IX.

Athur J.D. Adamo, menyebut *religions way of knowin*, sebagai akar dari konflik antar umat beragama yang berawal dari sebuah standar agamanya sendiri yaitu kitab suci sebagai sumber kebenaran yang diyakini : (1) bersifat konsisten dan berisi kebenaran yang tanpa kesalahan sama sekali. (2) .bersifat lengkap dan final dan tidak di perlukan kebenaran dari agama lain. (3). Kebenaran agamanya sendiri merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan. (4). Seluruh kebenaran itu di yakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia.

Sisi lain toleransi beragama merupakan suatu tuntutan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Olaf Scehman, toleransi beragama bukan di kedepankan pada saat struktur-masyarakat berada dalam situasi yang kritis, tetapi harus di letakkan pada kondisi stabil.⁷² Konsep keabsahan dalam toleransi agama berakar pada kondisi antropologis yang memberi kebebasan kepada manusia sejumlah kebebasan dasar atau otonomi sebagai individu dan masyarakat. simbol-simbol agama tidak nampak ke permukaan sebagai konsekuensi dari kerukunan hidup berdampingan dan damai dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan beragama adalah persoalan sosial ekonomi, politik, budaya , ras dan agama. Seringkali agama dipakai sebagai alat kekuasaan. Faktor yang lain adalah bagaimana pemeluk agama memahami ajaran agamanya dalam hubungannya dengan agama lain. Kekerasan dalam bentuk kerusuhan antar kelompok mengatasnamakan agama seringkali melibatkan prasangka kepada pemeluk agama lain. Misalnya, banyak kekerasan antar kelompok dipicu oleh sesuatu yang tidak ada urusan dengan agama namun pelaku atau korban adalah pemeluk agama tertentu. Karena adanya prasangka agama, pemeluk agama tersebut merasa wajib untuk menghalalkan tindak kekerasan terhadap pemeluk agama lain.

⁷²Olaf Schuman, *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2004), h. 42.

6. Prularitas Agama suatu “Keharusan”

Wacana teologi Islam bahwa mengolah perbedaan adalah rahmat, kemajemukan adalah anugerah dan karena itu pluralitas adalah kemuliaan yang harus dijunjung tinggi. Di bagian terdahulu diuraikan bahwa pluralitas adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan, maka selayaknya setiap orang yang beragama mengakui pluralitas merupakan suatu keharusan (sunatullah).⁷³

Jadi, ditegaskan kembali bahwa pluralisme adalah sebuah aturan Allah yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Itulah sebabnya, Islam adalah agama yang kitab sucinya al-Qur'an itu, dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali agama yang berdasarkan syirik. Memeluk agama Islam, bukan berarti memutlakkan Islam sebagai satu-satunya nama agama. Tidak mustahil orang yang dalam pengakuannya secara formal sebagai pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, ataupun selainnya, namun hakikatnya dia itu ber-Islam, sebagaimana yang terungkap secara tekstual dalam QS. Al-Ma'idah/5:69 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرِيَّةَ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.⁷⁴

Pluralitas keberagamaan adalah sunatullah, akan tetapi pluralisme bukan paham yang meyakini semua agama adalah sama. Pluralisme merupan paham yang secara eksplisit

⁷³Kontroversi terhadap faham pluralisme, dilatarbekangi beberapa presepsi: Pertama, Pluralitas diakui sebagai sunatullah, pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap aqidah . Pengakuan terhadap plura'itas akan melemahkan iman. Kedua, pluralisme dianggap ancaman terhadap identitas, sebab dalam pluralisme, identitas akan lebih kedalam monolitas masyarakat. Dalam pluralitas kebenaran mutlak akan di gantikan kebenaran relatif. Kebenaran tidak lagi tunggal melainkan plural. Pengharaman terhadap paham pluralisme adalah pengertian persamaan terhadap semua agama atau adanya kebenaran semua agama . Kedua pandangan ini ada titik temu pada ide salingpahaman (*ta'ruf*) yang merupakan fondasi dari toleransi. Bandingkan Budhi Munar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. L.

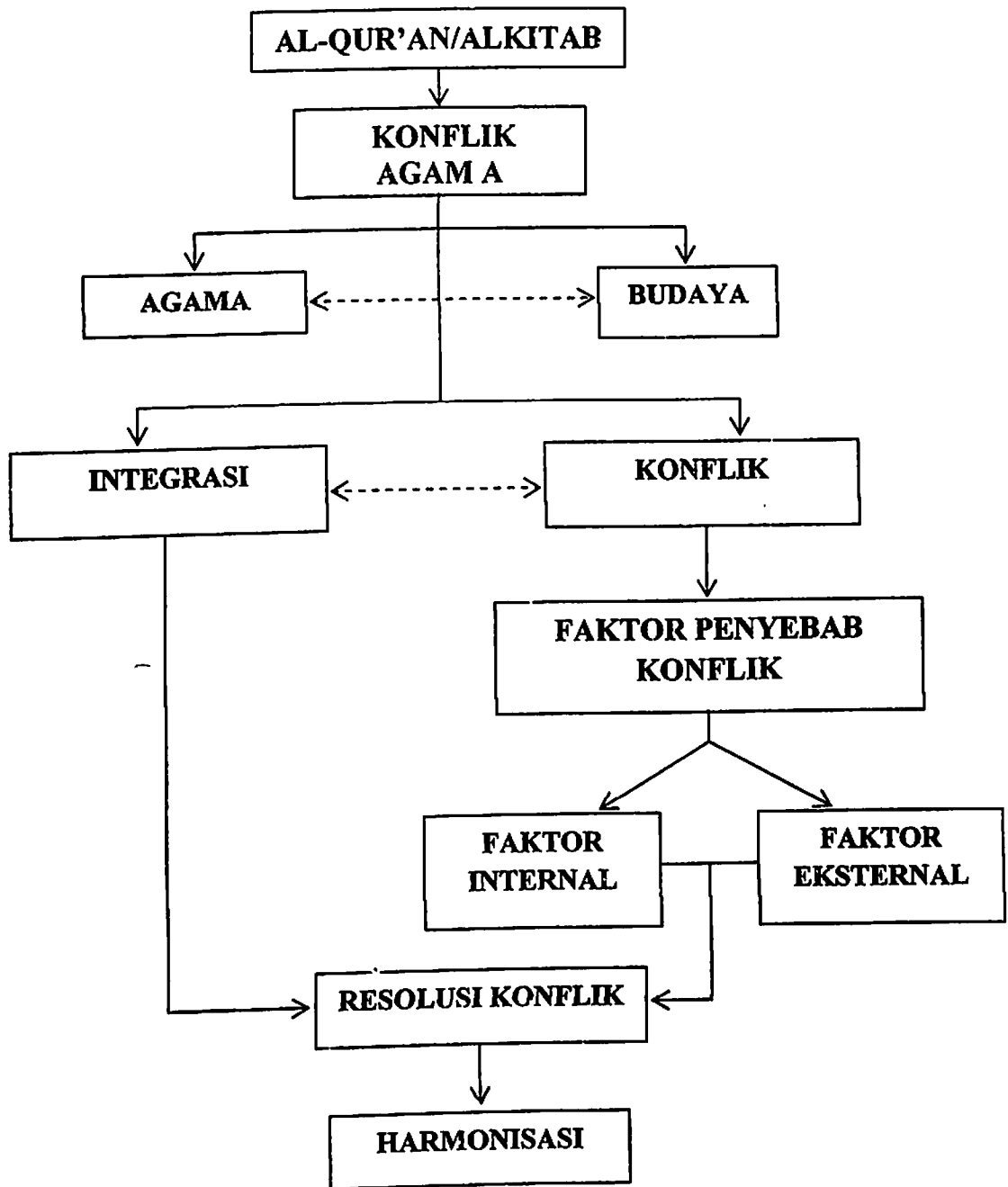
⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* Fitrah Rabbani, h.119

mendorong agar keragaman dijadikan sebagai potensi untuk membangun toleransi. Bahkan lebih dari itu, toleransi yang dikehendaki oleh pluralism adalah toleransi yang berdasarkan pemahaman yang menyeluruh, baik, dan tepat terhadap orang serta saling menghargai antara sesama umat beragama.

Declaration of a Culture of Peace menyebutkan bahwa budaya damai adalah sikap, tindakan, tradisi, dan model perilaku dan cara hidup yang didasarkan pada: 1).Menghargai kehidupan, mengakhiri kekerasan dan mengedepankan tindakan anti kekerasan melalui pendidikan, dialog, dan kerjasama, 2).Penghargaan penuh terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integrasi wilayah, kemerdekaan politik Negara, dan ketiadaan intervensi pada persoalan internal sebuah Negara yang berhubungan dengan piagam PBB dan hukum Internasional, 3).Penghargaan penuh terhadap dan mengedepankan penghargaan terhadap seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar, 4).Komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.⁷⁵

⁷⁵Lihat Lihat Imam Nakha'I, *Figih Pluralitas*, h. 22.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat diskriptif kualitatif, yakni peneliti tidak sekedar mendeskripsikan data-data yang di temukan di lapangan, tetapi berupaya melakukan analisis-kritis terhadap persoalan tersebut untuk menemukan teori baru. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali, memahami, mengkaji, dan menganalisis fenomena penyelesaian konflik Antarumat beragama di Tobelo Halmahera Utara, dengan melihat fenomena dan realitas masyarakat apa adanya sesuai kondisi di lapangan, terkait dengan kerukunan antar umat beragama pasca konflik. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.⁷⁶

Burhan Mungin mengutip beberapa pendapat ahli metodologi tentang penelitian deskriptif.⁷⁷ Menurut Travers, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Galy, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Ia pun memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah dalam penelitian kualitatif

⁷⁶Lihat Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51

⁷⁷Burha Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 31. Lihat juga Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1984), h. 8. Juga Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1980), h. 22-25.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang menekankan pada penggunaan data lapangan. Data yang di peroleh bersumber dari gejala, fenomena dan realitas atau fakta sosial yang di lakukan langsung oleh peneliti dalam situasi apa adanya. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Sedangkan sifat deskriptif berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau sekelompok individu tertentu. Dan mencari korelasi (hubungan) antara dua fariabel atau lebih.⁷⁸

Penelitian kualitatif memberikan interpretasi deskriptif. Verifikasi berupa perluasan, pengembangan tetapi bukan pengulangan. Verifikasi juga bermakna memberikan sumbangan kepada ilmu atau studi lain. Setiap penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Tujuan akhir suatu penelitian adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam penjelasan yang singkat. Dalam penelitian kuantitatif, penjelasan singkat tersebut berbentuk generalisasi, tetapi dalam penelitian kualitatif berbentuk deskripsi tentang hal-hal yang esensial atau pokok.⁷⁹ Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif, sehingga teori merupakan alat yang akan diuji kemudian berdasarkan data dan instrumen peneliti di lapangan.⁸⁰

Dalam pada itu penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang mengarah pada pengungkapan fakta yang ada di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara mengenai Konflik antarumat beragama kemudian menganalisis dengan berbagai pendapat para tokoh agama, adat, tokoh masyarakat dan pemerintah dan fakta sosial lainnya.

⁷⁸Irawan Soekarta, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III.(Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999), h.35.

⁷⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 8.

⁸⁰Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 27

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Tobelo Halmahera Utara sebagai suatu Kabupaten yang pada periode 1999-2001 merupakan wilayah yang pernah dilanda konflik dengan korban jiwa dan harta benda yang cukup signifikan. Oleh karena luasnya area penelitian dan keterbatasan bersifat teknis maka penetapan area penelitian dan informan dilakukan secara purposif. Area penelitian ini di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara merupakan lokasi konsentrasi dan mobilisasi kekuatan dari dua komunitas agama yang dianggap sangat representative.

Objek penelitian semuanya berada di Tobelo, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan wilayah konflik sekalipun kultur masyarakat Tobelo yang kental dengan nilai kearifan lokal. Maka perlu perhatian khusus terhadap daerah ini sebagai wilayah konflik. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini 6 bulan April - September 2018

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Jamali Sahrodi, pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan landasan kajian dalam sebuah studi atau penelitian.⁸¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah menyebut pendekatan sebagai metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar, yang kemudian dipergunakan sebagai sarana analisis.⁸² Sementara itu, Dudung Abdurahman, sebagaimana dikutip Bunyamin, mengatakan bahwa pendekatan

⁸¹Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 64

⁸²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.

pada dasarnya adalah sebuah kerangka metodologi di dalam pengkajian sesuatu bidang ilmu, atau permasalahan inti dari metodologi dalam sesuatu ilmu.⁸³

Menurut Abbudin Nata, disiplin ilmu yang dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami agama adalah teologi normatif, antropologi, sosiologi, filsafat, historis, budaya, dan psikologi.⁸⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian keagamaan adalah bersifat multi disipliner, akan tetapi dalam penelitian disertasi ini digunakan beberapa pendekatan anantara lain :

- i. Teologis yaitu pendekatan ini digunakan untuk melihat sisi persamaan dan perbedaan masing-masing doktrin agama dengan tidak bermaksud memihak pada satu doktrin ajaran agama tertentu, tetapi ingin meletakkan ajaran agama secara universal, dalam perspektif normatif – teologis dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama.⁸⁵ Tapi dalam hal ajaran agama tidak bisa dihindari penekatan filosofis yaitu pendekatan ini digunakan untuk memahami ajaran agama lebih kritis dan rasional dalam melihat dasar-dasar agama yang lebih komprehensif dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami lebih mendalam.⁸⁶
- ii. Sosiologis yaitu pendekatan dengan menggunakan analisis kondisi sosial masyarakat di Tobelo Halmahera Utara yang memiliki motivasi dan semangat ingin berdamai hidup rukun serta toleransi antara satu pemeluk agama dengan

⁸³Bunyamin, *Teknik Interpretasi Historis dalam Penafsiran Al-Qur'an (Implementasi terhadap ayat-ayat jihad)* (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2014), h. 30

⁸⁴Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 28-51.

⁸⁵Lihat H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 28,46.

⁸⁶Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran . lihat Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat dan Metodologi Penelitian*,(Jakarta: CV ANDI OFFSET, 2007), h. 20.

pemeluk yang lainnya saling berdampingan dalam masyarakat.⁸⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk melihat suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses perdamaian.

- iii. Pendekatan antropologis adalah upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia, sekaligus berupaya menjelaskan dan memberi jawaban,⁸⁸ sehingga agama menjadi fungsional dalam kehidupan manusia.
- iv. Pendekatan Fenomenologis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasar fenomena keagamaan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam perilaku dan hubungan masyarakat dalam kehidupan antara umat beragama pasca konflik di Tobelo Maluku Utara. Pendekatan fenomenologis ini berupaya menangkap esensi agama lebih mendalam dan memahami melalui penyelidikan atas penampakan dan manifestasi atau realitas keagamaan yang ada dalam masyarakat.⁸⁹ Dimana objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang di peroleh dari sumber pertama, dalam hal ini institusi pemerintahan dan institusi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat,

⁸⁷Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lain yang saling berkaitan, Lihat Abuddin Nata, h. 39.

⁸⁸Lihat H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 35.

⁸⁹Pendekatan fenomenologis pada awal merupakan upaya membangaun suatu metodologi yang koheren bagi studi Agama belakangan dapat digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu humaniara dan sosial lainnya. Dasar Pendekatan fenomenologi merujuk pada bangunan filsafat Hegel d dalam karya sangat berpengaruh *The Phenomenology of Spirit* (1806), Hegel membangun tesis bahwa esensi (*wesen*) dipahami melalui penyelidikan atas penampakan dan manifestasi (*Erschinugnen*). Jadi tugas fenomenolog adalah menunjukkan bahwa agama perlu di kaji secara serius dan memberi kontribusi terhadap pemahaman kita tentang humanitas dengan cara yang positif. Lihat Peter Connolly . h, 107.

tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik sebagai sumber informan. Data sekunder ialah data yang di peroleh dari berbagai keterangan atau buku-buku, majalah, brosur, buletin, surat kabar dan sejenisnya serta laporan tertulis yang ada hubungan dengan masalah yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan sesuai dengan objek penelitian yang teliti, maka teknik pengumpulan data yang di lakukan :

1. Observasi

Teknik ini dilakukan untuk pengamatan secara langsung dikehidupan masyarakat dan sikap keberagamaan masing-masing pemeluk agama, serta institusi keagamaan yang memungkinkan tercipta potensi kerukunan beragama dan penerapan konsep kerukunan pasca konflik, baik secara internal maupun secara eksternal. Observasi langsung di lakukan di Kecamatan Tobelo Halmahera Utara.

2. Interviu (wawancara)

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data yang terkait dengan objek penelitian yang akan di teliti.⁹⁰ Pola ini di lakukan untuk mewawancarai masyarakat yang terlibat langsung dalam kerusuhan atau konflik, dan para tokoh masyarakat, agama, adat serta pihak yang berkompetensi termasuk pemerintah untuk memperoleh informasi dan data tentang faktor-faktor pemicu kerusuhan, serta solusi. Penyelesaian konflik yang terjadi dan dampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang berada dalam wilayah penelitian.⁹¹ Penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap beberapa responden yang terkait dalam penelitian ini dengan menggunakan pola

⁹⁰Lihat Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2015, h. 89

⁹¹Teknik pengumpulan data, lihat Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, (Cet 18, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

kay informan atau informan kunci antara lain, tokoh, agama Islam-Kristen, Pemerintah, tokoh adat, organisasi keagamaan dan masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk dapat mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen baik yang bersifat primer maupun sekunder, dokumen berupa catatan peristiwa, arsip laporan yang di perlukan untuk melengkapi data dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam meneliti objek yang telah ditetapkan . Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, untuk memperoleh data lapangan yang akurat dan mendalam, maka peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi, kamera, alat perekam dan buku catatan.

Penelitian ini terfokus di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, yang menjadi fokus penelitian disertasi ini adalah analisis deskriptif terhadap kerukunan antarumat beragama pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara, yaitu mengenai harmonisasi antar umat beragama pasca konflik. Adapun yang menjadi kajian utama dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok bahasan yaitu: Konsep kerukunan antarumat beragama pasca konflik, hubungan antar umat beragama berbasis budaya lokal di Tobelo Halmahera Utara., dan Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama di Tobelo Halmahera Utara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian dan verifikasi data. Reduksi data adalah teknik pengolahan data melalui pengurangan atau penyederhanaan. Penyajian data dengan wujud kesimpulan data atau informasi yang telah tersusun rapi sehingga dapat lebih mudah di tangkap maknanya dan dapat di sajikan dalam bentuk yang

mudah di pahami. Verifikasi data adalah cara mengolah data dengan memeriksa kembali data yang ada, apakah sudah benarkah dan relevansi dengan permasalahan yang di teliti.

Analisis data dalam penelitian ini akan di lakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk menggambarkan secara faktual dan akurat tentang potensi dan pelaksanaan pembinaan kerukunan beragama di Tobelo Halmahera Utara secara general. Proses analisa data di lakukan dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-terus menerus sepanjang penelitian di lokasi sehingga peneliti selesai dari lokasi penelitian. Keabsahan dalam penelitian ini melalui tiga teknik sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :⁹²

1. Teknik menyamakan makna. Yaitu kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara konsep atau variabel serta membuat benang merah dari beberapa konsep.
2. Teknik menguji dan memastikan temuan. Yaitu memeriksa makna dari temuan penelitian dan mendapatkan umpan balik dari informan.
3. Teknik dokumenstasi dan pemeriksaan data atau informan. Yaitu melakukan verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan memperjelas prosedur data dan temuan yang diperoleh.

⁹² Mukhtar, Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif (Jakarta Selatan: Referensi, 2013), h. 139-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Tobelo adalah Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari sekitar 216 pulau dan sebagian besar terletak di Pulau Halmahera. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara setelah pemekaran Kabupaten Pulau Morotai (UU No.53/2008) adalah 22.507,32 km² yang meliputi luas daratan 4.951,61 km² (22%) dan lautan 17.555,71 km² (78%) terletak antara 1⁰57¹ LU – 3⁰00¹ LU dan 127⁰17¹ BT – 129⁰08¹ BT. Kabupaten Halmahera Utara terletak dikawasan Timur Indonesia, tepatnya berbatasan dengan:

- a. Samudera Pasifik dan Kab. Pulau Morotai di sebelah utara.
- b. Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera di sebelah timur.
- c. Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan.
- d. Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat di sebelah barat.

Ibukota Kecamatan yang terjauh dari pusat pemerintahan adalah Dama yang merupakan ibukota Kecamatan Loloda Kepulauan dan harus dijangkau menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibukota kabupaten Halmahera Utara) sekitar 8 jam perjalanan.

Dari Sudut Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara terbentuk sejak tahun 2003 merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Maluku Utara (UU No.53/2008). Pada awal terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 9 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 179 Desa, kemudian pada tahun 2009, Kab. Halmahera Utara mekar menjadi dua

kabupaten, yaitu Halmahera Utara dan Pulau Morotai . Pada saat pemekaran, Kab. Halmahera Utara memiliki 17 kecamatan dan 196 desa definitif sementara Kab. pulau Morotai memiliki 5 kecamatan dan 64 desa defenitif. Komposisi. Keanggotaan DPRD Kab. Halmahera Hasil pemelihan anggota legislative tahun 2009 yaitu terdiri dari PDS sebanyak 3 orang Partai Golkar sebanyak 5 orang, PDI-P sebanyak 3 orang. PKS sebanyak 2 orang. PPP sebanyak 1 orang, Demokrat sebanyak 2 orang, Gerindra sebanyak 1orang, Patriok sebanyak 1 orang. Pelopor 1 orang, PBB sebanyak 3 orang.⁹³

Tobelo adalah sebuah Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari enan (6) kecamatan yaitu; kecamatan Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tabela Selatan, Kec Tobelo Timur, Tobelo Barat, dan Tobelo merupakan ibu kota pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Secara geografis Tobelo berada di daratan semenanjung pesisir Jazirah Halmahera Utara. secara astronomis berada pada posisi 1,28-1,47 Lintang Utara dan 127,46 sampai dengan 128,08 Bujur Timur. Luas daratan Kota Tobelo adalah 204,30 km². Adapun batas Wilayah Kecamatan Tobelo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tebelo Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebelo Tengah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Halbar

⁹³ Sumber : BPS. Halmahera Utara dalam angka 2017, h.20

Luas Wilayah Tobelo Halmahera Utara menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah km ²	%
1	Tobelo	33,0	4.082
2	Tobelo Tengah	56,0	6.93
3	Tobelo Utara	100,40	12,42
4	Tobelo Selatan	204,30	25.27
5	Tobelo Timur	120,0	14.85
6	Tobelo Barat	294,70	36.45
Luas		808,4	100,00

Sumber : BPS Halmahera Utara, 2017 /2018

Data tersebut diatas menunjukkan penyebaran Orang-orang Tobelo tersebar disepanjang pantai timur pesisir Halmahera Utara, mulai dari teluk Kao sampai Loloda dan pulau Morotai, bercampur dengan antara suku serumpun yang mirip adat istiadat dan sistem hukum adatnya, yaitu Galela. Orang-orang Tobelo jika menyebut nama sukunya biasanya menyambungkan nama sukunya dengan Galela. Sehingga mereka mengidentikan dirinya dengan menyebut nama sukunya dengan Tobelo-Galela. Demikian juga orang-orang Galela mengidentifikasi dirinya dengan menyebut nama sukunya dengan Galela-Tobelo. Sub-sub suku lainnya seperti Loloda merupakan asimilasi suku Tobelo Galela, bahasa yang digunakan juga merupakan gabungan kosa kata Galela-Tobelo. Demikian pula untuk sub suku Modole, Pagu, Boeng juga menggunakan bahasa Tobelo. Kesemuanya suku dan sub suku itu berada didaerah Halmahera Utara.

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari sekitar 216 pulau dan sebagian besar terletak dipulau Halmahera dan pulau Morotai. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 24.983,32 km² yang terletak antara 1 0 57 1 LU – 3 0 00 1 LS

dan 127 0 17 0 BT - 129 0 08 0 BT. Kabupaten Halmahera Utara terletak dikawasan Timur Indonesia. Kabupaten Halmahera Utara berada ditepi pantai atau mempunyai batas pantai. Kabupaten ini merupakan daerah kepulauan dengan ciri iklim troisdengan curah hujan rata-rata 1000-2000 mm per tahun. Daerah ini mengenal dua musim yaitu musim utara atau musim barat dan musim selatan atau musim timur yang disusul dengan dua musim peralihan. Dari peta curah hujan, daerah Halmahera Utara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- Daerah curah hujan tahunan 1500-2000 mm per tahun yang meliputi daerah Halmahera Utara bagian Utara yaitu Pulau Morotai, bagian selatan kecamatan Tobelo, Kao, Malifut Timur, Daerah teluk Kao sampai barat dan Loloda Utara. Curah hujan tertinggi pada bulan Mei dan terendah pada bulan Oktober. Sedangkan bulan Agustus, September, dan Oktober adalah bulan kering.
- Daerah curah hujan tahunan 2000-2500 mm per tahun meliputi Halmahera Utara secara keseluruhan. Curah hujan tertinggi pada bulan Mei dan terendah pada bulan Agustus, sedangkan bulan kering tidak ada atau jarang ada.
- Daerah curah hujan tahunan 2500-3000 mm per tahun yang meliputi Halmahera Utara secara menyeluruh. Pulau halmahera bagian Utara dan kecil sebarannya hanya meliputi Kecamatan Galela dan Loloda Utara. Curah hujan tertinggi pada bulan Mei terendah pada bulan September, sedangkan bulan kering tidak ada atau jarang ada.

Menurut Klasifikasi dari Schmidt FA dan JHA Ferguson (1951) bahwa daerah Halmahera beriklim tipe A dan B. Sedangkan menurut Daro Koppen bahwa daerah Halmahera Utara bertipe A. Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah yang masih alami dan banyak menyimpang kekayaan alam seperti emas, biji besi, batu bara, batu kapur dan bahan galian lainnya, akan tetapi baru sedikit yang sudah dikelola atau dikembangkan. Salah satu perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi adalah PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) yang mengelolah pertambangan emas di daerah Gosowon-Kao.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi sebagai pengelola sumber daya alam. Namun penduduk yang besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam proses pembangunan itu sendiri seperti pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Bila potensi itu sendiri tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius maka hal ini juga memicu terjadinya konflik dalam masyarakat dan mengganggu kehidupan dan harmonisasi kerukunan antar umat beragama . Menurut data statistik

Penduduk Tobelo pada tahun 2017 berjumlah 13.916 jiwa yang rinciannya sebagai berikut.:

Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	L	P	Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Tobelo	16.714	15.879	32.593	105,26
2	Tobelo Utara	5.419	5.359	10.777	101,12
3	Tobelo Selatan	7.387	7.096	14.483	104,10
4	Tobelo Barat	2.487	2.348	4.835	105,92
5	Tobelo Tengah	7.00	6.915	13.916	101,24
6.	Tobelo Timur	5.419	5.359	6.971	110,86
Jumlah		42.673	40.876	83.575	628,5

Sumber : BPS Halmahera Utara Dalam Angka 2017

3. Keadaan Umat Beragama

Komposisi pemeluk agama di Halmahera Utara menunjukkan bahwa penduduk mayoritas penganut agama Kristen mayoritas, menurut sumber data BPS. Halmahera Utara tahun 2017, bahwa jumlah pemeluk Islam 64617, Kristen 99496, Kristen Katolik 1517 jiwa, Budha.32, Hindu.22, lainnya 8 dari jumlah keseluruhan penduduk Halmahera Utara 165479. Sedangkan di Kota Tobelo Jumlah umat Islam 10122, Kristen 18817, Katolik 1064, Hindu 21, Budha 11, Lainnya 1 Jumlah keseluruhan 30036. (Sumber: BPS Halmahera Utara dalam angka 2017).

Sarana Rumah Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Masjid	Gereja	Vihara	Pura
1	Malifut	16	8	-	-
2	Kao	5	11	-	-
3	Kao Utara	1	35	-	-
4	Kao Barat	20	17	-	-
5	Kao Teluk	9	8	-	-
6	Tobelo	15	55	-	-
7	Tobelo Tengah	-	31	-	-
8	Tobelo Utara	9	11	-	-
9	Tobelo Selatan	2	25	-	-
10	Tobelo Timur	-	15	-	-
11	Tobelo Barat	6	21	-	-
12	Galela	7	8	-	-
13	Galela Utara	10	26	-	-
14	Galela Selatan	9	10	-	-
16	Galela Barat	5	21	-	-
17	Loloda Utara	6	25	-	-
18	Loloda Kepulauan	11	6	-	-
19	Jumlah	170	330	0	0

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara 2017/2018

Jumlah tempat ibadah dan pemeluk agama tersebut diatas tersebar di 17 Kecamatan, diantaranya, Kec. Tobelo, Tobelo Utara, Kec.Tobelo Selatan, Kec.Tengah Tengah, Tobelo Utara dan Tobelo Timur. Hubungan sosial kemasyarakatan antar warga baik Islam maupun Kristen sangat harmonis dan femiler serta penuh dengan kekerabatan yang sudah terbelihara sejak dahulu kala. Konflik antara warga yang berbeda agama, Selain diantara mereka ada hubungan darah (Islam dan Kristen), hubungan antar masyarakat yang harmonis ini juga telah

ditunjukkan oleh pola kekerabatan sejak dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Tobelo sangat pluralitas dan keragaman beragama dalam masyarakat. Berdasar pengamatan penulis kondisi umat beragama pasca rusuh hingga saat ini dianggap aman dan terkendali dalam menciptakan kerukunan beragama dalam masyarakat Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya.

Berdasarkan laporan Gubernur provinsi maluku utara bahwa, jumlah kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak baik Islam maupun Kristen cukup besar seperti gereja, mesjid dan ribuan rumah yang telah terbakar, kerugian yang paling besar adalah berkenaan dengan penderitaan manusia jumlah pengungsi saat itu berkisar 75000 terus berdatangan menuju ternate dan pengungsi kelompok Kristen kebanyakan menuju bitung (Sulawesi Utara) dan daerah lainya. Dibawah ini dapat dilihat jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan sosial yang digambarkan dalam data-data sebagai berikut :

No	Urain Kerugian Akibat Konflik	Jumlah Korban		Keterangan
		KK	Jiwa	
1	Pengungsi Maluku Utara Tahun 2000			
	1. Kabupaten Maluku Utara	17.863	76.844	
	2. Kabupaten Halmahera Tengah	4.819	21.352	
	3. Kota Ternate	20.126	99,131	
	Total	42.126	197.327	
2	Korban Manusia			
	a. Luka Ringan		764	Orang
	b. Luka Berat		1.000	Orang
	c. Meninggal Dunia		2.083	Orang
3	Rumah Penduduk yang Terbakar	18.022		Rumah
4	Tempat Ibadah yang Rusak/Terbakar			
	a. Mesjid		97	Buah
	b. Gereja		106	Buah
5	Sekolah yang Rusak/Terbakar			
	a. TK		6	Buah

	b. SD	93	Buah
	c. SLTP	7	Buah
	d. SLTA	3	Buah
6	Perkantoran yang Rusak/Terbakar		
	a. Kantor Camat	2	Buah
	b. Kantor Desa	33	Buah
	c. Kantor Kesehatan	4	Buah
	d. Kantor Koramil/Polsek	4	Buah
	e. Lain-lain	12	Buah

(Sumber Data : Laporan Gubernur Maluku Utara Tahun 2000)⁹⁴

Jumlah korban jiwa fasilitas pemerintah dan sarana ibadah tersebut diatas menunjukkan konflik horizonatal di Maluku Utara perlu penanganan khusus oleh pemerintah, sedangkan di Tobelo Halmahera Utara jumlah korban manusia dan sarana praasaran yang rusak/terbakar cukup signifikan hal ini dapat dilihat pada tabel berikutnnya :

No	Uraian Kerugian Akibat Konflik	Jumlah	Keterangan
1	- Rumah Ibadah		
	- Rumah Ibadah Mesjid	19	Buah
	- Musallah	16	Buah
	- Gereja	7	Buah
2	Korban Jiwa Akibat Konflik		
	- Korban Jiwa Umat Islam	877	Orang
	- Korban Jiwa Umat Kresten	200	Orang
	- Luka-Luka	215	Orang
3	Rumah Rusak	825	Rumah
4	Sarana Pendidikan	55	Unit
5	Sarana Pembantu	3	Unit

(Sumber Data : Penanganan Pasca Kerusuhan Sosial di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2001)

⁹⁴Laporan Gubernur Maluku Utara Tahun 2000, Dalam Kunjungan Kerja Menko Sospolkam RI dan Rombongan di Ternate 31 Oktober, 2000

4. Asal Usul Orang Tobelo

Belum ada suatu penelitian mendalam tentang asal usul orang-orang Tobelo⁹⁵. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap suku ini tetapi terbatas pada aspek bahasa dan budaya atau antropologi. Misalnya dalam bidang antropolog Js Platenkap, Jop Ayawaila, sedangkan studi yang dilakukan E.K Masinambow adalah dalam aspek-aspek bahasa. Demikian juga laporan-laporan yang disampaikan oleh para misionaris yang pernah bertugas diwilayah tersebut, menggambarkan keadaan penduduk orang-orang Tobelo dengan tradisi dan budaya dan kondisi keagamaan mereka. Sumber-sumber tertulis mengenai asal usul mereka sangatlah terbatas jika tidak dapat dikatakan tidak ada. Sebuah novel sejarah yang ditulis oleh Y.B. Magunwijaya sedikit mendiskripsikan tentang asal usul orang-orang Tobelo berasal dari Talaga Lina di pedalaman Halmahera Utara.

Asal usul Tobelo menurut versi Adnan Amal, bersal dari kata “ *O ngotiri nia belo*” (tanamkan belo, jangkar) agar perahu tidak dibawa ombak). Dari kata *nia belo* timbullah kata “*Tobelo*”. Kalimat ini muncul pada saat perintah kepala (suku) masyarakat Tobelo ketika berlabu di pelabuhan Pulau Halmahera dengan perahu besar (*juanga*), kemudian diabadikan menjadi nama Tobelo yang di wujudkan sekarang.⁹⁶ Latar belakang penamaan Tobelo terkait dengan konflik kerajaan masa lalu. Ketika kerajaan pindah dari Makian ke Pulau Bacan , Sultan Bacan memerintahkan orang-orang Tobelo dan Galela yang mendiami pulau untuk pindah ke Halmahera. Sultan Bacan membekali mereka dengan *Juanga* (perahu besar) yang dapat memuat ratusan orang Tobelo-Galela. Pelayaran komunitas masyarakat Tobelo-Galela menuju Gane Dalam (Gane Barat). Setiba mereka di Gane Dalam . Kepala suku Tobelo memerintahkan anak buah dengan kalimat *O ngotiri nia belo* (tancapkan jangkar) pada saat

⁹⁵Orang-orang Tobelo Halmahera Utara dikelompokan dalam beberapa etnik besar, seperti, Tobelo, Galela, Loloda, dan Kao. Beberapa etnik itu yang hidup dalam satu perkampungan yaitu, Talaga Lina. Hidup di Talaga Lina sebagai kawasan hunian pertama. Makbul H. Din, “Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Konstruksi Budaya Lokal (*studi Kasus Pada Komunitas Islami Kristen di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara*)”, Disertasi (Bandung Unpad, 2015), h.37

⁹⁶Adnan Amal, *Orang Galela Alam pikiran, Tradisi dan Budaya* (Jakarta: TC, 2013), h. 7

perahu berlabu di peñabuhan Gane Dalam. Dari sinilah awal mula penamaan kata Tobelo. Selanjutnya dalam perjalanan kepada masyarakat Tobelo, Sultan Bacan menghadiakan sejumlah gong, dan masyarakat Galela Sultan menghadiakan sebuah meriam. Kedua komunitas masyarakat ini melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal baru. Merekapun mereka masuk hutan dan mendaki sebuah gunung, setelah beberapa hari berada di puncak gunung Supera itu, kedua komunitas masyarakat melanjutkan perjalanan. Sehingga pada suatu hari orang Tobelo menemukan Talaga lina, dan kepala suku memerintahkan agar mereka sementara membangun pemukiman sekitar Talaga Lina. Sementara itu orang Galela tetap melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya menemukan Talaga dan membangun pemukiman mereka ditengah-tengah yang masyarakat Galela menyebut "Soa Konora" (negeri di tengah-tengah).⁹⁷ Desa ini sekarang berada di pedalaman masuk wilayah kec. Galela Barat.

Akan tetapi sumber-sumber tidak tertulis dalam bentuk tradisi lisan yang di sampaikan secara turun temurun. Hasil penelitian yang berhasil penulis peroleh dengan beberapa informan tentang asal usul mereka menjelaskan bahwa, asal usul orang Tobelo awalnya mereka menempati kawasan hutan di pedalaman Halmahera. Suatu daerah yang disebut "Hidanga" berada di daerah segi tiga Kao, Ibu dan Tobelo (sekarang). Daerah itu merupakan daerah datar yang subur dan luas. Orang-orang Tobelo pada saat itu masih dalam taraf kebudayaan berburu dan nomaden.⁹⁸ Ketika pertentangan Ternate dan Jailolo meningkat untuk memperebutkan hegemoni atas Halmahera Utara. Orang-orang Tobelo berpihak pada Jailolo. Puncak pertentangan Ternate dan Jailolo berujung pada perang dan berakhir dengan dianeksasinya Jailolo oleh Ternate. Pada saat-saat itulah orang-orang Tobelo yang berpihak pada Jailolo menyingkir dari daerah hidanga karena dekat dengan jailolo dan Ibu. Ke daerah

⁹⁷Adnan Amal, *Orang Galela, Alam pikiran, Tradisi dan Budaya*, h. 8.

⁹⁸Darsis Humah , " *MIA 'TONAKA: Properti Rights Orang-orang Tobelo Di Bidang Agraria*", Laporan Hasil Penelitian (Ternate, LP2M STAIN Ternate, 2006), h. 34-35.

timur untuk menghindari dari pengaruh kekuasaan Ternate. Sebagian dari Orang-orang Tobelo yang menjadi prajurit Jailolo menyingkir sampai ke Seram Timur mengikuti Raja Jailolo dan mendirikan Kerajaan Jailolo di Seram Timur.

Orang-orang Tobelo yang tersisa di Daerah Hidanga berupa rakyat biasa pasca kekalahan Kerajaan Jailolo atas Ternate, melakukan eksodus kearah timur menghindari dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Ternate, dipimpin oleh seorang Kapita yang bernama Beleka Hora (bahasa Tobelo: yang punggungnya menyala api). Atas perintah Raja Jailolo Kapita Beleka Hora diinstruksikan untuk memimpin rakyat dan prajurit (bala) orang-orang Tobelo yang masih tersisa berpindah dari Hidanga agar selamat dari kejaran prajurit Ternate. Dan pergerakan prajurit dan rakyat bergerak secara berkelompok-keompok menuju ke arah timur.

Pergerakan secara berkelompok akhirnya mencapai arah timur dan tiba dipesisir pantai Halmahera Utara bagian timur yang pada saat itu belum bernama (Teraicognito). Daerah itu kemudian disebut Paca (Desa Paca sekarang). Penamaan desa tersebut karena pada saat mereka tiba daerah yang tidak mempunyai nama. Dan ketika mereka ingin memberi nama, Kapita Beleka Hora mengusulkan agar diberi nama "Pasa". Sebagai pengabdian percakapan terakhir antara Kapita dengan Raja Jailolo, ketika Raja Jailolo menanyakan kepada Kapita "Ni Bala Kasa?" (parajuritmu dimana?) Kapita menjawab: "Pasa Raima" (mereka telah pergi). Maksudnya telah pergi sesuai dengan instruksi Raja Jailolo menghindari dari kejaran parajurit-parajurit Ternate. Dan nama Paca diambil dari kata "Pasa" (bahasa Ternate artinya pergi). Selanjutnya kata "Pasa" diucapkan oleh lidah dan dialek orang-orang Tobelo berubah menjadi "Paca".⁹⁹

Eksodus orang-orang Tobelo secara besar-besaran meninggalkan "Hidanga" ditempuh secara berkelompok-kelompok. Kelompok terbesar menempuh perjalanan yang berakhir di "Paca" pesisir pantai Timur Halmahera akan tetapi mereka yang tidak berhasil sampai ke

⁹⁹Darsis Huma, "MIA' TONAKA: Properti Rights Orang-orang Tobelo Di Bidang Agraria", Laporan Hasil Penelitian (Ternate, LP2M STAIN Ternate, 2006), h. 34-36.

pantai timur Halmahera, secara berkelompok-kelompok membuat perkampungan-perkampungan baru ditengah hutan pedalaman Halmahera akibat mereka tersesat dan terpisah dengan rombongan yang besar. Mereka kemudian mereka mendirikan kampung-kampung ditengah hutan seperti kampung Gusuri; Kampung Kai, Kampung Birinoa, kampung Wangongira, dan Talaga Lina dan lainnya. Umumnya ciri Khas dari perkampungan mereka adalah dekat sungai atau telaga agar mudah memperoleh air, dan dalam lahan hutan yang luas agar mudah memperoleh binatang buruan.

Sedangkan rombongan besar yang kemudian sampai di pantai Timur Halmahera (Paca), mereka membuat perkampungan pertama di daerah itu. Kemudian berkembang menjadi permukiman yang semakin besar. Dari Paca orang-orang Tobelo mengembangkan perkampungan ke arah utara dibangun lagi perkampungan yang bernama "Uri" (sekarang meliputi Kupa-kupa, Kakara B dan Tomahalu); dan diteruskan lagi ke Utara dengan melakukan perluasan permukiman yang disebut "Ehi-Ehi" (sekarang meliputi Efi-Efi, Gamhoku). Ketika orang-orang Tobelo mengembangkan perkampungan dan permukiman di pesisir timur Halmahera Utara dan maju dengan pesat sehingga menjadi kota pertanian dan perdagangan. Belakangan kerajaan Ternate ingin mengontrol dan menguasai daerah tersebut. Orang-orang Tobelo tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengakui wilayahnya sebagai kedaulatan Ternate. Orang-orang Tobelo tidak mau membayar pajak atau mengirim upeti terhadap Raja Ternate.

Akhirnya kerajaan Ternate dengan bantuan Belanda menyerang orang-orang Tobelo, membakar perkampungan orang-orang Tobelo yang berada di "Efi-Efi" Sehingga daerah itu lebih terkenal dengan " Gam Hoku " (bahasa: Ternate artinya kampung yang terbakar). Karena kekuasaan Ternate pda saat itu telah dibawah kolonial Belanda. Ternate telah menjadi kakitangan Belanda untuk mengontrol daerah tersebut. Dan orang-orang Tobelo tetap melakukan perlawanan dengan tetap menolak membayar pajak dan mengirim upeti.

Serangan Ternate bekerja sama dengan Belanda menyerang perkampungan orang-orang Tobelo di daerah selatan menyebabkan kampung mereka terbakar, maka mereka berpindah ke arah Utara lagi yang sekarang disebut Gamsungi (bahasa Ternate: artinya kampung Baru) karena mereka mendirikan kembali perkampungan yang telah di hanguskan Belanda dan Ternate di bagian selatan. Demikian asal usul perjalanan panjang orang-orang Tobelo sampai sekarang mereka menetap di sepanjang pantai timur Halmahera Utara, dengan keadaannya seperti sekarang Tobelo menjadi Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara.

5. Sistem Keekerabatan

Manusia secara kodrati akan hidup dalam suatu komunitas. Juga manusia pasti memiliki keekerabatan, karena dia memiliki keluarga. Sistem keekerabatan dimulai dari perkawinan yang kemudian hadirnya rumah tangga dan keluarga demikian seterusnya hingga muncul clan atau marga dengan sistem keekerabatannya. Dari sistem sosial seperti itulah muncul kelompok-kelompok keekerabatan atau kinggroup. Pola keluarga yang terdapat pada orang-orang Tobelo, terdapat dua pola, yaitu pola keluarga inti dan pola keluarga luas. Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka yang belum menikah. Anak istri dan anak angkat memiliki hak yang kurang lebih sama dengan anak kandung, dan karena itu dianggap pula sebagai anggota keluarga dalam suatu keluarga ini. Keluarga luas adalah kelompok keekerabatan yang merupakan kesatuan sosial yang selalu terdiri dari lebih dari satu keluarga inti.

Hasil pengamatan penulis, terhadap pola keekerabatan dalam bentuk kesatuan keluarga terdapat dua pola keluarga. Orang-orang Tobelo, yang tinggal di kota, lebih cenderung dengan pola keluarga inti. Tetapi yang tinggal di desa cenderung memiliki pola keluarga luas utrolokal, yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti dari anak-anaknya dari pria maupun wanita. Atau ada keluarga-keluarga inti yang masing-masing menempati rumahnya sendiri, yang dibangun berdekatan dengan keluarga-keluarga inti

anggota keluarga luas, dalam satu halaman atau compound. Dari keluarga-keluarga luas itu lahir clan.

Pada umumnya sistem kekerabatan orang-orang Tobelo berbentuk clan (minimal lineage/minor lineage), yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga luas keturunan dari satu leluhur. Dan mereka masih saling mengetahui hubungan kekerabatan mereka masing-masing, mereka masih saling mengenal dan bergaul, karena umumnya mereka masih tinggal bersama dalam suatu desa pada umumnya masih tetap menggunakan sistem marga, seperti halnya di Ambon dan Batak.

Modal sosial dan budaya tampaknya dalam keseharian seperti sifat kekeluargaan, sifat saling menolong dan membantu, kesetiakawanan social, koperatif, saling percaya antar sesama. Semuanya itu tampil dalam perilaku dan tindakan social adalah watak dan karakter social, terlihat pada sifat dan sikap sebagai memiliki rasa malu atau iri (shamed culture), rasa bangga dan emosi keagamaan yang tinggi terhadap kearifan local dalam modal social adalah menggali dan memanfaatkan untuk melindungi masyarakat miskin dan bermasalah, membangun kesertaan masyarakat dalam organisasi social, mengendalikan konflik dan kekerasan, memelihara sumberdaya alam dan social. Kearifan local turun dari pengetahuan budaya local yang membentuk kearifan individu (orang) atau kelompok individu guna mengelolah kehidupannya, dari generasi ke generasi. Dalam kearifan local tercakup berbagai mekanisme adaptif dan cara-cara untuk bersikap, berperilaku dan bertindak ke dalam tahanan social.¹⁰⁰

Dimensi kearifan local adalah mekanisme pengambilan keputusan, keterampilan local, sumberdaya local dan tipe solidaritas social. Perwujudannya tampak pada kecerdasan local yang ditransfer pada daya cipta, inovasi, kreatifitas untuk kemandirian local. Kearifan

¹⁰⁰ Abu Hamid, *Potensi Modal Sosial pada Budaya Lokal dalam pembangunan Daerah*. (Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 2005), h. 60

local mengambil sukma dan semangat dari nilai-nilai budaya yang telah disepakati secara social. Kearifan local adalah suatu kondisi yang matang dan mantap yang terjadi dalam modal sial, biasanya yang dimiliki oleh individu yang telah mengambil sukma masyarakatnya, itulah disebabkan *indigenous local*, atau pribumi local.¹⁰¹ Hibualamo sebagai suatu unsur kearifan lokal yang mampu menegakkan prinsip-prinsip dasar terdapat dalam masyarakat semisal kerjasama, gotong royon, bermusyawarah dan keadilan (*O adili, O bari*) serata nilai kearifan lain.

6. Sistem Kepercayaan Orang Tobelo (*Konsep Jou Gikimoi*)

Salah satu sistem kepercayaan Orang Tobelo adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut menurut keakinan atau agama masing-masing penganut agama. Akan tetapi masyarakat Tobelo mengunut suatu sistem kepercayaan yang di wariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka yang sudah melembaga dalam institusi Hibua lamo.

Salah satu nilai yang mendasar dalam adat Hibualamo adalah konsep Ketuhanan atau *jou gikimoi* dalam pandangan relegiusitas masyarakat Tobelo dan Galela, sebab segala prilaku serta tindakan manusianya selalu dihubungkan dengan kuasa yang tertinggi (*supra-natural*) di luar manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat *Hibua lamo* adalah manusia religious, di mana sumber kebaikan tertinggi berasal dari pola hidup leluhur yang selalu menjadi panutan dalam tutur dan laku mereka setiap saat.¹⁰²

Dalam agama-agama pra-litere (animisme dan dinamisme) etnik Tobelo mengenal konsep *Gurumini* ataupun *Gomanga* sebagai roh leluhur atau "roh senior" yang memiliki kekuatan transeden tetapi selalu ada dalam realita hidup manusia. Bagi masyarakat Halmahera Utara, para leluhur adalah kekuatan yang senantiasa menuntun mereka di

¹⁰¹Amanan Soleman Saumur, *Modal Sosial* (Jakarta: CV. Az-Zahra, 2013), h. 45

¹⁰²Lihat S.S. Duan, *Hein dan Hibua Lamo* (Tobelo : Tobelo POS dan PEMDA Kab. Halut, 2008), h.

manapun mereka berada sehingga dalam situasi yang bagaimanapun para leluhur selalu menjadi panutan dalam bertindak.

Hal tersebut juga dalam konsep agama semetik, dimana nilai ritual harus berimbang dengan nilai social. Seorang penganut agama Kristen yang taat diperlukan mengaplikasi ajaran Yesus dalam kehidupan social mereka, karena ini merupakan wujud dari panggilan menyatakan misi Allah mencakup misi perdamaian dengan sesama, sebagaimana kata Rasul Paulus '*Ia telah menciptakan berita perdamaian kepada kami (2 Kor.5:19)*, hal yang sama juga berlaku dalam Islam, dimana umatnya diajarkan mengaplikasi semangat dan nilai ritual dalam dimensi social. Sehingga seseorang dalam Islam yang kuat ibadah ritual menjadikan pribadi mereka sangat baik dan luhur dalam kehidupan social.

Oleh karena itu nilai ketuhanan (Jou Gikimoi) pada etnik Tobelo sangat berpengaruh positif dalam kehidupan mereka, hal ini dibuktikan dengan rekonsiliasi pasca konflik bagi etnik Tobelo dan Galela yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Hemat peneliti ini merupakan semangat dan nilai keagamaan yang menyatu dalam karakter dan kepribadian masyarakat Tobelo, Galela dan loloda . Dan ini juga merupakan perekat social yang tak bisa dipungkiri eksistensinya dalam menghadirkan "*common good*" bagi masyarakat Halmahera Utara dengan identitas agama yang berbeda.

Seperti yang di jelaskan di atas salah satu nilai yang paling mendasar dalam adat *Hibua Lamo* yakni religius. Dengan adanya nilai religiusitasnya, maka konflik yang menelan begitu banyak korban baik harta, benda, maupun nyawa dapat diselesaikan dalam waktu yang relative singkat. Dengan nilai tersebut maka perbedaan antar agama tidak menjadi aral bagi terjalinnya kembali tali silaturahmi di antara komunitas yang bertikai serta membawa masyarakat ke dalam situasi yang lebih kondusif tanpa saling curiga.

Masyarakat *Hibua Lamo* sering dikenal dengan manusia religius, dimana sumber kebaikan tertinggi berasal dari pola hidup leluhur yang selalu menjadi panutan dalam tutur dan laku mereka setiap saat. Ketika berbicara mengenai manusia religius (*homo religious*), maka didalamnya terdapat tiga hal yang mendasar yakni bagaimana pandangan mereka tentang nilai-nilai dunia antara yang profan dan sakral, tentang upacara inisiasi (kultus) dan ketiga yakni tata kelakuan. Dalam pandangan *homo religious*, nilai-nilai dunia tergantung pada nilai-nilai dunia atas, dimana tata tertib dan tata nilai dunia ini telah ditentukan sejak dahulu kala sehingga tata tertib dan tata nilai tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat. Peter Berger, mengatakan bahwa pandangan *homo religious* tentang tata tertib dan tata nilai dunia merupakan pandangan dunia yang sakral.

Kedua, mengenai upacara inisiasi dimana upacara merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari komunitas masyarakat adat maupun suku, karena hakekat mendasar dari kepercayaan mereka diimplementasikan melalui kultus. Sasrapratedja, melihat bahwa upacara memegang peranan penting dalam kehidupan *homo religious* karena melalui upacara mereka dapat masuk kedalam hukum eksistensi antara mereka dengan yang sakral. Sedangkan Mircea Eliade, melihat bahwa dengan upacara dimaksud maka manusia dapat diubah secara spritual dan karena itu juga mengakibatkan perubahan kultur dan sosiologis.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa dalam konteks historis maupun juga *homo religious* selalu megimani Yang Suci dan percaya bahwa di dunia ini ada suatu realitas “Yang Absolut”. Dunia ini menjadi nyata karena manusia mengambil bagian dalam “Yang Suci” sehingga *homo religious* terus menerus berhubungan dengan “Yang Suci” dalam segala perbuatannya”.

Dalam masyarakat adat *Hibua Lamo* pola hidup serta perilaku sebagaimana dijelaskan Mircea Eliade sangat nampak dimana segala tata kelakuan masyarakatnya tidak terlepas dari

mitos maupun tata tertib alam. Mereka menghayati akan adanya kehadiran “Yang Suci” melalui fenomena alam. Eksistensi dari segala sesuatu yang ada dalam kosmos diyakini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ada yang “mengadakan” karena itu segala sesuatu ada “yang empunya”. Dari pemahaman itulah maka apa yang disebut sebagai Yang Suci dalam pandangan masyarakat *Hibua Lamo* disebut sebagai “*Gikiri*” adalah suatu pribadi absolute yang senantiasa ada dalam alam. Selain itu “*Gurumini*” pun diakui sebagai pribadi yang dijadikan panutan dalam tata kelakuan sehingga harmoni dalam kehidupan antara sesama maupun dengan absolute dapat terjaga.

Ciri khas religiusitas masyarakat *Hibua Lamo* yang sangat menghargai alam sebagai bagian dari yang sakral memiliki kemiripan dengan komunitas masyarakat adat lainnya di Nusantara. Kemiripan mengenai konsep tentang yang profan dan yang sakral selalu ada dalam komunitas masyarakat suku. Menurut Bertens, yang sakral dan yang profan dalam penghayatan masyarakat tradisional maupun modern adalah hakikat dari agama itu sendiri dimana antara keduanya selalu muncul dialektika (hubungan timbal balik). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa: “bagi orang beragama, dunia penuh dengan hierofani-hierofani. Itu berarti, bagi dia “yang kudus” menampakkan diri dalam benda-benda dunianya. Sehingga boleh dikatakan bahwa sejarah agama (dari agama yang paling kuno sampai dengan agama tarif tertinggi) terdiri dari hierofani-hierofani dalam jumlah besar sekali”. Apa yang dijelaskan Bertens dapat diterima kebenarannya karena dalam agama baik tradisional maupun agama modern, kepercayaan ataupun iman seorang pengikut selalu didasarkan pada pengalaman-pengalaman hierofani yang dahsyat.

Sedangkan Daniel L.Pals menjelaskan bahwa “yang profan adalah wilayah urusan setiap hari hal-hal yang biasa, tak disengaja dan pada umumnya tidak penting. Yang sakral adalah sebaliknya. Ia adalah wilayah *super natural*, hal-hal yang luar biasa, mengesankan dan penting. Sementara yang profan adalah yang menghilang dan mudah pecah, penuh bayang-

bayang, maka yang sakral merupakan wilayah keteraturan dan kesempurnaan, rumah para leluhur, pahlawan dan dewa. Dimanapun kita memandang suku-suku purba, agama dimulai dari pemisahan yang fundamental ini”.¹⁰³

Dari apa yang dikemukakan Pals, dapat ditemukan suatu kejelasan bahwa dalam agama-agama, baik tradisional (pralitere) maupun agama-agama Abrahamik, selalu saja terdapat dua hal tersebut yang selalu dipertentangkan sebagai wilayah yang bersebrangan serta menjadi landasan dalam doktrin-doktrinnya. Karena ketika kita masuk dalam ajaran masing-masing agama dan dikala membahas mengenai keselamatan maupun kelepasan, maka tidak terlepas dari dua kutub yang dimaksud.

Dalam pengamatan penulis, salah satu ciri khas religiusitas masyarakat *Hibua Lamo* ternyata memiliki kemiripan dengan masyarakat adat Ambon yang berada dalam lingkaran adat *pela*. Penulis melihat adanya kemiripan karena dalam adat *pela* juga sangat menjunjung nilai-nilai adat yang didasarkan pada keyakinan *tete, nene* moyang sebagai sumber kebaikan. *Pela* adalah suatu perjanjian yang menghubungkan kampung-kampung Kristen dan Muslim dalam semangat persaudaraan yang dirancang untuk mencegah konflik antaragama.¹⁰⁴ Konsep tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan Ruhullesin, “*Pela* tidak bisa dilepaskan dari penyembahan kepada leluhur. Ketika penyembahan leluhur hilang maka tidak ada lagi jembatan yang menghubungkan Islam dan Kristen. Orang Maluku dan Maluku Urara bergantung pada leluhurnya (*wonge dan Salaijin*). Leluhur mentransendensikan dunia menjadi dunia real, suatu dunia yang bersifat sakral. Penghayatan religiusitas dan eksistensi terbingkai disitu. Adat mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat mengikat karena ia bersumber pada leluhur, karena bersifat sakral”.

¹⁰³Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York : Oxford University Pres, 1996), h. 25

¹⁰⁴Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnik di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 148

Berdasarkan konsep tersebut, penulis melihat *tete (Opa)*, *nene (Oma)* moyang dalam adat *pela* sama dengan *gurumini* ataupun *gomanga* dalam masyarakat *Hibua Lamo* sebagai roh leluhur ataupun “roh senior” yang memiliki kekuatan transenden tetapi selalu ada dalam realita hidup manusia. Bagi masyarakat Tobelo, *gurumini* ataupun *gomanga* para leluhur adalah kekuatan yang senantiasa menuntun mereka dimanapun mereka berada sehingga dalam situasi yang bagaimanapun para leluhur selalu menjadi panutan dalam bertindak.

B. *Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama berbasis kearifan lokal di Tobelo.*

Penyelesaian konflik antara umat beragama di Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya menunjukkan perubahan yang cukup signifikan antara kedua komunitas beragama Kristen dan Muslim. Hal ini dapat dilihat pada indikator terciptanya kerukunan antarumat agama dengan baik, kerukunan dapat dimaknai sebagai suatu iklim persatuan dan persahabatan yang dapat melahirkan hidup berdampingan secara damai. Kesepahaman hidup rukun dan berdampingan antara kedua komunitas yang bertikai ini dapat terlihat pada deklarasi damai masyarakat adat Tobelo pada hari Kamis tanggal 19 April 2001 di lapangan Hibua Lamo “*Naska Deklarasi Damai*” ini menyebutkan :

“Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh keinginan tulus dari masing-masing pihak, maka kami dari masyarakat Adat Hibua Lamo Tobelo Islam-Kristen sepakat bahwa pada hari ini, Kamis Tanggal 19 April Tahun 2001 Jam 10.000 WIT, setelah terjadi pertikaian yang telah mengakibatkan berbagai pengorbanan dan kerugian Yang tidak ternilai harganya baik harta benda maupun nyawa, serta penderitaan yang sungguh berat, diatas perkabungan dan kesedihan yang dalam, maka kami sepakat meletakkan senjata dan menghentikan permusuhan ini, serta mengadakan perdamaian sekali untuk selama-lamanya”.¹⁰⁵

Naska deklarasi damai ini memuat ketentuan 16 pasal yang mengikat perdamaian sejati di Tanah Adat Hibua Lamo Tobelo. Subtansi dari perjanjian perdamaian ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya mengakhiri permusuhan dan pertikaian untuk menjaga perdamaian dan ketenteraman dalam masyarakat serta menciptakan

¹⁰⁵Deklarasi Damai Masyarakat Adat Tobelo, tanggal 19 April 2001 dapat dilihat pada Lampiran II dalam S.S. Duan. *Hein dan Hibua Lamo “Tobelo Pos” Menelusuri Jejak Kepemimpinannya* (Tobelo Pos dan Pemda Halut, 2008). h. 155-157

kerunan antar umat beragama bersama antara kedua komunitas agama Islam-Kristen. Perjanjian Damai ini kemudian dipertegas dalam ketentuan-ketentuan pasal deklarasi damai yang tercantum dalam pasal 1, 2 berbunyi sebagai berikut : “ Kami semua sepakat dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi permusuhan dan pertikain di wilayah adat Hibua Lamo khususnya kecamatan Tobelo. Apabila ada orang atau kelompok orang yang merancang kejahatan orang lain (kelompok agama lain) dan melakukannya, bereka akan korban dan kalah dimana saja kerana perbuatannya itu”. Selanjutnya di pasal 2 lebih dipertegas tentang hubungan antaumat beragama dan saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama masing –masing berada dalam wilayah Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya diktum ini dapat lihat antara lain sebagai berikut:

“ Kami semua sepakat dan berjanji, untuk tidak saling menghina, melecehkan, dan memermalukan orang lain atau kelompok agama lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kami juga sepakat untuk saling menghormati dan menghargai orang lain kelompok agama lain , untuk menjalankan ibadahnya, serta saling melindungi baik umatnya maupun tempat ibadahnya masing-masing, dan hidup berdampingan secara harmonis, aman dan utuh dalam persaudaraan sejati”.

Kesepakatan damai ini diikat oleh suatu perjanjian permordial, kultural maupun struktural karena semua unsur terlibat baik masyarakat, Tokoh adat, Agama dan Pemerintah sehingga mempunyai kekuatan Hukum. Tapi itu semuanya kembali kepada hati nurani masyarakat Tobelo untuk berkomitmen hidup bersama dengan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang dipegang selama ini baik sebelum rusuh maupun sesudah konflik. Realitas menunjukkan bahwa setelah deklarasi bersama masyarakat adat maupun kedua komunitas umat beragama Islam-Kristen mulai mecair saling memberi dan menerima dan tidak saling mencurigai serta hidup membaaur seperti sedia kala, sekalipun secara psikologis masi ada beni-beni konflik yang masih terngian di benak masing-masing, tapi mereka menyadari bahwa konflik yang melanda daerah tobelo dan Halmahera Utara dapat melululantahkan sendi-sindi kehidupan dan sistem kekeluargaan selama ini terjaling sejak leluhur *giadu dan*

gia nongoru bahkan saudara dan sedara menjadi perekat dalam masyarakat adat Tobelo. Bahkan mereka berkisah dan bercerita peristiwa dahsyat mengerikan itu, jangan sampai terulang lagi. Mereka berjanji peristiwa ini diakhiri dan jadikan sebagai pengalaman yang berharga di masa depan masa lalu biarlah berlalu tidak terpelu dikenang karena akan menimbulkan kebencian, siapapun yang menang atau kalah tidak ada artinya hanya meninggalkan kesedihan dan pengorbanan diantara kedua belah pihak. Semangat kebersamaan ini di perkuat dalam diktum deklarasi damai pada pasal 4 bahwa ;

“Kami sepakat untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang hanya membenarkan dan / atau memperlakukan pihak tertentu, tetapi perlu mengenang masa lalu untuk tidak terulang lagi sampai selama-lamanya”.

Deklarasi damai tersebut, sejalan dengan upaya pemerintah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2001 telah melakukan rekonsiliasai pasca rusuh untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian material lain yang lebih banyak yang akan memperburuk situasi dan keamanan di daerah ini, serta untuk mengembalikan rasa aman masyarakat dalam rangka mewujudkan kedamaian maka harus segera mengakhiri konflik berdarah ini dengan meletakkan kembali prinsip-prinsip dasar kerukunan hidup antarumat beragama dengan upaya mempertemukan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, adat dan kelompok yang bertikai sehingga diharapkan akan tercipta saling pengertian yang dilandasi oleh faktor hubungan kekeluargaan, rasa kesadaran masyarakat untuk hidup damai dan adanya persaan jenuh berada di tempat pengungsian (penampungan pemungsi).¹⁰⁶ Upaya-upaya perdamaian yang ditempuh ini cukup efektif dan berhasil sehingga terjadi pemulihan keadaan dimana pada beberapa tempat telah dilakukan kesepakatan damai antara kelompok yang bertikai seperti di kecamatan Bacan, Jailolo, Galela, Tobelo dan tempat lainnya.

¹⁰⁶Penanganan Pasca Kerusuhan Sosial di Propinsi Maluku Utara: Langkah-langka, Rekonsiliasi, Rekonstruksi/Rehabilitasi dan Reevakuasi “Laporan” Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2001, h. 8-10.

Upaya perdamaian ini berdasarkan usulan Tim Kerapatan adat Halmahera Utara, yang terhimpun dari 5 (lima) Kecamatan di Halmahera Utara Timur Kao, Tobelo, Morotai, Galela dan Loloda) yang di ketua oleh H. Imam M.S.Lastory, lewat sekretaris Negara RI pada tgl 10 Mei 2002 di Jakarta menyampaikan pernyataan sikap dan usulan untuk menciptakan perdamaian dan membangun masyarakat Maluku Utara di masa depan yang lebih aman dan damai. Point penting dalam usul Tim kerapatan adat Halmahera Utara Timur itu adalah 1) Masalah pengungsi sangat menjadi keprihatinan mereka dan dimohon untuk persepatan penyelesaiannya konflik. 2) Masyarakat melalui para tokoh setempat khususnya di daerah-daerah konflik yang tergabung dalam Tim Kerapatan Adat Halmera Utara perlu lebih dilibatkan dalam partisipasinya menciptakan perdamaian dan pembangunan Masyarakat.¹⁰⁷ Langkah-langka penanganan pasca kerusuhan pememerintah Maluku Utara melukakan upaya rekonsiliasai, rekonstruksi, rehabilitasi dan reevakuasi dari pengunsian dan selanjutnya di pulangkan ketempat asal masing-masing Jailola, Galela, Bacan dan Tobelo.

Salah satu perwujudan deklarasi damai tersebut, FKUB Kabupaten Halmahera utara melakukan kegiatan perkemahan Pemuda Pelajar se- Kabupen Halmahera Utara yang di tempatkan di desa Pune Kecamatan Galela. Tema yang di usung adalah “ *Pemuda Pelajar Bakudapa Bacarita*” Pemuda Pelajar mencari cara untuk saling menghargai saling menerima, saling mengasihi sebagai puncak dari karya Tuhan.

Menurut Samsul Bahri sebagai Ketua FKUB Halut sekaligus sebagai ketua panitia yang terlibat dari berbagai unsur Islam-Kristen dan dan Pemerintah, menyatakan bahwa perkemahan ini melibatkan semua pelajar SLA/MA Kota Tobelo dan Galela Kabupaten Halmahera Utara dengan tujuan agar pasca konflik peminana generasi muda tentang kerukunan agama saling menghargai, menghormati antara sesama umat manusia dan hidup

¹⁰⁷Dokumen : Wahyudi Ruwiyanto, Sekretariat Wakil Presiden RI Deputi Bidang Politik 2002.

rukun, damai dan toleransi perlu ditanam secara dini singga mereka salin mencintai sesama umat manusia dan perdamaian dan bahwa kita semua adalah bersaudara.¹⁰⁸

Hal senada Peneliti melihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu sangat positif dan bermanfaat, karena mereka tidur, makan, bergaul, bermain sangat senang gembira dan komunikatif diantara belajar dengan latar belakang agama, budaya dan bahasa yang berbeda tapi mereka bisa hidup bersama dalam suatu kegiatan yang bernuansa sosial keagamaan. Kegiatan ini saling berinteraksi antara pelajar yang berbeda agama mereka saling menghormati dan menghargai dan suasana toleransi dapat tercipta dengan baik dan harmoni.

Asri Ramli selaku Sekretaris MUI Halut dan sekaligus Anggota FKUB, juga menyatakan bahwa;

Pasca konflik dan insiden Pembakaran Sekolah Al-Khairat, kondisi umat Islam dan Kristen dan hubungan antar Umat beragama sudah aman dan kondusif sekalipun pelaku sampai saat ini belum terungkap tapi pihak pemerintah dan masyarakat tetap menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat bersama.¹⁰⁹

Kasus kriminal pelaku pembakaran di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan insiden tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sejauh ini pelaku pembakaran dan aktor insiden maret 2016 belum terungkap dengan jelas, hal ini yang membuat masyarakat muslim Tobelo dan khususnya warga Al-khairat Maluku utara merasa geram dan Marah mengapa kasus ini tidak di tangani secara tuntas khususnya kerja aparat kepolisian yang berada di wilayah Halmahera Utara. Namun demikian Pemerintah Daerah Halmahera Utara mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelesaian insiden ini dengan berupaya membangun kembali Gedung Sekolah Al-Khairat yang terbakar satu lokal. Menurut pengamatan peneliti bahwa pembangun itu sementara dalam proses pembangun sekitar 80% dalam pekerjaannya. Kasus pembakaran gedung sekolah ini juga secara tidak langsung

¹⁰⁸Samsul Bahri, Sambutan Ketua Panitia/ FKUB, Pada Perkemahan Pelajar Bakudapa Bacarita, Galela, 12 Maret 2017

¹⁰⁹Asri Ramli, Sekretaris MUI dan Anggota FKUB Halut, Wawancara, Galela, 12 Maret, 2017

mengganggu hubungan dan harmonisasi kerukunan antarumat beragama di Tobelo dan Maluku Utara pada Umumnya. Karena secara emosional dan Organisasi Al-khairat adalah organisasi Islam di Maluku Utara sangat besar anggota dan pengikutnya sangat berpengaruh dalam pengembangan Islam khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwa di Maluku Utara dan sekitarnya. Langkah antisipasif telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredah konflik dan selanjunya membangun kemabali gedung yang rusak terbakar di Al-Khairat Tobelo. Insiden pembakaran Sekolah ini juga mengganggu hubungan Islam-Kristen di Tobelo dan kerukunan antar umat beragama di Halmahera Utara.

Secara yuridis-normatif kerukunan beragama merupakan amanah undang-undang yang tercantum dalam Tap MPR 1978 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mendagri No I Tahun 1969, dan sempurnakan SKB No. 9 dan 8 2006, kemudian dijabarkan pada Trilogi Kerukunan Beragama. Sebagai realisasi TAP MPR ini, pemerintah melalui Departemen Agama memprogramkan tiga bentuk kerukunan:

4. Kerukunan Intern umat Beragama
5. Kerukunan Antarumat Beragama
6. Kerukunan Antarumat Beragama dengan pemerintah.

Adanya konflik internal umat beragama dan konflik antar umat beragama, maka lahirnya konsep TRIKERNAS. Kemudian dijabarkan dalam bentuk (1) Kerukunan inter umat beragama (2) Kerukunan antar umat beragama dan (3) Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Konflik intern umat beragama ini, maka di butuhkan dari agama-agama itu secara sendiri dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang multikultural di negeri ini. Salanjutnya dalam suatu negara NKRI terdapat bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan diperlukan suatu perdamaian dan kerukunan dalam hidup bersama di negara dan daerah ini. Sangat diperlukan kerukunan antar umat beragama, walaupun setiap

penganut agama mengetahui bahwa setiap agama terdapat ciri-ciri inklusifisme yang dikenal dengan istilah dogmatisme dan fanatisme. Kerukunan internal umat beragama ini di perlukan untuk membuka tabir kemungkinan adanya persamaan persepsi dan penyamaan visi keberagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kerukunan yang ketiga adalah antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini di butuhkan *piranti-piranti budaya* yang bukan hanya sebagai perekat agama dalam sebuah negara, tetapi juga semua aspek kehidupan warga negara yang didalamnya terhimpung sejumlah etnis, komunitas yang berbeda adat istiadat dan budayanya.¹¹⁰ Falsafah negara pancasila adalah piranti budaya nasional secara makro yang dapat menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara mikro dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama secara aman dan harmoni.

Secara historis kerukunan beragama di Indonesia, pada awalnya kerukunan antarumat beragama atas prakarsa dan program pemerintah, namun tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah. Jadi esensi kerukunan bukanlah pemerintah tapi adalah umat beragama itu sendiri. Dan jika terjadi perselisihan, baik intern suatu agama maupun antarumat beragama, diselesaikan oleh umat beragama itu sendiri dengan pemerintah sebagai Arbilter atau memediasi tokoh-tokoh agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat beragama. Salah satu wadah yang di bentuk oleh pemerintah adalah Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB), yang beranggotakan organisasi induk keagamaan masing-masing agama. Departemen Agama sendiri membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).¹¹¹

Mewujudkan kerukunan antarumat beragama maka diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama, yaitu: a). Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama, b).Tiap subyek berpegang kepada agama masing-masing c).Tiap subyek menyatakan diri sebagai

¹¹⁰Yusuf Abdurrahman dalam Ikqrah Mochtar-Herman Oesman (ed). *Jalan Panjang Perdamain sebuah pemikiran Untuk Maluku Utara* (Ternate : PTD-PMU, 2007), h. 207

¹¹¹H. Tarmidzi Taher, " *Globalisasi Kerukunan*" dalam Menti Agama Biografi Sosial Politik (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998), h. 422

partner terhadap subyek lain.¹¹² Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka kerukunan antarumat beragama bertujuan untuk :

8. Memelihara eksistensi agama-agama itu sendiri.
9. Memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945
10. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan.
11. Memelihara stabilitas dan ketahanan nasional
12. Membendung dan mengikis paham sekularisme dan atheisme
13. Menunjang dan mensukseskan pembangunan
14. Mewujudkan masyarakat religious (agamawan)

Mengingat urgensi kerukunan dalam memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, maka MPR dalam sidangnya tahun 1978 memutuskan dengan Ketetapan Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV di bidang Agama angka 1 huruf b: Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, diantar sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Walaupun kerukunan ini menjadi TAP MPR dan program pemerintah namun esensi kerukunan bukan terletak pada ketetapan MPR dan program pemerintah ini, tetapi berada di tangan umat beragama sendiri. Dengan kerukunan tercipta uniformitas dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Uniformitas menghilangkan diferensiasi, sentimen dan rasa asing yang pada lahirnya merupakan bibit sengketa dan perpecahan.

¹¹²Lihat Kerangan lengkap, Said Agil Husen Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 7, 25.

Faktor-faktor internal dan eksternal (Faktor Agama - Non Keagamaan) yang mendasari kerukunan antar umat beragama maka seperti kasus pembujukan dan pemaksaan dalam penyiran agama pembangunan rumah ibadah, dan kasus yang terkait penyiran agama, perusakan rumah ibadah maka pemerintah mengeluarkan SKB Menag dan Mendagri Nomor 1/1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Kasus-kasus yang terkait dengan perusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 tahun 1969, yang di sempurnakan dan di ganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. Salah satu Kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dalam bidang pembanguna beragama adalah merujuk Perpers No, 7 tahun 2004-2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dari semanngat RPJM ini melahirkan dua arah Kebijakan pokok di bidang Agama adalah: 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama, dan; 2 Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. Atas dasar arah kebijakan itu, di susunlah enam program program di bidang agama salah satu point adalah Peningkatan kerukunan umat beragama.¹¹³

Peraturan bersama SKB Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dalam ketentuan umum bab satu (BAB I), disebutkan bahwa;

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi , saling pengertian , saing menghormati , menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pemeliharaan kerukunan umat

¹¹³Muhammad M.Basyuni Menteri RI, *Kebijakan dan Stategi Kerukunan Umat Beragama*, (Balitban dan DIKLAT Departemen Agama RI, 2006), h.12.

beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.¹¹⁴

Ketentuan peraturan bersama (Bab II pasal 2) itu disebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat agama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah. Baik di tingkat Kabupaten /Kota maupun tingkat Propinsi bertanggung jawab oleh Bupati dan Gubernur di daerah masing-masing, dan dibantu oleh Kepala kantor kementerian agama propinsi dan kabupaten. Salah satu tugas dan kewajiban kepala daerah Gubernur/Bupati adalah memelihara ketentraman ketertiban masarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi dan kabupaten.

Landasa kerukunan beragama secara normatif al-Qur'an memberikan isyarat, dan petunjuk (QS.Al-Kafirun/109: 6) " *Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku*", dan tidak ada paksaan dalam agama (*La ikraha fiddini*), isyarat ayat ini menunjukkan saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama serta saling toleran dan perbedaan dalam menjalankan agama masing-masing penganut agama. Oleh karena itu kerukunan agama dalam prespektif agama Islam maupun agama Kristen ada titik kesamaan yaitu terletak pada unsur kemanusiaan dan sesamanya sebab kesamaan manusia merupakan salah satu titik temu agama-agama, yang sangat penting dijunjung tinggi pada manusia adalah kesamaan derajat, kedudukan, setara, sehingga dapat bergaul dan saling menghargai antara satu dengan lain meskipun berbeda agama dan tanpa ada unsur paksaan dalam beragama, seperti ditegaskan (QS.Al-Kafirun/109: 6).

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.¹¹⁵

¹¹⁴Buku Pedoman Peraturan Bersama Kemenag & Mendagri RI, Jakarta: Sekretariat Badan Litbang dan Diklat RI Tahun 2006) h. 39.

Ayat al-quran ini memberi ruang kepada penganut agama untuk menganut agama sesuai dengan pelihannya tanpa ada unsur paksaan untuk menganut suatu keakinan. Dalam perspektif agama Kristen kerukunan agama dapat terlihat dalam kitab Mazmur 133: 1 di katakan :

"sesungguhnya alangka baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun", dan dalam Injil surat Roma 12:9-10 disebutkan " (9) Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.(10) Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat).¹¹⁶.

Hal ini di maksudkan hidup sesama manusia, bertetangga, bersaudara harus rukun dan damai sekali pun berbeda agama. karena semua manusia berasal dari ciptaan tuhan. Demikian juga dalam Al'qur-an (QS.Al-Hujraat/49 :13) di sebutkan bahwa manusia di ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai, secara normatif, Islam telah memberikan landasan teologis untuk melahirkan sikap hidup yang toleran inklusif, dan menghargai pluralitas.¹¹⁷

Konsep kerukunan umat beragama yang dimaksudkan adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melaksanakan upaya bersama dalam memelihara kerukunan beragama, dibidang pelayanan pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh mendirikan rumah ibadah, ormas keagamaan yang berbadan hukum yang terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan agama di tingkat daerah, Propinsi, Pusat Lewat Institusi Forum Kerukuna Antarumat Beragama (FKUB).

¹¹⁵Kemeterian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Fitrah Rabbani, h.603.

¹¹⁶Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB dan Terjemahan Baru (TB)* Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003), h.. 194

¹¹⁷Lihat M. Deden Ridwan, Dalam Kasman Hi. Ahmad, *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleran* (Ternate: UMMU Pres. 2004), h. 96 -97.

Peran institusi yang dibentuk oleh pemerintah ini sangat penting untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam membina umat beragama pasca konflik.

Kerukunan umat beragama dapat terwujud apabila memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, dan saling toleransi antar umat beragama
2. Tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu
3. Melaksanakan agama sesuai dengan agamanya, dan
4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan Negara.

Mencermati inti kerukunan agama tersebut, apalagi dalam kondisi Tobelo Halmahera Utara pasca konflik masih mencari bentuk kerukunan agama dalam masyarakat Tobelo, namun berdasarkan pengamatan penulis bahwa kerukunan agama dapat dikembangkan dalam bentuk kekeluargaan dengan pendekatan kearifan lokal *gia dutu* dan *gia nongoru*. Kondisi Tobelo dalam keadaan aman sekalipun masih ada insiden kecil yang sering terjadi, Pemerintah daerah dengan pihak terkait mengambil langkah-langkah strategi dalam penyelesaian konflik sekaligus sebagai langkah pembinaan kerukunan antarumat beragama di Tobelo. Dalam konteks Maluku Utara dan Negara Indonesia kerukunan sedang dalam keadaan yang tidak stabil kebinekaan kita sedang teruji, maka kerukunan agama merupakan kebutuhan bersama tidak dihindari ditengah perbedaan suku, agama dan budaya dan ras dalam rangka keutuhan NKRI.

Konteks ke Indonesiaan kerukunan agama pasca konflik di Tobelo Halmahera Utara, kerukunan agama saat ini merupakan kebutuhan bersama, justru tidak dapat dihindari di tengah perbedaan. Perbedaan bukan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama seyogianya harus bersifat dinamis, humanis, demokratis, agar dapat di transformasikan

kepada masyarakat golongan bawah tetapi juga kalangan atas tetapi harus secara umum karena kerukunan adalah tanggungjawab bersama.¹¹⁸ Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat antara pemerintah dan antar umat beragama.

Hambatan dan kendala yang dihadapi kerukunan agama Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya salah satu adalah rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, sikap fanatisme, tidak mau menerima perbedaan. adapun salusinya harus melaksanakan dialog bersama dan keterbukaan antara pemeluk agama, kemukakan sikap optimisme terhadap tujuan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama di Tobelo dan Maluku Utara pada umumnya.

Masyarakat Tobelo pasca rusuh atau konflik dengan berbagai pengalaman dan sukadukanya hidup dalam pengungsian dan ketakutan menghantau masa lalunya dan mereka berharap bahwa Suda saatnya untuk hidup bersatu, bukan perbedaan yang selalu dicari atau di bicarakan tetapi persatuan dan kebersamaan yang dapat dicapai. Kebersamaan hidup, saling menghormati, selaras, persamaan itu kita jalin selaturrehmi dan persaudaraan dengan begitu kerukunan agama dapat tercipta dengan baik dan harmoni dalam masyarakat Tobelo.

Agama tidak bisa dengan sendirinya dapat memecahkan masalah sosial kemanusiaan karena terkait dengan kondisi dan kultur yang sangat beragam karena agama merupakan salah satu faktor dalam kehidupan manusia. Mungkin salah satu faktor yang mendasar adalah memberi makna dalam kehidupan. Dalam hal keberagaman perlu adanya keterbukaan salah satu agama dengan agama lain sangat penting dalam bentuk dialog antar iman diantara Pemeluk Agama yang berbeda untuk mempersatukan persepsi tentang tujuan hidup bersama dalam masyarakat dan memaknai tentang arti kehidupan dan hubungan keberagaman, sehingga tidak menimbulkan sikap keberagama yang eksklusif dan mengurani sifat saling mengcurigai diantara pemeluk agama.

¹¹⁸<http://dicini.Wor.approch.Com/2012/01108> Kerukunan antarumat beragama.

Jenis Kerukunan antarumat beragama yang perlu dikembangkan: antara lain; pertama kerukunan antar pemeluk agama yang sama, kedua kerukunan antar umat beragama yang lain menjalin antar masyarakat dan pemeluk agama yang berbeda. Kondisi masyarakat Tobelo yang sudah terpolarisasi menurut penganut agama sendiri pasca konflik, dimana komunitas agama Kristen maupun Islam harus hidup bersama dan berbaur dalam suatu lingkungan atau daerah bersama untuk menciptakan solidaritas keagamaan maka di perlukan sikap toleransi dan keterbukaan singga kerukunan masyarakat dan agama dapat terjaling dengan baik diantara kedua komunitas agama Islam-Kristen di Tobelo. Manfaat kerukunan agama adalah : (1) Terciptana suasana yang damai dalam masyarakat, (2) Toleransi antarumat beragama dapat tingkatkan,(3) menciptakan rasa aman bagi agama minoritas dalam melaksanakan ibadah masing-masing, (4) Meminimalisir konflik yang terjadi mengatasnamakan agama.

Jenis dan manfaat kerukunan agama yang dikembangkan diatas, akan menjadi kendala yang dihadapi masyarakat seperti ; 1) Rendahnya sikap toleransi, sifat malas, dan menimbulkan paham teologis yang kaku dan keliru, 2) Kepentingan politik praktis sesaat yang memanfaatkan situasi dan kondisi, 3) Sikap Fanatisme terhadap agama, golongan dan radikalisme dalam paham keagamaan.

Solusi yang dapat ditawarkan pasca konflik ialah, bahwa Kerukunan Anatarumat Beragama di Tobelo Halmahera Utara perlu melakukan langkah-langka kongkrit dalam bentuk dialog antar pemeluk agama Kristen-Islam, dan harus bersikap optimis bahwa kerukunan antarumat bergama akan terjaling dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Rpublik Indonesia. Dengan demikian apabila kerukunan antarumat bergama dapat terjaga dengan baik maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai beriku :

1. Menjungjung Tinggi Kerukunan antar umat bergama di Tobelo Halmahera Utara
2. Selalu siap membantu sesama umat beragama dalam keadaan apapun tanpa melihat orang tersebut atau latar belakang agama maupun Budaya.

3. Memiliki sifat Hormati selalu kepada orang lain tanpa memandang agama yang mereka anut.
4. Menghindari sikap prasangka antara sesama umat yang hidup berdampingan.
5. Selalu menyelesaikan masalah dengan mengkedepankan cara bermusyawarah. Tanpa harus saling tunjuk dan menyalahkan.

1. Kerukunan Agama dalam Perspektif Budaya Lokal (*Hibua lamo*)

Budaya adalah istilah yang menunjukkan kepada semua aspek simbol yang dapat di pelajari oleh manusia termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum dan adat istiadat.¹¹⁹ Kebudayaan merupakan suatu keadaan atau proses peneyempurnaan diri manusia (*proses perfeksi*) dalam kaitan dengan nilai mutlak atau nilai universal tertentu.¹²⁰ Jika menggunakan defenisi ini, maka peran budaya pada intinya adalah menemukan dan mendiskripsikan kehidupan dan berbagai karya tentang nilai-nilai yang dianggap bisa digunakan untuk menyusun aturan waktu atau memiliki kondisi parmanen pada acuan manusia secara universal. Budaya dalam pengertian yang kedua, sebagai "*catatan dokumenter*", catatan teks dan paraktek budaya. Dalam defenisi ini, budaya adalah satu kerangka intelektual dan imajinatif, dimana pengalaman dan pemikiran manusia itu dicatat. Dengan menggunakan defenisi ini maka tujuan analisis budaya adalah memberikan penelian kritis. Hal in dapt membentuk analisis seperti yang pakai dalam "*ideal: suatu pegangkatan kritis sampai menemukan apa yang di sebut Arnol sebagai " sebuah pemikiran dan pernyataan terbaik"*".¹²¹ Dalam konteks sosial budaya merupakan suatu gambaran dari pandangan hidup tertentu.

Dalam konteks Budaya orang Tobelo Halmahera Utara sangat plural merupan suatu konsep yang mewjutkan kepada suatu masyarakat yang nuengedepankan pluralisme budaya.

¹¹⁹Lihat M. Atho Mudzar, dalam Kasman Hi. Ahmad, *Agama Kemamusiaan dan Budaya Toleransi* (Cet. I, Ternate: Ummu Press, 2004), h. 102

¹²⁰H. Amas Dinsie & Rinto Taib, *Ternate; Sejarah Kebudayaan & Pembangunan Perdamain Maluku Utara* (Ternate: LeKRa-MKR, 2008), h 33

¹²¹Lihat H . Amas Dinsei, h. 134

ini berubah ketika perjumpaan masyarakat yang modern (modernitas), sehingga pola pikir dan prilaku juga turut berubah, nilai toleransi juga turut dipengaruhi prilaku keseharian masyarakat dari yang memiliki pola hidup terbuka menjadi tertutup, dari hidup bersama/gotong royong ke individual dan materialistik ini salah satu dampak dari kemajuan modern. Cara berpikir sangat rasionalistik dalam melihat persoalan sosial, ekonomi dan pola prilaku masyarakat tidak terkecuali, termasuk agama. Agama dapat menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat yang sangat terbuka dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Pergeseran konsep toleransi beragama juga turut mempengaruhi kerukunan hidup beragama, karena di pengaruhi oleh persaingan hidup antar masyarakat maupun komunitas hidup agama terutama pola hubungan antar sesama warga, serta antar agama.

Pegeseran nilai kerukunan lain adalah perubahan masyarakat agraris ke Industri, ini mempengaruhi pemaknaan toleransi/kerukunan dalam memahami konsep beragama, jadi konsep toleransi/kerukunan tidak berubah, tetapi perubahan pada prilaku umat beragama".¹²⁵ Jadi konsep lama tradisional tidak harus ada keberanian untuk merekonstruksi kembali makna pengertian toleransi/kerukunan yang selama ini dipahami. Pergeseran juga ini sangat terasa pada nilai kemanusiaan, orang semakin tidak menghargai manusia terhadap manusia lain. misalnya dalam hal konflik atau rusuh orang saling membunuh, antar kedua bela pihak tidak saling mempedulikan satu sama lain apalagi berlainan keyakinan, adat dan budaya, termasuk suku. Semuanya buyar tidak berlindung pada tatanan konsep toleransi/kerukunan. Kecuali berharap pada nilai-nilai lokal setiap suku daerah yang berbeda, itupun menurut penulis bergeser makna atau nilai lokal sendiri tidak lagi mampu sebagai perekat kerukunan yang selami dikenl oleh kita sebuah sebagai nilai leluhur Bangsa dan agama hidup bersama , rukun dan damai, saling memberi dan mengasihhi sesama umat manusia. "Inti Agama yang benar

¹²⁵Mohammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa* (Yogyakarta, ITTAQA Press, 1999), h.137

adalah ialah sikap pasrah kepada Allah, Tuhan yang maha esa. Tanpa itu suatu keyakinan keagamaan tak memiliki kesejatian.”¹²⁶

Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, Inti Ajaran Islam: Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam inti ajarannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebaikan (fitrah) yang berpembawaan asal kebaikan dan kebenaran (hanif). Manusia adalah makhluk yang tinggi (sebaik-baik ciptaan), dan Allah memuliakan anak cucu adam ini serta melindunginya di daratan maupun di lautan.¹²⁷

Diantara Reformasi moral yang penting dalam sistem Nabi Nuhammad bisa ditemukan dalam bentuk pelarangan pembunuhan bayi ataupun nyawa manusia. Prakten pembunuhan bayi sebelumnya dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam. Demikian juga Inovasi politik utama Nabi Muhammad adalah pengakuan terhadap toleransi Agama.¹²⁸

Pandangan Kuntowijoyo dalam Sabri AR. Memberi warna baru dalam hubungan antar umat beragama atau toleransi beragama, nama, isi dan substansi baru untuk relasi antar umat beragama di Indonesia termasuk Maluku Utara. Dengan mempertimbangkan perkembangan studi agama kontemporer, jelas teologi kerukunan atau “toleransi” kian tidak relevan. Sebab, selain menimbulkan sikap apolitik. Juga kerukunan atau toleransi hanya cocok untuk masyarakat agraris, tetapi tidak sesuai dengan masyarakat industrial kerukunan itu mengarah ke dalam masyarakat beragama sendiri, berorientasi ke belakang ke zaman “normal” dan merujuk pada status quo.¹²⁹

¹²⁶Nurcholis Madjid, *Keislaman Yang Hanif* (Jakarta: Paramadina, 2013), h.24

¹²⁷Nurchalis Majid, h. 101, 287

¹²⁸George Walter Prothero, *Sejarah Islam Klasik : Perkembangan Islam dari Turki Hingga Afrika*; 2015, h.11

¹²⁹Mohammad Sabri, *Keragaman Yang Saling Menyapa*, h. 137, 163

Di samping itu, kecenderungan tentang adanya kemampuan lokal atau cara-cara “dari dalam” untuk memecahkan persoalan sangat dibutuhkan. Hal ini nampak misalnya, dalam respons berbagai pihak atas konflik yang terjadi di berbagai tempat yang cenderung menampilkan adanya kekuatan lokal.¹³⁰ Kearifan lokal merupakan kumpulan berbagai pengetahuan lokal yang digunakan oleh kelompok manusia menyelenggarakan kehidupannya, yang memuat prinsip, nasehat, tatanan, norma dan perilaku leluhur masa lampau.

Kearifan lokal tersebut terimplementasikan dalam berbagai sistem kehidupan yang meliputi hubungan kepada Tuhan, sesama manusia dan kepada alam. Keberadaan kearifan lokal dewasa ini, dianggap sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai macam kebuntuan dalam penyelesaian konflik, baik dalam skala lokal maupun nasional. Kearifan lokal seperti apa yang dapat menjadi solusi konflik, yaitu kearifan yang ditengarai mampu menciptakan suasana sejuk bagi pola dan interaksi antar umat beragama. Kearifan lokal sebagai alat perekat bagi sebuah masyarakat yang majemuk.

Menurut Muhammad Maftuh Basyuni dalam sambutannya yang dibacakan oleh H. M. Atho Mudzhar, pada upacara pembukaan dialog pengembangan wawasan Multikultural Antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di hotel Sahid Manado, antara lain mengatakan:

Bahwa masyarakat Indonesia yang pluralistik memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dinyatakan dalam ungkapan yang beragam. Kearifan ini menjadi salah satu acuan nilai di dalam mewujudkan dan memelihara kesejahteraan bersama dan keharmonisan sosial. Kita perlu mengkaji kearifan lokal yang telah ada di beberapa daerah. Di samping itu, kita perlu mengembangkan kearifan lokal baru (*new wisdom*) berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan perenungan kita terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa. Dari rangkaian dialog yang dilakukan selama tiga tahun, kita mencatat adanya berbagai kearifan

¹³⁰Irwan Abdullah, dkk., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, h.6.

lokal yang efektif membangun masyarakat yang rukun dan damai. Sebagai contoh, *dalihan na tulo* di Sumatera Utara, *siro yo ingsun, ingsun yo siro* di Jawa Timur, *Sipakalebbi* dan *Sipakataam* di Sulawesi Selatan, konsep *menyama braya* dari Bali dan konsep *rumah betang* dari Kalimantan Tengah.¹³¹

Di daerah lain misalnya Maluku/Ambon *Pela Gandong*, Ternate *Marimoi Ngone Futuru*, Tobelo Halmahera Utara *Hibua Lamo* sebagai perekat dan persatuan dalam membangun relasi antara nilai kearifan lokal dengan agama dan hubungan antar umat beragama. Berdasarkan pernyataan di atas, secara umum Indonesia memiliki sederetan kearifan lokal yang dapat digali dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Kearifan lokal tersebut merupakan salah satu alternatif dalam memecahkan problem konflik di Indonesia. Untuk itu, pengkajian akan kearifan lokal merupakan hal yang sangat penting di era sekarang.

Selama ini K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dikenal sebagai pelopor dalam mengintrodusir konsep Islam kultural di Indonesia. Menurut konsep ini, masyarakat muslim harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal di sekitarnya, karena prinsip universal dalam ajaran Islam mengharuskan mereka untuk mengakomodir budaya partikular yang hidup di tempat tinggal mereka. Pandangan seperti ini dimaksudkan, agar kehadiran Islam bisa membawa serta keramahan kepada lingkungannya. Gusdur tampaknya mengadopsi pendekatan kultur para muballig awal (wali) Islam.

Seperti diketahui bahwa para muballig tersebut menanggalkan perangkat simbol eksklusif Islam (Arab) dan menggantinya dengan perangkat simbol lokal. Mereka mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam simbol lokal, agar Islam dapat bersinergi dengan kultur Indonesia. Dengan akulturasi seperti itu, maka transformasi ajaran Islam ke alam pikiran masyarakat Indonesia bisa berjalan sangat efektif. Masyarakat Muslim Indonesia

¹³¹Irwan Abdullah, dkk., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, h. 9.

akhirnya memang dikenal menjadi komunitas yang paling sedikit penyerapannya terhadap simbol eksklusif Arab (*The lest Arabized Muslims*).¹³²

Pemahaman pada ajaran Islam dengan pendekatan kultur tersebut membuat Gus Dur menolak pembentukan institusi dengan label eksklusif Islam. Penolakannya terhadap pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI) membuktikan komitmennya untuk merealisasikan pandangannya tadi. Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencerminkan penolakannya terhadap institusi dengan label Islam. Tidak dijadikannya Islam sebagai asas partai dengan basis massa santri ini hakekatnya juga implementasi dari pemahaman keagamaannya sebagai deklarator partai ini. Tidak menjadikan Islam sebagai asas organisasi bukan saja menghindari terjadinya primordialisme agama, tetapi juga mendidik masyarakat (santri) untuk bersikap terbuka terhadap realitas plural di sekitarnya.¹³³

Sikap Gus Dur tersebut sangat berseberangan dengan pandangan kelompok Islam militan yang cenderung bersikap antagonistik terhadap budaya lain. Mereka hanya mengakui keabsahan produk budaya yang diperoleh melalui aktifitas internal masyarakat Muslim sendiri. Aktifitas itu pun baru bisa diterima menjadi bagian dari tradisi Islam yang "sah" setelah mendapatkan jastifikasi tekstual dari dua sumber hukum Islam (al-Qur'aan dan Sunnah) atau dari praktek kehidupan komunitas Muslim era ideal Islam (*The Islamic era par-excellence*). Pandangan eksklusif seperti ini kemudian membentuk sebuah model dialektika dikotomis antar Muslim (*Self*) dan non-Muslim (*Other*).

Pandangan dikotomis tentu saja berimplikasi buruk terhadap sikap sosial mereka kepada kelompok agama lain. Mereka misalnya, selalu bertindak reaktif terhadap kebijakan pemerintahan Gus Dur, yang berkaitan dengan kepeduliannya terhadap komunitas agama lain. Gus Dur memang tidak pernah bergeming dengan sikap reaktif tersebut. Sebagai

¹³²Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 3.

¹³³Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik Islam di Indonesi*, h.3-4.

presiden pada saat itu, Gus Dur yang harus mengayomi semua warga negaranya tanpa melihat dominasi agamanya, justru semakin meningkatkan peran pendekatan Islam kultural, agar komunikasi dengan semua kelompok agama bisa berlangsung dengan baik.¹³⁴ Prinsip dasar persamaan diantara manusia adalah kemerdekaan dan persaudaraan, kemerdekaan dan persaudaraan merupakan prasyarat dalam menjalin hubungan yang harmonis antara umat manusia, Oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) adalah salah satu inti ajaran agama.¹³⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat muslim harus mampu mengakrabi budaya di sekitarnya, karena prinsip universal dalam ajaran Islam mengharuskan mereka untuk mengakomodir budaya partikular yang hidup di tempat tinggal mereka. Dengan mengakrabi budaya lokal tersebut akan membawa dampak positif bagi upaya perdamaian di Indonesia. Keberadaan kearifan lokal dan sumbangsinya terhadap penanganan konflik di Indonesia nampak pada sinopsis dan indeks hasil penelitian Kompetatif Dosen PTAL. Kearifan lokal merupakan solusi atau alternatif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di daerah ini.

Tobelo terdapat beberapa suku bangsa Togutil modole, maupun sub etnik lain yang menganut agama Islam dan Kristen. Fenomena dan suasana kebersamaan dalam kehidupan umat beragama di masyarakat Tobelo yang tergolong petani dan nelayan yang masih tradisional membaur dalam kemajemukan etnis suku bangsa, sosial dan agama. Hal ini tampak dalam beberapa aktifitasnya; *pertama*, kerja sama sosial yang melibatkan antar umat beragama, seperti upacara perkawinan, pembukaan lahan/perkebunan, pembangunan sarana dan prasarana umum. *Kedua*, saling kunjung para tokoh agama ke Gereja atau Masjid, baik acara pertemuan antar tokoh, maupun acara biasa, atau non formal. *Ketiga*, jika ada seorang

¹³⁴Lihat juga Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Budaya* (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 3-15.

¹³⁵Adnan Mahmud, *Membentang Nalar Gusdur* (Jakarta: Orbit Publishing, 2016), h. 2,7

warga penduduk yang meninggal dunia, seluruh masyarakat akan membantu, dan menghormati jenazah hingga kepemakaman tanpa memandang perbedaan agama. Adapun faktor-faktor lain yang mendorong terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, antara lain: *pertama*, faktor tradisi (adat istiadat) yang sudah ada sejak nenek moyang mereka yang bercirikan sifat gotong royong dan tolong menolong. *Kedua*, faktor kekerabatan dipakai oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap sengketa melalui pranata perdamaian setiap adat, disebut *makawasa*. *Ketiga*, terbentuknya persepsi antara tokoh umat beragama, bahwa perbedaan agama merupakan hal yang wajar, dan harus diterima di tengah kehidupan masyarakat. *Keempat*, tidak ada propokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh/pemimpin maupun pihak ketiga.¹³⁶

Sebagai bandingan Hasil penelitian Afif Rifai, dkk., *Penyebaran Agama, Konflik dan Integrasi Antarumat Beragama di Desa Sumber Arum Moya dan Slemen Yogyakarta*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Desa Sumber Arum merupakan salah satu desa di kabupaten Slamen yang penduduknya majemuk dilihat dari agama yang dipeluknya, dengan jumlah 4426 orang beragama Islam, 2602 orang beragama Katolik, dan 48 orang beragama Protestan. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang rentang dengan konflik. Di samping itu, setiap umat sama-sama aktif melakukan pembinaan agama bagi para jamaahnya. Akitifitas tersebut memunculkan kecurigaan dan prasangka. Untuk itu mereka melakukan berbagai macam upaya seperti: menanamkan kepada umat untuk saling menghormati dan menghargai kepada umat yang berbeda agama; sosialisasi tentang pedoman dan penyiaran agama yang dikeluarkan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 dan tentang pembentukan wadah musyawarah antara umat beragama sesuai keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980; mengaktifkan kegiatan KCLKMD yang anggotanya berasal dari berbagai agama. Dengan

¹³⁶Zulkarnain, dkk, *Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggamo dalam Sinopsis dan Indeks Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2004), h. 5-7.

upaya tersebut maka integrasi antar umat beragama terwujud dalam berbagai lapangan kemasyarakatan, upacara lingkaran hidup dan hubungan-hubungan formal dalam organisasi. Hal ini dapat terwujud, karena masih berfungsinya institusi-institusi lokal sebagai sarana yang dapat mempertemukan berbagai aktivitas sosial dari berbagai pemeluk agama.¹³⁷

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sekurangnya terdapat tiga faktor utama, kenapa interaksi sosial dapat berjalan baik meskipun terdapat perbedaan agama, yaitu: *pertama*, pemahaman agama. Dari segi ini dapat dikatakan masyarakat Tobelo berhasil melakukan pemaknaan secara eksternal dan internal dalam kaitannya dengan agama yang dipeluknya maupun terhadap agama yang dipeluk oleh orang lain. Dalam bentuk pemaknaan secara internal, masyarakat tetap meyakini kebenaran agama yang dianutnya. Sedang secara eksternal, mengakui bahwa agama lain juga terdapat kebenaran yang seharusnya juga perlu diapresiasi. *Kedua*, adanya rasa kepemilikan budaya yang sama (*sense of common culture*). Dalam aspek ini masyarakat Tobelo memperlihatkan daya tahan kultural yang kuat sehingga kebudayaan asli desa, seperti gotong royong yang memperkokoh sosial di antara sesama warga tetap terpelihara. *Ketiga*, kepemimpinan yang akomodatif.¹³⁸ Hen Namotemo sebagai Jiko Makolona sebagai Bupati sekaligus sebagai ketua Adat Hibua Lamo.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, mengokohkan keberadaan kearifan lokal dan sumbangsinya terhadap penanganan konflik. Seperti tradisi gotong royong dan *musyawarah* sebagai media penyelesaian sengketa bagi masyarakat di Tobelo Halmahera Utara, berfungsinya institusi-institusi lokal sebagai sarana yang dapat mempertemukan berbagai aktivitas sosial dari berbagai pemeluk agama, serta adanya rasa kepemilikan budaya yang sama (*sense of common culture*) yang mengakar pada masyarakat di Tobelo Halmahera

¹³⁷Zulkarnain, dkk, "Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggano dalam Sinopsis dan Indeks" Hasil Penelitian Kompetitif Dosen (Jakarta: PTAI Tahun 1999-2003), h. 11-14.

¹³⁸Zulkarnain, dkk, Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggano dalam Sinopsis dan Indeks Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003, h. 29-31.

Utara. Untuk itu, sudah seharusnya kearifan lokal menjadi salah satu pilihan terbaik dalam penanganan konflik di Indonesia dewasa ini.

2. Potensi Konflik

Secara historis, masyarakat Tobelo masa lalu indentik dengan masyarakat halefuru (primitive) yang masih memakai Habeba atau koteka adalah masyarakat yang lugu, ramah, dan cinta damai dalam bingkai falsafah Hibualamo atau *Jou sengofa ngare* di Ternate Maluku Utara. Kesamaan bahasa dan budaya dapat mempersatukan masyarakat Halmahera Utara. Dalam berbagai faktor mereka dapat hidup berdampingan secara damai lewat ikatan kekeluargaan (*Geodutu/Duhutu*) dan perkawinan (*kawingi/Modhoka*) antara suku, kebersamaan (gotong royong), penghayatan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai kearifan lokal, hal ini merupakan faktor pendukung terciptanya kerukunan masyarakat (*Marimoi Ngone foturu*).

Suasana rukun dan damai tersebut diatas tidak dapat di pertemukan setelah Maluku Utara di landa kerusuhan horizontal tahun 1999/2000 dan berimbas ke Kota Tobelo, biasanya sampai keternate Maluku Utara. Maka semua fasilitas pemerintah maupun masyarakat turut hancur serta menimbulkan korban jiwa yang tidak bisa dielakan. Hal yang menjadi pemicu konflik atau potensi konflik antara lain:

a. Faktor Politik

Jauh sebelum terjadinya kerusuhan di Maluku dan Maluku Utara di berbagai daerah telah terjadi kerusuhan yang sama seperti di Poso, Sambas, Ambon dan kerusuhan lain di Indonesia. Kerusuhan lain di Indonesia, kronologis terjadinya kerusuhan di Maluku Utara ada yang menduga terkait dengan pembentukan Kecamatan baru di Malifut ketika peristiwa gunung berapi meletus di Makian Pulau dan mereka dipindahkan (eksedus) ke daratan Halmahera.

Pembentukan Kecamatan Makian dalam, terdiri dari 16 desa Makian yang mayoritas penduduk Islam, 5 Desa Kao dan 6 Desa Jailolo desa-desa ini mayoritas beragama Kristen penduduk Kao dan Jailolo untuk di masukan kedalam Kecamatan baru karena mereka yang menjadi minoritas sedangkan penduduk Makian mendesak supaya pembentukan kecamatan segera di wujudkan. Maka pada 18 Agustus 1995 secara di jure diresmikan. Menjadi Kecamatan Makian darat dengan pusat ibu kota Kecamatan di Malifut.

Hal yang paling mendasar upaya pemerintah Kabupaten Maluku Utara (24 tahun silam) memutuskan harus dimigrasikan orang-orang Makian karena ketika ancaman gunung berapi kie besi tahun 1975, ke Halmahera Maluku Utara. Langka ini ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai upaya untuk menghalangi penyebaran agama Kristen.¹³⁹

Potensi konflik yang lain, di Maluku Utara adalah keterlibatan pada elit politik dalam perebutan kekuasaan yakni korsi Gubernur, setelah penetapan propinsi baru yang terpisah dari Maluku. Maluku Utara dari Provinsi Maluku (Ambon) demikian juga Sultan Ternate memiliki harapan yang besar bahwa ia akan terpilih menjadi Gubernur, karena dapat di dukung dari partai (Golkar) serta dari para warga tradisional di Halmahera Utara, ia berpikir akan mendapat dengan mudah kursi Gubernur itu tanpa kesulitan tetepi dalam pemilihan Gubernur selalu gagal. Juga terlebihnya para elit politik lain, seperti Taib Armayn, Bahar Andili dan Abdul Gafur berperan penting dalam memainkan konstalasi politik di Maluku Utara saat itu.¹⁴⁰

Menurut bapak Yusuf Abdulrahman (Ketua MUI Provinsi Maluku Utara 2000-2008 almarhum) kerusuhan bernuansa agama, sejak itu mulai terjadi persaingan antar kelompok Islam dan Kristen kemudian merambak ke masalah politik. Sejalan dengan pandangan ini, menurut Tamrin Tomagola, persaingan perebutan wilayah agama antara Islam dan Kristen

¹³⁹lihat Syuhada Abdu, *Beragama Secara Kultural* (Harmoni Vol, III No 10, 2004), h. 117.

¹⁴⁰lihat, Harmoni, *Fenomena Demakrat Islam* (Vol III, No 12, 2004), h. 127.

di Maluku Utara telah berlangsung lebih 127 Tahun lalu, sejak misi Kristen menginjakkan kaki pertama kali di Tobelo, Halmahera Utara . wilayah Halmahera Utara kecuali Kecamatan Galela yang mayoritas Islam dapat di katakan sebagai wilayah umat Kristen yang jelas sama dengan wilayah Kesultanan Ternate.

Karena itu, ketika Suku Makian di pindahkan ke daerah paling selatan dari Halmahera Utara yang di kenal dengan Malifut pada tahun 1975 oleh pemda tingkat II Maluku Utara dengan persetujuan DPR dari II, pihak Kristen merasa terhambat untuk melakukan ekspansi ke wilayah Halmahera Tengah.¹⁴¹ Maka dengan sendirinya kegiatan misionaris Kristen pun turut terganggu. Dalam penyebaran agama Kristen dalam wilayah tersebut.

Faktor lain adalah pertarungan antara elit politik ketika Sultan ternate manufer sebagai ketua Golkar Maluku Utara, untuk memanfaatkan menuju pencalonan calon Gubernur, yang didukung oleh masyarakat adat sebagai pendukung utama baik di Kota Ternate maupun di daratan Halmahera dibawa kekuasaan Kesultanan Ternate. Demikian juga terjadi ketegangan antara pasukan Kuning (adat) dan Pasukan putih yang di dukung oleh kesultanan Tidore. Bigitu ketat tingkat persaingan antara penduduk asli dan pendatang menguasai persoalan ekonomi dan lapangan kerja demikian juga di birokrasi sera ketimpangan sosila lain, sehingga penduduk asli Ternate merasa terdesak dan tersingkir dalam pertarungan politik dan penguasaan pasar yang dikuasai oleh pendatang, Cina, Jawa, Sumatera, Bugis/Makassar dan Buton. Demikian pula di Tobelo Halmahera Utara sentral ekonomi di kuasai oleh Bugis, Makassar , Buton dan non pribumi Cina.

b. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang memicu terjadi kerusuhan di Maluku Utara adalah pemindahan orang-orang Makian ke daratan Halmahera Utara pada tahun 1975 karena ancaman gunung berapi kie besi maka terpaksa mereka di transmigrasikan oleh pemerintah ke daerah

¹⁴¹Lihat, Agus Salim, Damai yang Terkoyak, 2000, hal. 121s

Malifut. Sisi lain orang-orang Makian di kenal rajin dan progresif mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga Malifut menjadi komunitas masyarakat yang unggul menguasai tatanan ekonomi di daerah itu. Pemeratan penduduk lewat program transmigrasi berasal dari pulau Jawa yang ditempatkan di Kecamatan Kao, juga menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan antara penduduk asli dan pendatang mereka telah mengambil alih lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini mereka kuasai dari nenek moyang turun-temurun, apalagi masih berada dalam kawasan tanah Adat, khususnya suku pagu, modole dan togutil yang menguasai hutan sekitar Malifut, Kao dan Tobelo termasuk wilayah Perusahaan NHM.

Faktor lain adalah keberadaan perusahaan NHM Australia tahun 1990-an yang menemukan tambang emas di daerah Malifut dan banyak mempekerjakan orang-orang Makian sebagai buruh di perusahaan itu. Hal ini menimbulkan kecemburuan masyarakat Kao yang merupakan suku asli yang telah menetap di sana sejak ribuan tahun yang lalu. Akhirnya saling rebut wilayah mulai muncul antar suku Kao dan suku Makian kedua komunitas berusaha sedapat mungkin untuk dapat mengklaim bahwa mereka pihak yang paling berhak mendapatkan keuntungan dan keberadaan perusahaan tersebut.

Di samping faktor tersebut di atas, hal yang tidak kalah penting juga adalah klaim atas tanah adat (wilayah Kesultanan Ternate) maka mereka berhak mendapatkan bagian dari pertambangan emas, khususnya masyarakat Kao adalah bagian dari masyarakat adat kesultanan yang mendapat legitimasi dari Sultan Ternate. Bahwa mereka berhak mendapatkan wilayah itu dan mendapatkan bagian dari hasil tambang.

Bagi pemerintah Kecamatan Kao dan Tobelo kehadiran tambang emas dapat mendokrat pendapatan hasil daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kedua suku tersebut, akan tetapi kehadiran tambang emas NHM sebagai sumber pemicu kerusuhan sehingga merambah ke Kecamatan Tobelo dan Maluku Utara pada umumnya. Karena tumpang tindih dengan batas-batas sentimen agama menurut Tomagola penolakan

pihak penduduk asli atas PP 42/99 selain karena di latari oleh pengimbangan kuantitas antara umat beragama juga di dorong oleh keinginan monopoli hartah (hasil) tambang emas.¹⁴²

Sedangkan menurut Hengki toreh, penyebab utama kerusuhan yang melanda Maluku Utara adalah pembagian wilayah terus merambah ke politik tentang suksesi Gubernur pada akhirnya mengarah kepersoalan Agama.¹⁴³ Faktor ekonomi ini juga menjadi kunci dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat Tobelo Halmahera Utara.

c. Faktor Agama

Kehidupan keagamaan di provinsi Maluku Utara pasca kerusuhan relatif aman dalam menjalankan aktifitas keagamaan maupun peribadatan oleh umat beragama masing-masing Islam Kristen dan lain-lainnya lebih khusus Kota Tobelo sebagai kota Metro politan Mini. Sekalipun pernah ada gesekan mengatasnamakan agama pada saat konflik. Agama dijadikan sebagai legitimasi politik oleh pihak yang berkepentingan dengan seruan jihad maupun martir dalam konsep agama Kristen atau perang suci.

Potensi umat beragama di lihat dari sisi jumlah penduduk di Maluku Utara yaitu 822073 jiwa, 614 379 jiwa, (74,3 %) beragama Islam dari data tersebut menunjukkan Islam agama mayoritas di Maluku Utara, namun ada beberapan Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, Kecamatan yang merupakan mayoritas penganut agama Kristen protestan seperti di Kecamatan Sahu, Tobelo, Kao, Loloda, dan Kecamatan Ibu, sedangkan Kota Ternate adalah mayoritas penduduk beragama Islam berbanding Tobelo merupan penduduk mayoritas beragama Kristen.

Dengan jumlah populasi umat beragama ini , sejak lama terjadi benturang kepentingan selama lebih dari satu abad lamanya telah terjadi persaingan antar komonitas

¹⁴²Lihat. Agus Salim, Damai Terkoyak, h.122.

¹⁴³Harmoni, h.128.

Islam - Kristen semenjak misionaris belanda menapakkan kaki di Maluku Utara kira-kira 157 tahun yang lalu. Tobelo telah menjadi kantor pusat agama Kristen di Halmahera Utara. Hampir seluruh semenanjung Utara pulau itu penduduknya beragama Kristen, kecuali Kecamatan Galela dan Loloda Kepulauan. Ketika pemerintah Kabupaten mentransmigrasikan orang-orang makian yang beragama Islam di daerah Kao-Malifud yang hubungkan Halmahera Utara dan Halmahera Tengah, maka orang-orang Kristen menyangka pemindahan orang-orang Makian itu sebagai upaya untuk menghalangi penyebaran agama Kristen di jazirah Halmahera Utara.

Selama periode itu sengketa-sengketa kecil dan terbatas telah terjadi secara sporadik kedua belah pihak sama-sama berupaya mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Bestik kerusuhan di Maluku Utara yang menjadi penyebabnya bukan agama. hal ini di buktikan penduduk muslim di Kecamatan Kao ikut juga menyerang penduduk muslim Makian, demikian juga pasukan kuning di bawah komando Sultan Ternate dan pasukan putih di dukun oleh Sultan Tidore sama-sama muslim saling serang menyerang Kota Ternate pada waktu tahun 1999 Perang antara Pasukan Kuning dan Putih merupakan representasi umat Islam tidak berdaya di bawah tekanan para elit politik untuk mengukuhkan kekuasaan dan umat Islam Maluku menjadi obyek politik oleh pihak yang berkepentingan dalam menggunakan momentum ini secara cermat.

Hal ini di tanggapi persoalan politik dan kepentingan sesaat yang di ciptakan oleh para elit politik dalam kepentingan perebutan kekuasaan di Maluku Utara sehingga agama di jadikan sebagai legitimasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga perebutan wilayah agama Islam-Kristen di daerah Kao-Malifud dan trans Halmahera. Menurut Tomagola, persaingan perebutan wilayah agama antara Islam dan Kristen di Maluku utara telah berlangsung lebih dari 127 tahun yang lalu sejak messi Kristen menginjakkan kaki pertama kali di Tobelo Halmahera Utara. Wilayah Halmahera Utara kecuali kecamatan

Galela yang mayoritas Islam, dapat dikatakan sebagai wilayah umat Kristen yang jatuh sama dengan wilayah kesultanan Ternate.¹⁴⁴

d. Faktor Eksternal lain

Selain faktor konflik tersebut diatas, politik, ekonomi dan agama. Ada faktor lain konspirasi dan upaya Kristenisasi di Maluku Utara, perebutan wilayah agama, perebutan jabatan Gubernur, perebutan sumberdaya ekonomi /tambang Emas NHM, dan Faktor keterlibatan negara-negara luar koran Ternate Pos, 10-16/3/200: 4 mengutip sebuah sumber dari lapangan mengenai slogan yel-yel hidup Amerika, Australia dan Israil oleh kaum Kristen di kecamatan Tobelo dan Galela, Bahkan tertulis di tembok pemukiman Islam yang sudah terbakar dengan tulisan Tobelo Israil kedua. Issu ini segera beredar secara lisan dugaan keterlibatan negara-negara luar. Dugaan keterlibatan pihak negara luar ini jika terbukti benar, maka berarti pertikaian saat itu merupakan sebuah hasil konspirasi internasional bersama pihak kristen untuk memecah atau mengoyak-ngoyak kedaulatan R.I.¹⁴⁵ Tentu saja, hal ini lebih diketahui oleh pihak inteljen Indonesia, penulis hanya merekam data yang disajikan lewat sumber-sumber tertulis dan kondisi di lapangan pasca konflik seperti apa adanya.

Demikian pula keterlibatan beberapa oknum Kristen termasuk salah satunya Prof. Dr. Nanere, Msc, pendiri dan pemilik PLPP Tobelo, suatu lembaga yang bekerja sama dengan LSM luar negeri tokoh ini juga sebagai mantan Rektor Univ. Kristen Jakarta dan UNNIPATI Ambon, sering melakukan kontak dan hubungan dengan Belanda dan di duga keterlibatan dalam konflik Tobelo. Tokoh Kristen lain yang berpengaruh dan terlibat dalam tragedi kemanusiaan seperti yang dilaporkan oleh posko Peduli Umat yang berpusat di Wijaya

¹⁴⁴Faktor konflik : Politik, Ekonomi dan agama. Ada faktor lain adalah upaya Kristenisasi di Maluku Utara, Perebutan Wilayah Agama, Perebutan kursi Gubernur Maluku Utara dan faktor keterlibatan Negara-negara luar. Agus Salim Bujan dalam Kasman Hi.Ahmad(ed) *Damai Yang Terkoyak catatan Kelam dari bumi Halmahera* (Ternate: Podium, 2000). h, 120-123

¹⁴⁵ Lihat Agus Salim" Faktor keterlibatan negara luar" dalam Kasman Hi. Ahmad, *Damai Yang Terkoyak*. 2000, h. 123

Kusuma Kompleks pala Ternate seperti, HN, JH, SS.D, Piter Matahelamoal, SH (pengurus Gereja Katholik Ternate, kini Tobelo) dan yang lain-lainnya¹⁴⁶.

3. Potensi Kerukunan Antarumat Beragama

Secara umum kerukunan bermasyarakat dan beragama di Kabupaten Halmahera Utara relatif masih terpelihara dengan baik setelah kerusuhan beberapa tahun silam fenomena ini dapat di lihat di Kecamatan Tobelo, Galela, Loloda (Kabupaten Halmahera Utara), Pemerintah dan kemasyarakatan, maupun bagian keagamaan mulai dan saling toleransi antara satu agama dengan penganut agama yang lain. Menurut data Pemerintah Halmahera Utara bahwa sala satu bentuk kerukunan beragama adalah Do'a bersama, antara Pemerintah Kabupaten dan penganut agama yang lain, demikian pula Natal bersama maupun upacara-upacara keagamaan lainnya yang di hadiri kedua belah pihak, Umat Islam dan Kristen. Juga dalam pelaksanaan MTQ dan Pesparani.

4. Kondisi Aktual Kerukunan Masyarakat

Maluku Utara memiliki karakteristik masyarakat yang serba majemuk terutama di Tobelo sebagai metro politan mini, namun masih memiliki kepribadian yang dapat di jadikan sebagai alat untuk membangun kerukunan yaitu (Sistem pola kekerabatan atau Basudara) di mana masyarakat telah menyatu yang diikat oleh kesamaan keturunan darah, lewat perkawinan antar individu atau kelompok yang hal ini jauh lebih menonjol dalam pergaulan sosial meskipun satu sama lainnya berbeda budaya dan agama (*adat seatorang*).

Pola atau sistem kekerabatan ini yang dianut oleh masyarakat Tobelo sebagai wadah untuk menyatukan dan mempererat hubungan antar satu keluarga dengan keluarga lain baik menyangkut kelompok agama, budaya, suku maupun etnis yang berbeda. Hidup rukun dan damai serta toleransi yang tercipta dalam masyarakat. Sistem kekerabatan ini sangat berpengaruh dalam pergaulan masyarakat sehingga mampu meredam dendam dan kebencian

¹⁴⁶Lihat Mukhaer dan Nurdin, *Bara di Maaluku*, Yayasan Lukman Harun, 2000, h. 89

selama kerusuhan berlangsung, kini mereka dapat hidup bersama dalam lingkungan masyarakat yang berbeda agama dan budaya di Tobelo Halmahera Utara.

Kerukunan beragama pasca kerusuhan di Maluku Utara bila di bandingkan dengan di daerah lain seperti di Ambon dan Poso, (Sulawesi Tengah) atau diwilayah lain di Indonesia yang masih di landa konflik sosial kemudian kerukunan umat beragama di Tobelo dan Halmahera Utara sudah cukup kondusif lebih khususnya di Kota Tobelo dan Halmahera Utara secara keseluruhan di bandingkan dengan daerah lain kerana ada ikatan persaudaraan (*Giadutu/Gionongoro*) ini sebagai perekat perdamain dan dijadikan landasan resolusi konflik di Tobelo Halmahera Utara.

Keperhatinan hubungan antar umat beragama pasca konflik ini di ungkapkan oleh Olaf Schumann seorang teolog dan tokoh agama terkemuka yang sering mengunjungi Tobelo berkata bahwa yang penting bagi umat beragama adalah bagaimana mempererat hubungan tanpa mengintroragasi dan menghukumi keakinan orang lain. Bagaimana membangun toleransi dan meminimalkan konfrontasi. Umat Islam dan umat Kristiani yang kerap terperangkap dalam konflik seyogyanya terus meningkatkan kesepahaman dan kerjasama, bukan menyuburkan permusuhan dan buruk sangka.¹⁴⁷ Jadi membina hubungan dan menciptakan toleransi beragama antara Islam-Kristen sangat diharapkan untuk mengakhiri konflik di masyarakat Tobelo Halmahera Utara.

¹⁴⁷Olaf Schumann, *10 Ulama Berbicara Isa Al-Masih dan Ajarannya Membangun Kesadaran Kritis Hubungan Muslim Kristen* (Jakarta: Kompas- Gramedia, 2013), h.xxi

5. Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Ketidak Kerukunan

Pada dasarnya ada dua faktor besar yang menyebabkan ketidak rukunan umat beragama pertama faktor yang bersifat keagamaan dan kedua faktor yang bersifat non keagamaan. Antara lain:

a. Faktor yang bersifat keagamaan :

1. Penyiaran agama
2. Pantuan luar negeri
3. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda
4. Pengangkatan anak
5. Pendidikan agama
6. Perayaan hari besar keagamaan
7. perawatan dan pemakaman jenajah
8. penodaan agama
9. kegiatan atau gerakan kelompok simpalan
10. Tarnspransi informasi keagamaan
11. Pendirian rumah ibadah
12. Pdeologisasi agama dan penyalah gunaan simbol-simbol agama

b. Faktor yang bersifat non keagamaan

1. Kesenjangan ekonomi
2. Kepentingan politik
3. Ketidakadilan hukum
4. Kersaingan antara penduduk asli dan pendatang

5. Perbedaan nilai sosial budaya

6. Dan globalisasi budaya dan informasi

Ketidak rukunan umat beragama baik di sebabkan oleh faktor keagamaan maupun non keagamaan dapat bersifat lokal dan dapat di saksikan segera tetapi dapat pula suasana ketidak rukunan itu meluas kedaerah lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama antara Islam dan Kresten di Tobelo sebelum dan sesudah konflik ditandai dengan beberapa indikator misalnya: (1) keluarga kedua komunitas saling mengenal antara satu dengan yang lain (*makanako*), saling mengunjungi keluar masuk rumah secara bebas (*tahu fomateke ngosa*), (2) kedua komunitas keluarga merasa ikhlas atau bersih (*sinyinga datebi*), (3) bebas menjalankan ibadah (*bebas to ibadah*) (4) partisipasi pada kegiata keagamaan berjalan baik.

Jika kondisi sebelum konflik berlangsung secara alamiah, maka konflik kondisi tersebut sedikit bergeser. Proses komunikasi dua komunitas beda agama ditandai oleh, (1) Pomateke dosato (saling ikhtiar), (2) *O Jarak* dan *perasaan pomakajaha* (menjaga jarak dan perasaan) dalam kehidupan, (3) *I kurangka O Tahu Pomatekesupuwosa*, (masuk keluar rumah sudah mulai berkurang), (4) Menjalankan ibadah ritual secara aman dan damai, (5) Ada penonjolan simbol keagamaan, (6) Partisipasi masyarakat masih berjalan baik, namun digeser pada uang dan bahan.

Dua komunitas agama telah bebas menjalankan ibadah dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya, mereka saling iktiar, saling menjaga jarak, termasuk menjaga perasaan agar tidak saling tersinggung. Keakraban dan kekeluargaan tetap terpelihara dan tertanam secara utuh tanpa ada sekat-sekat yang membatasi.

Kerukunan Antarumat Beragama dapat terwujud kecuali terdapat beberapa unsur penting yang dapat terlaksana antara lain :

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, menghormati, dan saling toleransi antarumat beragama.
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
3. Melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agamanya yang dianut
4. Mematuhi Peraturan keagamaan baik dalam agama maupun Peraturan

Kerukunan Antarumat Beragama merupakan kebutuhan bersama tidak dapat dihindari ditengah perbedaan. Perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup bersama rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, harmonis, demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak tidak hanya kalangan atas, tetapi masyarakat bawahpun turut merasakan kedamaian, keadilan serta sejahteraan, dan kehidupan yang layak dan Harmoni.

C. Hubungan/Relasi Antarumat Beragama di Tobelo Halmahera Utara

Pasca Konflik hubungan antarumat beragama di Tobelo khususnya Kristen-Islam di Halmahera Utara merupakan sebuah hubungan yang memiliki latar belakang yang cukup kompleks untuk dipahami hanya sebagai sebuah realitas yang terbatas pada hubungan formal antar pemeluk agama semata. Pada kenyataannya hubungan tersebut terjalin dalam dua ikatan penting yaitu pertama hubungan kekerabatan dalam garis keturunan langsung dan kedua ialah dalam ikatan rasa persaudaraan anggota yang sama dari sebuah suku dan juga dari kampung yang sama hubungan pormordialisme.

Ikatan yang seperti disebutkan di atas melemah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa faktor penting dalam perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari masuknya pengaruh tertentu dalam kehidupan masyarakat Halmahera

Utara.¹⁴⁸ Perubahan terjadi di awal tahun 80-an dipengaruhi oleh keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1979 yang mengatur pelaksanaan penyiaran agama. Terbitnya SKB tersebut dapat dianggap sebagai sebuah respon terhadap meningkatnya jumlah pemeluk agama Kristen dimana peningkatan itu dilihat sebagai akibat dari gerakan misionaris Kristen yang didukung kekuatan dana dari luar negeri.¹⁴⁹ Di Halmahera sendiri sampai tahun 1979 secara signifikan terjadi peningkatan jumlah pemeluk agama Kristen. Peningkatan ini menurut Haire disebabkan oleh dua hal yaitu pertama usaha misi yang terus dilaksanakan oleh gereja dan kedua sebagai akibat dari pengaruh kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang mengharuskan masyarakat untuk memeluk salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Haire melihat bahwa pilihan masyarakat Halmahera untuk memeluk agama Kristen lebih banyak disebabkan oleh penolakan orang Halmahera terhadap dominasi pemerintahan regional Maluku Utara yang beragama Islam.¹⁵⁰

Meningkatnya jumlah pemeluk Kristen di Halmahera Utara dan keluarnya SKB memunculkan kecurigaan tertentu dari pihak Islam terhadap seluruh tindakan umat Kristen termasuk dalam kehidupan keseharian ditengah masyarakat. Kecurigaan seperti ini berdampak pada sikap umat Islam di Halmahera Utara yang mulai menjaga jarak dengan umat Kristen.

Selain SKB seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu faktor penting yang juga muncul adalah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Maret 1981 tentang larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal yang dilaksanakan oleh

¹⁴⁸ P. H. Thomas, pendeta Jemaat Kristen, Wawancara, Tobelo, 27 Nopember, 2014

¹⁴⁹ Alwi Sihab, *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 177

¹⁵⁰ James Haire, *Sejarah Gereja di Halmahera* (Jakarta: BPK.GM, 1992), h. 88-89

umat Kristen.¹⁵¹ Keluarnya fatwa tersebut mendapat respon yang cukup keras dari pemerintah Orde Baru karena dianggap dapat mengganggu hubungan antar pemeluk agama Kristen dan Islam. Pemerintah Orde Baru dalam hal ini Menteri Agama kemudian mengeluarkan pernyataan lain yang isinya tidak melarang umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal.¹⁵² Walaupun keluar pernyataan lain dari pemerintah namun fatwa tersebut tidak dicabut oleh MUI sehingga tetap dijadikan sebagai acuan oleh umat Islam. Fatwa tersebut telah juga membuat umat Islam di Halmahera Utara semakin membatasi diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristen. Bahkan kebiasaan untuk mengunjungi saudara yang merayakan hari besar keagamaan secara perlahan mulai hilang. Dalam sebuah wawancara Kasuba mengungkapkan "Para pendeta Kristen selama ini memanfaatkan makna kata toleransi itu untuk menjerumuskan ummat Islam agar mengikuti sebagian ajaran mereka dengan cara memasukkan dalam konteks toleransi kekeluargaan. Akibatnya batas syariat pun dilanggar.¹⁵³ Sebagai contoh, sebagian ummat Islam mau menerima menjadi panitia kegiatan Gereja, atau Natalan. Padahal batas syariat telah tegas dalam Islam. Masalah-masalah yang menyangkut ubudiyah dan ritual keagamaan harus ada batas yang tegas, *lakum diinukum wa liyadiin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku)".

Penerapan fatwa tersebut dalam kehidupan umat Islam di Halmahera Utara tidak dapat dilepaskan dari semakin menguatnya pengaruh Muhammadiyah dalam kehidupan umat Islam di Halmahera Utara. Sebelum era 80-an menurut S. S. Duan, di depan beberapa Masjid terdapat papan nama Ansor yang merupakan gerakan pemuda Islam yang bernaung dibawah

¹⁵¹Alwi Sihab, *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1998), h.181

¹⁵²Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), h. 122-123

¹⁵³Abdul Gani Kasuba, *Terus Jihad Sampai Hak-hak Kami dikembalikan*, Sumber <http://www.reocities.com/Augusta/fairway/9542/terus.htm>Hidayatullah Edisi Maret 2000 .

organisasi keagamaan Nahdatul Ulama (NU). Dalam perkembangannya organisasi ini kemudian menghilang dan baru muncul kembali setelah konflik berakhir.¹⁵⁴

Dari apa yang diungkapkan di atas menjadi jelas bahwa terdapat kecurigaan tertentu terhadap pendekatan kekeluargaan yang dibangun oleh orang Kristen terhadap saudara-saudara mereka yang beragama Islam. Seolah bahwa apa yang diperbuat dalam ikatan kekeluargaan adalah untuk mengaburkan makna pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan umat Islam. Kecurigaan terhadap pemanfaatan hubungan persaudaraan oleh umat Kristen membuat umat Islam membatasi diri dalam interaksi mereka dengan saudara Kristen. Cara-cara lama yang dipakai dalam ikatan kekeluargaan seperti saling mengunjungi antar keluarga semakin menghilang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut L. P. Duan, bahwa pada generasi yang lebih tua, saling mengunjungi dalam perayaan-perayaan keagamaan bukan hanya untuk saling mengucapkan selamat namun lebih dari pada itu dalam kesempatan seperti itulah para orang tua akan memperkenalkan anak mereka kepada keluarga yang mereka kunjungi. Dalam proses seperti ini terjadi pewarisan nilai kekeluargaan dengan upaya saling mengenal sebagai bagian dari keluarga yang melampaui ikatan agama.¹⁵⁵ Sayangnya bahwa hal ini sudah tidak terjadi lagi. Yang terjadi saat ini memang masih ada saling mengunjungi namun dilakukan dalam kelompok besar. Hal ini membuat tidak terciptanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Relasi antar umat beragama selama ini terjalin dengan baik perlu ditingkatkan lagi pasca konflik singga antara penganut Islam-kristen bisa duduk bersama.

Dengan latar seperti yang diungkapkan di atas menjadi jelas bahwa ikatan kekeluargaan dan kesukuan dalam masyarakat Halmahera Utara jauh sebelum terjadinya

¹⁵⁴S . S. Duan , Pendeta Pengurus SNODE dan Ketua FKUB Halut, Wawancara, Tobelo, 26 Nopember, 2014.

¹⁵⁵Pendeta S.S Duan Wawancara, Tobelo, 26- September, 2018.

konflik telah mengalami kemunduran. Ikatan kekeluargaan dan kesukuan tergeser oleh ikatan keagamaan yang menuntut pemeluknya untuk lebih terikat sebagai sesama saudara se-agama.

1. Pola Budaya (*Kekerabatan*)

Konflik jelas mempengaruhi makna dari hubungan kekeluargaan yang dipahami oleh masyarakat Halmahera Utara. Masyarakat Halmahera Utara mengenal setidaknya tiga hubungan kekerabatan yaitu kerabat geneologis (hubungan darah), kerabat *affinial* (perkawinan) dan kerabat sosial (kesukuan).¹⁵⁶ Sistem kekerabatan model ini terdapat juga dalam masyarakat Tobelo, hubungan kekeluargaan dalam garis keturunan yang sama merupakan sebuah faktor penting yang dipakai sebagai dasar untuk hidup bersama kembali sesudah terjadinya konflik. Hal seperti ini terlihat dalam proses pemulangan pengungsi ke tempat asal mereka. Dalam proses pemulangan tersebut, pihak yang menerima pemulangan baik dari Kristen maupun Islam menyeleksi nama-nama dari orang-orang yang akan kembali ke desa mereka. Mereka yang diijinkan kembali lebih dulu biasanya memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat dengan masyarakat yang menerima dan dianggap tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa konflik.¹⁵⁷

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam kurun waktu tertentu dengan berbagai pengaruh yang berkembang hubungan Kristen – Islam mengalami kemunduran. Situasi yang demikian membuat kesulitan tersendiri dalam upaya merekatkan kembali hubungan kekeluargaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Upaya menerima keluarga yang kembali setelah konflik dengan latar yang demikian jelas mengalami kesulitan tersendiri. Pada beberapa tempat, keluarga menerima kembalinya mereka yang mengungsi

¹⁵⁶J. W. Ajawaila, *Hibualamo; Upaya Mencari Jati Diri dalam S.S. Duan, Hein dan Hibualamo; Tobelo Pos Menelusuri Jejak Kepemimpinannya* (Tobelo : Tobelo Pos, 2008), h. 39

¹⁵⁷ S. S. Duan, Wawancara, Tobelo, tanggal 25 Mei 2018,

namun penerimaan tersebut tidak disertai perjumpaan dan komunikasi langsung dengan mereka yang kembali.¹⁵⁸

Pendekatan kekeluargaan setidaknya telah menjadi sebuah jalan masuk bagi upaya memulihkan relasi Kristen-Islam. Dengan berbagai hambatan hubungan tersebut coba untuk di tata kembali demi kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam kenyataannya relasi kekeluargaan yang tercipta sesudah konflik bergerak ke arah formalitas dengan mengutamakan penampakan dari hubungan tersebut. Masyarakat dari dua komunitas dalam hal ini menyadari bahwa agama yang mereka anut dan pengalaman konflik merupakan kenyataan yang tidak dapat begitu saja dihilangkan disamping kenyataan lain tentang adanya hubungan kekerabatan diantara mereka. Dalam perjumpaan langsung pendekatan kekeluargaan setidaknya merenggangkan sedikit dari ketegangan yang tercipta. Melalui perkunjungan dalam perayaan hari besar keagamaan dan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga seperti pernikahan dan juga dalam kedukaan masyarakat mencoba membentuk kembali kekerabatan yang ada.

Kenyataan di atas tidak menghilangkan kerentanan dari hubungan berdasar kekeluargaan tersebut. Walaupun masyarakat mencoba dengan cukup baik mendekatkan diri kembali dengan mengutamakan ikatan kekerabatan namun dalam kenyataannya belum ada kepercayaan yang sungguh-sungguh dapat meniadakan kecurigaan diantara mereka. Hal ini terlihat dalam beberapa isu yang muncul seperti beredarnya pesan singkat "Natal Berdarah", "Idul Fitri Berdarah", "Rencana Penyerang Balasan" dan beberapa isu lain dengan nuansa agama yang muncul dalam kehidupan masyarakat biasanya disikapi dengan kembali berdiri pada agama masing-masing. Selain itu dalam beberapa peristiwa seperti yang terjadi di Mamuya dimana perkelahian yang diawali oleh dua orang pemuda beragama Kristen dan

¹⁵⁸Pdt. F. R. Bawole, Wawancara, Tobelo, 20 Mei 2014 dan Pdt. W. Boloha, 26 Mei 2018).

Islam membuat situasi menjadi tegang dan berdampak pada masyarakat dari dua komunitas bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.

Selain isu-isu yang sering muncul, hambatan yang cukup mengganggu dalam menata kembali kehidupan bersama adalah pada persoalan makanan dan minuman. Bagi komunitas Kristen, sikap yang ditunjukkan oleh umat Islam dengan tidak makan dan minum di keluarga mereka yang Kristen menunjukkan penolakan mereka terhadap pihak Kristen. Dalam hal ini komunitas Kristen menganggap komunitas Islam memandang rendah mereka dengan anggapan bahwa makanan dan minuman yang dihidangkan oleh orang Kristen semuanya haram. Dengan memandang haram terhadap keramahan tersebut berarti sama dengan memandang rendah umat Kristen. Komunitas Kristen mengetahui bahwa pemeluk agama Islam tidak mengkonsumsi makanan tertentu yang dianggap haram dalam ajaran agama tersebut. Dengan pengetahuan ini komunitas Kristenpun tidak akan menghidangkan sesuatu yang dianggap haram oleh umat Islam dan karena itu penolakan ini dianggap sebagai penolakan secara langsung terhadap orang Kristen.

Bagi komunitas Islam, persoalan yang cukup mengganggu dalam relasi yang dibangun dengan pemeluk Kristen adalah pada soal penghargaan umat Kristen terhadap pelaksanaan ibadah puasa yang mereka jalankan.¹⁵⁹ Berpendapat bahwa ucapan selamat menjalankan puasa yang dipasang dalam bentuk baliho dan spanduk dari berbagai organisasi termasuk pihak Gereja hanya sebatas spanduk yang tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan nyata. Aktivitas rumah makan yang tetap buka di siang hari maupun sarana hiburan malam yang juga tidak berhenti beroperasi menunjukkan dengan jelas sikap dari tidak adanya *penghargaan bagi umat Islam* yang sedang menjalankan puasa. Bagi Tjan kekerabatan akan lebih indah jika pihak Kristen memberikan penghargaan terhadap ibadah yang sedang dilaksanakan.

¹⁵⁹ Saleh Tjan (Tabloid Tobelo Pos, 2006), h.7

Dari apa yang diungkapkan di atas jelas bahwa upaya membangun hubungan melalui pola kekerabatan antar pemeluk Kristen – Islam memiliki kendala tersendiri. Dalam relasi tersebut keraguan akan ketulusan masing-masing pihak untuk menjalin hubungan menjadi faktor penting yang menghambat relasi kekeluargaan tersebut. Rasa percaya dalam hal ini rupanya masih ada pada ikatan keagamaan.

Sikap komunitas Islam sendiri dapat dimengerti dari pemahaman mereka menyangkut ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran menyangkut hubungan persaudaraan. Bahwa kewajiban dan loyalitas terhadap keluarga hanya dikuatkan oleh ikatan moral namun hubungan persaudaraan sesama komunitas Islam disatukan dalam ketaatan kepada Tuhan.¹⁶⁰ Ketaatan terhadap Tuhan inilah yang menjadi pembenaran tunggal terhadap sikap yang dikembangkan dalam relasi dengan sesama saudara yang berbeda agama.

2. Pola Sosial (*Identitas Kesukuan*)

Telah disebutkan di atas bahwa identitas kesukuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan Kristen – Islam di Tobelo Halmahera Utara. Identitas ini bagai dua sisi dari mata uang yang sama. Satu sisi menampilkan kemungkinan untuk membangun kembali hubungan berdasarkan ikatan persaudaraan dari suku yang sama, namun di sisi yang lain menampilkan kecenderungan untuk merusak kembali upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempererat hubungan antar masyarakat yang berbeda agama.

Latar belakang sebagai anggota dari sebuah komunitas bersama yang dipersatukan oleh tradisi bersama memberikan kemungkinan yang cukup baik bagi masyarakat untuk saling menerima walaupun berbeda agama. Dalam hal ini penting dicatat bahwa upaya rekonsiliasi masyarakat Tobelo dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dalam ikatan kesukuan ini. Deklarasi damai yang ditandatangani oleh tokoh adat yang berasal dari Kristen

¹⁶⁰Dale F. Eickelmen dan James Piscatori 1998), h.99-100.

dan Islam pada 19 April 2001 tersebut dinyatakan sebagai sebuah deklarasi dari masyarakat adat.¹⁶¹ Hibualamo. Upaya ini tentu baik bahwa masyarakat berusaha bersatu dalam tatanan sebagai orang yang berasal dari latar belakang suku yang sama. Namun yang menjadi soal di sini adalah bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik yang berkembang dalam pemahaman masing-masing pihak bahwa konflik tersebut merupakan konflik bernuansa agama. Penyelesaian konflik dengan mengedepankan pendekatan adat merupakan sebuah bentuk penyelesaian yang menimbulkan soal sendiri karena konflik ini bukanlah sebuah konflik/perang adat.

Berbeda dengan deklarasi Tobelo, deklarasi damai Galela yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2001 dengan jelas menyebutkan bahwa deklarasi ini dilaksanakan oleh masyarakat dari dua komunitas yaitu Kristen dan Islam.¹⁶² Isi dari deklarasi tersebut bergerak dari sebuah kondisi masa lalu yang diharapkan tidak lagi terjadi ke kondisi masa depan yang lebih baik dengan mengedepankan ikatan sebagai sesama orang Galela. Dari sini jelas bahwa pendekatan yang dilakukan dalam deklarasi Galela adalah pendekatan yang tidak menghilangkan kenyataan masa lalu namun masa lalu tersebut menjadi sebuah peringatan penting untuk menata kehidupan bersama.

Dengan dua model deklarasi damai seperti yang disebutkan di atas jelas bahwa ikatan kesukuan sebagai sesama anggota masyarakat asli dianggap memiliki tempat tersendiri dalam membangun relasi masyarakat Halmahera Utara pasca konflik. Setidaknya dengan deklarasi tersebut masyarakat dari kedua komunitas dimungkinkan kembali untuk hidup bersama melampaui ikatan kekeluargaan.

Pendekatan hidup bersama dengan mengedepankan kesukuan bukan sesuatu yang tanpa masalah. Pada sisi yang lain identitas tersebut menjadikan masing-masing pihak merasa

¹⁶¹S.S. Duan, 2008: lampiran 2. Deklarasi Damai masyarakat adat Tobelo 19 April 2001.

sebagai pemilik yang sah dari tradisi masyarakat asli Halmahera Utara. Akibat dari hal ini adalah dalam beberapa peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat identitas tersebut dijadikan sebagai simbol tertentu dalam menghadapi sesama suku yang berbeda agama. Menjadi penting disini untuk mengungkapkan pendapat Gani Kasuba (2000) yang menyatakan bahwa Islam telah hadir ratusan tahun sebelum agama Kristen masuk dan karena itu umat Islam di Halmahera Utara harus mampu menyatakan keberadaan dirinya sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai penduduk asli Halmahera.¹⁶³

Pernyataan Kasuba tersebut jelas hendak menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang telah berakar lebih dulu dalam kehidupan masyarakat dibanding dengan agama Kristen. Dengan pernyataan ini pula maka Kasuba sebenarnya hendak menyatakan bahwa yang lebih berhak untuk berada di Halmahera Utara adalah umat Islam dan karena itu umat Islam di Halmahera Utara seharusnya mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai penduduk asli dan sekaligus sebagai pemeluk agama Islam dalam berhadapan dengan pemeluk agama Kristen.

Pernyataan Kasuba di atas dalam kenyataannya terlihat dengan jelas saat ini. Pada beberapa peristiwa kebanggaan sebagai orang asli yang beragama Islam dibenturkan dengan orang asli yang beragama berbeda dengan mereka dalam hal ini agama Kristen. Identitas kesukuan yang muncul secara berlebihan terkadang seolah hendak menyembunyikan identitas keagamaan yang sering menjadi pemicu dalam tindakan tertentu. Pada pemilihan ketua KNPI misalnya organisasi kepemudaan (OKP) terpecah dengan sangat sangat jelas berdasarkan identitas agama. Walaupun isu yang muncul dalam pemilihan tersebut adalah keharusan ketua KNPI dari orang asli Halmahera Utara namun sekat keagamaan dapat terlihat. Hans Loleng salah satu calon ketua KNPI yang didukung oleh OKP Kristen melihat bahwa isu agama dalam pemilihan tersebut merupakan hal biasa yang merupakan bagian dari

¹⁶³ <https://tobelo.marahai.wordpress.com>.

strategi dalam memenangkan pemilihan. Munculnya isu agama bukan saja datang dari kalangan Kristen tetapi juga dari kalangan Islam, bahkan turunnya penetapan dari pengurus Provinsi terhadap kandidat ketua dari kalangan Islam adalah karena isu yang dibawa oleh mereka ke pengurus Provinsi bahwa Islam tidak mendapat kesempatan yang cukup di Halmahera Utara.

Pengungkapan sebagai suku asli jelas memperlihatkan sebuah tuntutan pengakuan terhadap identitas keislaman bagi masyarakat Halmahera Utara. Terusirnya mereka dari beberapa tempat yang ada di Halmahera Utara membuat perasaan sebagai orang kalah menjadi beban tersendiri. Beban ini kemudian menjadi kendala sendiri yang pada gilirannya memicu konflik baru sebagai akibat dari keinginan untuk menunjukkan kemampuan sebagai orang asli Halmahera yang memiliki keberanian untuk berperang.

3. Dinamika Hubungan Kristen -Islam Pasca Konflik

iv. Birokrasi Pemerintahan

Pemekaran wilayah pada tahun 2003 membawa dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat di Halmahera Utara. Setidaknya pemekaran wilayah tersebut membawa harapan tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik melalui proses pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Sebagai daerah yang baru dimekarkan, tuntutan untuk melengkapi jumlah pegawai dan pejabat pemerintahan menjadi hal pertama yang mendapat perhatian masyarakat. Pada pengisian jabatan struktural pemerintahan misalnya, para pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu banyak didatangkan dari Provinsi. Hal ini terjadi karena jabatan-jabatan dalam pemerintahan memiliki prasyarat kepangkatan tertentu yang saat itu belum banyak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sorotan tajam masyarakat khususnya pihak Kristen adalah minimnya pejabat beragama Kristen yang diangkat. Masuknya pejabat-pejabat

tersebut dianggap sebagai 'titipan' pemerintah Provinsi yang dilihat oleh pihak Kristen memiliki agenda khusus. Kecurigaan yang demikian muncul didasarkan pada kenyataan bahwa Pemda Provinsi dikuasai oleh orang-orang dari etnis Makian yang terusir dari desa mereka pada peristiwa konflik. Pada sebuah kesempatan Pejabat Bupati saat itu yang beragama Kristen pernah mengungkapkan bahwa kondisi yang demikian harus diterima karena belum adanya Bupati definitif hasil pemilihan yang memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan pejabat yang akan membantunya.

Selain pejabat, hal yang juga menjadi sorotan adalah masuknya PNS dari daerah lain dalam Provinsi Maluku Utara ke Halmahera Utara dan pengangkatan pegawai honorer pada Pemda Kabupaten Halmahera Utara. Meningkatnya jumlah pegawai dari luar Halmahera Utara dan beragama Islam mengundang respon pihak Kristen yang melihat hal tersebut merupakan sebuah upaya pihak Islam untuk menguasai birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini pihak Kristen beranggapan bahwa kepentingan mereka tidak akan terakomodir dengan baik jika PNS-nya berasal dari luar dan beragama yang berbeda dengan mereka.

Jumlah kepala Dinas yang beragama Islam mendorong meningkatnya jumlah honorer beragama Islam. Disinipun menimbulkan persoalan tersendiri. Pegawai Honor yang diangkat sesuai dengan aturan yang ada kelak akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui proses tes. Banyaknya honorer beragama Islam mengundang perhatian pihak Kristen yang melihat bahwa ada usaha sistematis untuk menutup kesempatan bagi pihak Kristen untuk menjadi pegawai.

Tahun 2005 ketika Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan dilantik, terjadi perubahan yang cukup besar dalam birokrasi pemerintahan. Pelantikan Bupati definitif berdampak pada perubahan terhadap pejabat yang akan membantu Bupati dalam pemerintahan. Dari jumlah kepala dinas yang dulunya didominasi oleh pihak Islam berubah

dengan jumlah yang berimbang dari kedua komunitas keagamaan. Kenyataan ini memunculkan isu Kristenisasi birokrasi oleh Bupati yang berasal dari kalangan Kristen. Bagi pihak Kristen sendiri kondisi tersebut belum terlalu memuaskan karena jumlah pejabat Kristen yang masih sedikit. Menurut mereka pengisian jabatan tersebut haruslah proporsional. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan berdasarkan jumlah. Tidak mungkin sesuatu yang jumlahnya lebih banyak diberikan sesuatu yang sama dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak akan kekurangan dan jumlah yang sedikit akan berkelimpahan.

Dalam bidang penerimaan PNS, pihak muslim pun mulai menunjukkan reaksi. Proses penerimaan PNS menurut pihak Islam lebih banyak dari kalangan Kristen. Menurut mereka hal ini terjadi karena para Pejabat saat ini banyak yang berasal dari kalangan Kristen sehingga peluang terbesar untuk diterima sebagai PNS juga banyak dari kalangan Kristen. Selain itu dalam pengangkatan honorer menjadi PNS pihak Islam mencurigai adanya upaya untuk membatasi pengangkatan dengan berbagai kebijakan. Dalam hal ini kemungkinan untuk diangkat langsung menjadi PNS semakin kecil karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Pemda.

Isu yang juga cukup hangat adalah penggantian Sekda. Sekda Halmahera Utara yang memasuki usia pensiun pada tahun 2006 mengharuskan Bupati untuk mengusulkan Sekda baru kepada Gubernur untuk diangkat dalam jabatan tersebut. Jauh sebelum proses penggantian ini dimulai, isu tentang hal ini telah muncul. Jabatan Sekda dianggap strategis karena memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengatur pemerintahan. Salah satu koran di Halmahera Utara saat itu memunculkan tulisan yang cukup provokatif tentang keharusan Sekda beragama Islam demi memenuhi keseimbangan agama dari pejabat dalam pemerintahan. Respon pihak Islam memunculkan tanggapan dari pihak Kristen dengan merujuk pada Pemda Provinsi yang sama sekali tidak memiliki pejabat yang beragama Kristen namun hal tersebut tidak dipersoalkan oleh mereka. Karena itu jika menurut

keseimbangan maka seharusnya pihak Islam juga menyuarakan hal yang sama pada pemerintah Provinsi.

Selain itu isu yang juga penting pada awal pemekaran ini adalah rencana masuknya transmigran baru yang akan membuka perkebunan kelapa sawit. Transmigran yang rencananya didatangkan dari Jawa Timur tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana untuk menyeimbangkan jumlah pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen sehingga saat digelarnya Pemilihan Kepala Daerah pemeluk agama Islam dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan tersebut. Peran isu ini juga membuat ketegangan antar umat beragama, karena transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa mayoritasnya beragama Islam, yang akan menjadi penyeimbang penduduk muslim antara Kristen – Islam dalam pemilihan kepala daerah maupun Pilkada di Halmahera Utara.

Pasca rusuh menurut Bapak Nukri (50) pandangan masyarakat bahwa kondisi Tobelo tidak aman karena kedua belah pihak saling mencurigai Islam-Kristen, kondisi ini membuat hubungan antar umat beragama tidak harmoni, salah satu aspek adalah hukum tidak berlaku pada masa konflik mereka saling membunuh dan yang bersalah tidak di hukum yang berlaku adalah hukum rimba siapa yang kuat mereka yang menang.¹⁶⁴

Jadi pasca rusuh penanganan kasus dan pengawasan hukum sangat lemah sehingga masyarakat tidak terayomi dengan baik, termasuk kondisi terakhir pembakaran sekolah Al-Khairat Tobelo, pengusuran penduduk rawa jaya status lahannya masih tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat. Demikian juga watas wilayah Popilo- Meda soal potensi desa sampai saat ini belum tuntas. Pada hal masyarakat berharap kasus ini segera diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah dengan pihak yang terkait, sehingga tidak menjadi pemicu

¹⁶⁴ Nukri (50) Pekerjaan Buruh Kasar Pelabuhan, Wawancara, Tobelo, 4 Mei 2018.

konflik baru dan mengganggu harmonisasi masyarakat dan umat beragama secara keseluruhan di Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya.

v. Politik Praktis

Peristiwa yang cukup memperlihatkan dinamika dalam hubungan Kristen-Islam pasca Konflik di Halmahera Utara adalah pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan Kepala Daerah. Pada Pemilu tahun 2004 yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD isu agama muncul dengan cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Isu itu menyangkut pilihan terhadap partai berbasis agama dan agama dari calon yang akan dipilih oleh masyarakat.

Dalam isu partai berbasis agama, masyarakat digiring pada pemikiran bahwa partai dengan latar belakang agama merupakan wakil dari agama tertentu untuk masuk dan terlibat dalam pemerintahan. Bahwa dengan memilih partai tersebut disamping menjamin bahwa yang dipilih adalah orang yang se-agama juga akan menjamin bahwa kepentingan mereka sebagai pemeluk agama tertentu akan diperjuangkan dengan benar. Pandangan yang demikian sebenarnya dimunculkan sebagai bentuk perlawanan terhadap partai-partai yang tidak berdasar pada agama tertentu. Bagi partai agama, partai-partai non-agama tidak memiliki perhatian yang cukup pada kepentingan golongan agama karena partai tersebut akan selalu mencari jalan kompromi dari berbagai kepentingan.

Salah satu partai agama yang dalam pemilu 2004 dianggap mewakili kepentingan Kristen adalah Partai Damai Sejahtera (PDS). Kehadiran partai tersebut di Maluku Utara menurut Ruddy Tindage, yang merupakan salah satu inisiator berdirinya PDS di Maluku Utara dimaksudkan untuk membuka peluang bagi politisi Kristen dalam bersaing dengan politisi dari agama lain. Pada saat itu sebagai daerah pemekaran maka otomatis pembentukan partai di tingkat Kabupaten akan selalu melibatkan pengurus partai ditingkat Provinsi. Dengan kondisi pasca konflik maka dapat dipastikan bahwa politisi Kristen akan cukup sulit

mendapatkan tempat pada partai-partai yang telah ada. Disamping itu pula dengan sistem Pemilu yang masih mengutamakan nomor urut calon maka kemungkinan besar politisi Kristen tidak akan mendapat nomor urut yang dianggap berpeluang besar untuk terpilih.

Isu yang juga muncul adalah soal unjuk kekuatan dari komunitas Kristen. Wacana yang dibangun dalam isu ini adalah orang Kristen harus menunjukkan bahwa mereka adalah mayoritas di Halmahera Utara melalui keterwakilan mereka sebanyak mungkin di DPRD. Jumlah yang mayoritas di DPRD dianggap dengan sendirinya akan menunjukkan kepada daerah lain bahwa Halmahera Utara adalah daerah yang penduduknya mayoritas Kristen. Disamping itu tentunya dengan semakin banyak anggota DPRD dari partai Kristen tersebut maka kepentingan komunitas Kristen menjadi prioritas dalam pembangunan di Halmahera Utara.

Agama dari calon wakil rakyat yang akan dipilih juga menjadi isu penting yang muncul. Seolah bahwa calon yang dipilih akan mewakili kepentingan agama mereka dalam berhadap-hadapan dengan calon dari agama lain. Keyakinan untuk membela kepentingan golongan agama yang mereka wakili juga terlihat dari pandangan pribadi anggota DPRD. Menurut Novino Lobiua bahwa motivasi awalnya untuk ikut dalam proses pemilihan adalah demi mengawal perjuangan yang telah mereka upayakan bersama.¹⁶⁵

Isu agama kembali muncul dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2005. Munculnya 5 calon Bupati yang bersaing dengan 3 calon beragama Kristen dan 2 calon beragama Islam menimbulkan kekawatiran tersendiri bagi pihak Kristen bahwa dengan jumlah calon yang lebih banyak maka suara komunitas Kristen akan terpecah pada 3 calon yang ada. Hal ini dalam pandangan komunitas Kristen akan menguntungkan calon yang beragama Islam jika suara dari pihak Islam bersatu pada salah satu pasangan calon yang maju. Kekawatiran

¹⁶⁵Novino Lobiua, Wawancara, Tobelo, 15 Juni 2014.

komunitas Kristen ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mempertemukan calon beragama Kristen. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan meminta Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) bertindak sebagai mediator dalam pertemuan tersebut.¹⁶⁶

Pada Pemilu tahun 2009 yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD isu agama mulai mereda. Masyarakat dalam hal ini nampaknya mulai memahami bahwa kepentingan mereka yang dijanjikan untuk diperjuangkan oleh Partai dan anggota DPRD yang mereka pilih hanya sebatas janji yang tidak terwujud dalam realitas langsung. Selain itu sikap anggota DPRD yang mempertontonkan kemewahan hidup ditengah masyarakat yang masih lemah secara ekonomi membuat penolakan tersebut semakin besar. PDS dalam hal ini yang memperoleh dukungan terbesar dari masyarakat Halmahera Utara dengan perolehan delapan kursi DPRD pada pemilu 2004. Bila dibandingkan dengan partai yang berlambangkan Islam. Anggota Legislatif Halmahera Utara pada pemilu 2015, terpilih menjadi Anggota DPRD berjumlah 25 orang dari berbagai partai politik, namun yang beragama Islam hanya 9 orang selebihnya beragama kristen 16 orang. Presentasi Partai berbasis idologi Islam PPP 1 orang, PKB 1 orang dan PKS 1 orang Jumlah anggota DPR 3 orang. Selebihnya partai berhaluan Nasionalis berjumlah 22 orang. Apalagi Bupati Halmahera Utara Tiga priode berturut-turut beragama Kristen.¹⁶⁷

Hal yang sama juga terjadi pada Pilkada tahun 2010. Isu agama dalam proses pemilihan ini masih tetap muncul walaupun dengan tekanan yang lebih lemah dibandingkan pada Pilkada sebelumnya. Dari 5 calon Bupati yang maju dalam Pilkada, empat orang calon beragama Kristen dan satu calon beragama Islam. Menurut Rusman Soleman yang terpilih

¹⁶⁶M.D. Boediman, Wawancara , Tobelo, tanggal 14 Juni 2015.

¹⁶⁷ Bahardi Ngongira, Anggota DPR Gerindra, Wawancara, Tobelo, 3 Maret 2017

menjadi wakil Bupati bahwa jika isu agama yang kuat pada Pilkada ini maka otomatis satu calon yang beragama Islam pasti akan terpilih karena suara Islam akan bersatu pada satu calon tersebut.¹⁶⁸ Dalam hal ini menurutnya masyarakat sudah semakin dewasa untuk tidak lagi terpengaruh oleh isu-isu agama.

Hubungan antara politik dan agama hanya muncul dalam sebuah negara yang tidak homogen secara agama, Pernyataan seperti ini setidaknya memiliki nilai kebenaran tertentu ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa munculnya isu-isu pada pentas politik dengan latar belakang agama dipengaruhi oleh hubungan antar agama yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Isu-isu tersebut dipakai untuk memperkuat identitas keagamaan yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses pemilihan. Agama dalam hal ini jelas menjadi identitas pembeda antar sesama anggota masyarakat. Seolah bahwa dengan memimpinya seorang dari agama tertentu akan membawa keuntungan yang besar kepada masyarakat yang memiliki agama yang sama dengan pemimpin yang dipilih.¹⁶⁹ Dierah demokrasi pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak jadi tidak ada alasan menjadi pemimpin Gubernur atau Bupati harus berdasarkan agama tertentu ini yang harus di pahami oleh masyarakat Halmahera Utara. Tapi realitas menunjukkan bahwa masyarakat Tobelo adalah mayoritas beragama Kristen maka wajar setiap pesta demokrasi mereka akan memenangkan pertarungan pemilihan DPRD Maupun Pemilihan kepala daerah di Halmahera Utara. Terbukti dari tiga periode pemilihan kepala daerah Halmahera Utara menjadi Bupati adalah beragama Kristen Hen Namotemo dua periode dan Frans Nanere satu periode sampai 2019. Umat Islam tetap kalah bertarung dalam kompetisi pemilihan kepala daerah karena umat Islam secara kuantitatif adalah penduduk minoritas di Tobelo sehingga tidak mampu bersain secara politik maupun dalam bidang lain.

¹⁶⁸Rusman Soleman, Wakil Bupati, Wawancara, Tobelo.

¹⁶⁹Hotman M. Siahaan, *Agama dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia* (dalam Einar M. 2005), h. 8.

4. Nilai-nilai Kearifan Lokal

a. Hibualamo sebagai “Perekat sosial”

Masyarakat Hibualamo mengalami pencitraan sebagai komunitas lokal, kepercayaan pribumi, dan lain sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada ajaran yang masih mempertahankan keyakinan leluhur mereka, atau dalam istilah Christian Pelras disebut sebagai penganut aliran kepercayaan pribumi.¹⁷⁰ Pada dasarnya, terdapat banyak pemaknaan tentang lokalitas. Lokal biasa diposisikan atau dipersandingkan dengan global, ia juga sering diperhadapkan dengan pusat. Dalam konsep Marx dalam Ahmad Baso dikenal istilah *centre* dan *periphery*, tengah dan pinggiran. Tengah adalah pusat dari kekuasaan biasanya direpresentasikan dalam bentuk negara, sementara di luar pusat adalah pinggiran yang biasanya menjadi obyek atau korban dari pusat.¹⁷¹

Identitas kelokalan sesungguhnya adalah permainan diskursif dari pusat. Menurut Koentjaraningrat, penyebutan *primitif* dan *savage* (liar) bagi komunitas non – Eropa adalah politik pencitraan yang dilakukan oleh Barat terhadap Timur. Dalam konteks ini, masyarakat Barat memosisikan diri mereka sebagai pusat dan penentu. Identitas bangsa lain yang secara kultural berbeda dengan Barat kemudian diberi label sebaliknya. Primitif bagi Eropa berarti liar, kolot, terbelakang, bodoh dan kumuh. Primitif adalah kebalikan dari Eropa yang beradab, modern, maju, cerdas dan bersih. Oleh karena itu, masyarakat Eropa merasa berkewajiban untuk mensucikan atau *men-civilized*-kan mereka yang primitif agar sama seperti masyarakat Eropa, sehingga lahirlah kolonialisme.¹⁷²

Berangkat dari logika di atas, maka masyarakat Hibualamo diposisikan sebagai yang lokal mengalami politik pencitraan dari pusat dalam hal ini negara dan agama Islam. Mereka

¹⁷⁰Christian Pelras, *The Bugis*, diterjemahkan Abdul Rahman Abu, dkk., *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h.209

¹⁷¹Lihat, Ahmad. Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, (Jakarta. Desantara, 2002), h.

¹⁷²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 5

diklaim animis/soamoiwo dan tidak beragama. Pertanyaannya adalah siapa yang tidak primitif (kafir) dan kemudian mengklaim yang lain sebagai masyarakat habeba atau kafir (*Soha mogiowo*)? Hibua lamo yang telah memiliki norma-norma tersendiri diklaim sebagai 'sesat' karena mereka berbeda dengan Islam. Secara kebetulan Islam sebagai agama dominan memiliki struktur kuasa, seperti pemerintahan dan sebagai kelompok mayoritas yang digunakan untuk mendelegitimasi kepercayaan masyarakat Hibua lamo.

Di samping itu, pemetaan ada agama *samawi* (langit/wahyu) dan agama *ardi* (bumi/bukan wahyu), tentu mengundang masalah. Sebab relakah (penganut agama-agama) yang dikelompokkan sebagai agama *ardhi* menerima pemetaan tersebut? Pemetaan tersebut tersosialisasi di kalangan umat melalui studi ilmu perbandingan agama.¹⁷³

Bila keadaan yang digambarkan di atas – yang terdapat di kalangan umat Islam- dibawa kepada persentuhan dengan agama-agama bukan Islam, bisa dibayangkan seberapa parah dan buruk bentuk dan akibat dari persentuhan tersebut. Agama selain Islam semuanya tergolong sesat dan tidak sedikit di antaranya dipandang sebagai agama ciptaan manusia belaka (*ardhi*). Apakah keadaan seperti itu juga terjadi di dalam kalangan agama-agama selain Islam, adalah pertanyaan yang patut dikemukakan mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran bersama tentang pluralitas masyarakat. Sebab, dalam keadaan seperti itu, menjadi mustahil untuk berbicara mengenai peranan para aktifis agama-agama di tengah masyarakat yang majemuk.¹⁷⁴ Agama secara substansial dapat di pahami secara umum tidak ada perbedaan. Tapi dalam tataran doktrinal ada perbedaan masing-masing Agama.

b. Nilai-nilai kearifan lokal dalam Hibualamo

¹⁷³ Moch Qasim Mathar, "Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa Depan". Orasi Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat dan Pemikiran Modern dalam Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007. h. 3

¹⁷⁴ Moch Qasim Mathar, "Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa Depan", h. 3-4.

Menurut Y.B Mangunwijaya dalam bukunya *Ikan-Ikan Hiu, O Ido de O Homa* sebagaimana dikutip Yesaya Banari ¹⁷⁵, di jelaskan bahwa sejak abad XII masyarakat Tobelo telah mengenal sistem kekerabatan melalui pembangunan *halu* sebagai tempat tinggal bersama. *Halu* adalah rumah tempat tinggal yang ditempati bersama bagi beberapa ke'uarga yang masih memiliki pertalian marga dalam beberapa marga ataupun juga hanya satu marga, dan bilamana ada penambahan anggota keluarga maka dibagian pinggirnya dibangun sayap-sayap untuk ditempati. Pada bagian tengah dijadikan tempat untuk musyawarah dan juga sering digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pemujaan bagi para leluhur.

Pada etnik Galela juga mengenal *Bangsaha* yang fungsinya sama dengan Halu di Tobelo. *Bangsaha* juga rumah tempat tinggal bagi sebuah keluarga besar, jika ada keluarga baik anak, cucu, dan lainnya yang masih pertalian marga berumah tangga (menikah), dibagian pinggir dibangun sayap-sayap untuk ditempati oleh mereka. Namun di *Bangsaha* yang menempati rumah besar di tengah pihak keluarga yang laki-laki, dan disayap biasanya pada pihak keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa maskulinisme sangat dominan pada *Bangsaha*. Kaum lelaki dianggap memiliki tanggung jawab keluarga, kehormatan keluarga, serta kekuatan fisik yang mampu menyelesaikan ekonomi keluarga. ¹⁷⁶

Sementara etnik Loloda menyebut *Salu* sebagai tempat yang berbeda dengan Halu dan *Bangsaha*. *Salu* lebih pada sebuah tempat dimana dalam waktu-waktu tertentu masyarakat etnik Loloda berkumpul bermain pantun (berbalas pantun). Isi pantun itu berkaitan dengan tamsil kehidupan, seperti cinta dan pencarian jodoh, masalah perkawinan, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat etnik Tobelo dan Galela menjadi komunitas yang lebih besar, karena itu para *hoana mahaeke* sering berkumpul pada saat-saat tertentu untuk membahas masalah-masalah dalam masyarakat khususnya mengatur

¹⁷⁵Lihat. YB. Mangunwijaya, *Ikan-Ikan Hiu Ido Homa* (Jakarta Sinar Harapan, 1983), h.10.

¹⁷⁶Asri Ramli dan Jasmin Rainu Tokoh Masyarakat; wawancara, Selasa 3 Oktober 2018 (Asri Ramli dalam kasitasnya sebagai salah satu pengurus MUI dan FKUB Halut)

tatanan kehidupan bersama. Dari kegiatan itulah fungsi *halu, bangsha dan salu* mulai mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan kemudian pada tatanan yang lebih besar maka dari ketiga etnik tersebut dikembangkan menjadi *Hibualamo* sebagai rumah besar ataupun tempat berkumpul untuk musyawarah bersama dalam membicarakan persoalan-persoalan masyarakat Halmahera Utara.

Dari tradisi ini *Hibualamo* kemudian menjadi dasar hidup bersama yang diakui sebagai pola hidup masyarakat dalam beberapa *hoana* sehingga ketika ada masalah dalam masyarakat maupun kegiatan ritual dan acara-acara perkawinan, *Hibualamo* adalah tempat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan beberapa etnik di Halmahera Utara, seperti pada tanggal 19 Juni 2012 di selenggarakan acara *Hibualamo* dengan makan bersama di Tobelo. Acara ini dihadiri oleh seluruh etnik yang berada di Halmahera Utara seperti Tobelo, Galela, Loloda, Kao, Sulawesi, Buton dan lainnya. Di sinilah simbol-simbol pemersatu etnik ditampilkan seperti masing-masing etnik menampilkan makanan-makanan adat.¹⁷⁷

Dalam hubungan dengan nilai-nilai dimaksud, peneliti melihat adanya keistimewaan yang di miliki masyarakat *Hibualamo* dalam sikap hidup bermasyarakat yakni hubungan antar sesama manusia selalu dijunjung tinggi melalui falsafah "*Ngone O Ria Dodoto*". Falsafah ini mengandung makna sangat mendalam di mana semua manusia memiliki kesamaan derajat di dunia tanpa ada perbedaan. "*Ngone O Ria Dodoto*" merupakan suatu penghargaan terhadap sesama yang dapat diartikan dengan satu "Ibu" atau "sekandung" sehingga ketika menyakiti yang lain berarti menyakiti saudara sendiri karena itu para "orang tua" tidak setuju dengan perbuatan dimaksud.

Konsep "orang tua" dalam kehidupan masyarakat *Hibualamo* tidak sebatas ayah ataupun ibu, tetapi orang tua dalam arti yang lebih luas yakni menyangkut ayah, ibu dan para

¹⁷⁷ Sadrak Tongo-Tongo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tobelo 1 September 2018.

leluhur sebagai “*the supreme good*” yang sangat dihargai. Karena itu mengasihi sesama berarti mengasihi orang tua atau leluhur dan sebaiknya jika menyakiti orang lain berarti menyakiti orang tua atau leluhur.

Dari nilai-nilai adat tersebut terdapat seluruh tata krama bagi masyarakatnya yang sangat penting bagi segala tingkah laku masyarakat secara komunal maupun individu. Begitu pentingnya peran tata krama dalam hidup bermasyarakat sehingga setiap orang wajib mengedepankan tata krama dan bahkan telah menjadi hukum yang dipatuhi. Penuturan seorang informan bahwa Tata krama adalah apa yang menjengkelkan atau menyejukkan, yang busuk atau yang suci, yang mulia atau yang nista, yang barbar atau yang menghaluskan kita, yang bekerjanya konstan, mantap, seragam, dan tidak tampak, seperti udara yang kita hirup. Tata krama memberi bentuk dan warna pada seluruh kehidupan kita. Menurut kualitasnya, tata krama itu membantu moral, mendukungnya, atau sama sekali menghancurkannya. Dengan demikian kita harus menjunjung tinggi tata krama dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat di Halmahera Utara.¹⁷⁸

Bentuk hubungan inipun terdapat dalam falsafah *Hibualamo* “*Ngone O Ria Dodoto*” yang di dalamnya mengutamakan relasi antar sesama dan dengan leluhur sebagai sumber kasih sayang, sehingga pada prinsipnya martabat manusia mendapat tempat yang paling utama dalam ranah kehidupan antar sesama. Ketika melihat realita masyarakat *Hibualamo* saat ini dengan pluralisme agama dan juga suku maka kami peneliti melihat bahwa nilai-nilai ataupun lima “mutiara” pemberian Tuhan bagi komunitas masyarakat *Hibualamo* masih sangat relevan untuk dipertahankan kelanggengannya. Sebab dalam situasi dewasa ini kesadaran mengenai pluralisme agama, suku ataupun budaya sangat dibutuhkan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Halmahera Utara.

¹⁷⁸Dr. Kasman Hi. Ahmad, Akadimisi dan Politisi Halut, wawancara, Tobelo, tanggal 29 Oktober 2018

Pluralisme pada dasarnya merupakan suatu doktrin yang melandaskan pada prinsipnya bahwa dalam setiap masyarakat, tidak ada satupun sebab yang bersifat tunggal (*monism*) atau ganda (*dualism*) bagi terjadinya perubahan masyarakat. Dalam pluralism diyakini bahwa ada banyak sebab yang dapat menyebabkan munculnya gejala social atau perubahan social dalam suatu masyarakat. Karena itu pluralisme mau menggambarkan suatu masyarakat yang kompleks dengan berbagai identitas tetapi berada dalam lingkaran integritas yang utuh tanpa mempertentangkan ciri khas tiap individu ataupun kelompok dalam satu komunitas.

Pluralisme agama di dunia ini terdapat keterkaitan satu dengan lainnya di mana melalui tradisi maupun ajarannya dapat dijumpai perbedaan dan titik temunya. Karena itu sekalipun berbeda serta tidak berada dalam rumpun yang sama tetapi ketika berbicara mengenai kebajikan ataupun nilai-nilai moralitas yang harus dilaksanakan penganutnya maka akan terdapat titik temu yang dapat mempersatukan masyarakat dalam sebuah konsep yang disebut "kebajikan". Yang menjadi problemanya yakni masalah stigma tentang sejarah kekerasan yang pernah di alami telah menggores hubungan antar umat beragama dari masing-masing agama. Jika masing-masing pihak sadar dan mau membuka diri untuk saling menerima perbedaan dan menjaga persamaan, maka agama-agama dapat berdampingan dalam dunia ini sebagai *Global Village* tanpa adanya stigma kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Memang bukanlah hal mudah untuk menghadirkan *common good* dalam konteks masyarakat yang plural. Karena itu apabila para penganut sadar bahwa mereka adalah kelompok "*khalifah*" yang sedang menempuh perjalanan dengan jalan yang berbeda tetapi menuju tujuan yang sama maka tentunya perbedaan agama bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan dan tidak mungkin masing-masing mengklaim diri sebagai yang benar dan suci serta yang paling superior karena sama-sama sadar akan eksistensinya.

Dalam pengalaman pluralisme agama perbedaan teologi masing-masing agama sering menjadi masalah utama dan merupakan sekat yang selalu dipertentangkan sehingga muncul polemic berlarut-larut. Untuk menjembatani perbedaan tersebut muncullah teologi agama-agama yang dikenal dengan istilah *religionum theology*, model teologi dimaksud lebih memberikan kesempatan bagi masing-masing agama untuk menghayati serta memahami teologi masing-masing secara mendasar serta menghargai yang lainnya. Dengan memahami kesamaan masing-masing ajaran sebagai sebuah kebenaran yang hakiki dan perbedaan sebagai keunikan dari masing-masing agama itu sendiri. Dengan cara yang demikian maka pertentangan teologi di antara agama-agama sebagai potensi munculnya konflik dapat dihindari sedini mungkin.

Dalam masyarakat adat dengan agama yang berbeda biasanya terdapat dasar bersama yang diangkat dari adat ataupun budaya setempat yang merupakan *local genius* atau *social fabric* bagi komunitas pribumi. *Hibualamo* adalah wujud *local genius* yang dapat menjamin kelanggengan relasi bagi masyarakat Tobelo, Galela dan Kao. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya peneliti melihat hal tersebut merupakan modal utama untuk menjaga keharmonisan bagi masyarakat Halmahera Utara saat ini, sehingga dengan pengalaman konflik dapat dijadikan batu loncatan untuk merajut tali persaudaraan secara utuh tanpa adanya perbedaan dalam pluralisme agama maupun kepentingan yang dibingkai dalam *Hibualamo* itu sendiri yang dianggap sebagai rumah besar yang mempersatukan umat beragama di Halmahera Utara.

Dari pengalaman konflik dan rekonsiliasi yang telah terjadi dalam masyarakat Halmahera Utara, sangat tepat jika *Hibualamo* dijadikan dasar bersama atau sebagai global etnik dalam masyarakat setempat tanpa harus memandang dia dari etnik yang mana. Peneliti lebih memilih adat sebagai landasan bersama dalam masyarakat Halmahera Utara karena bagi penulis adat masih memiliki kewibawaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam pluralitas.

Jika agama yang dijadikan dasar bagi kehidupan bersama maka tidak akan mungkin bagi kedua komunitas untuk saling menerima secara lapang dalam berbagai hal karena terdapat perbedaan mendasar dalam dogma agama ataupun aqidah yang dapat dijadikan tameng untuk tidak saling menerima satu dengan yang lain.

Membangun kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis bukan suatu agenda yang ringan, agenda ini harus di jalankan dengan hati-hati mengingat agama lebih melibatkan emosi daripada aspek sosial lebih menegaskan klaim kebenaran daripada mencari kebenaran. Untuk itu dalam rangka membangun kerukunan hidup beragama harus berpijak pada prinsip dasar kerukunan bahwa kerukunan harus di bangun oleh semua komponen masyarakat termasuk peran adat budaya (*kearifan local*).

Keragaman masyarakat sangat di pengaruhi etnografi wilayah ini dengan keragaman budaya, kekerasan sosial budaya, kultur, adat istiadat Halmahera Utara yang sangat menonjol adalah adanya “ sistem pola kekerabatan”. Etnis besar yang mendiami daerah Halmahera Utara yaitu etnis Loloda, Galela dan Tobelo, di samping sub etnis lain yang mendiami daerah ini seperti etnis pagu, modole, tobaru dan sebagainya. Selain memiliki etnis ini masih terbagi lagi dalam ikatan suku-suku yang lebih kecil yang terdiri dari sejumlah besar keluarga. Menurut; Yesaya Banari Tokoh adat dan Staf pengajar Padamara Tobelo, Hibua lamo lebih dikenal dengan Haona dalam bahasa Tobelo dan Galela, Halu (*sebuah tinggi*), Bangsaha/hibua dan Salu berarti rumah besar bertujuan untuk melakukan pertemuan atau berkumpul antara beberapa suku yang di Halmahera Utara dalam membangun kerukunan umat beragama.¹⁷⁹

Fungsi lain Hibualamo adalah tempat berkumpul masyarakat untuk melakukan pesta rakyat, rapat/pertemuan, panen raya, penyelesain konflik dan upacara adat lain. Peran hibualamo dalam penyelesaikan konflik, lewat pendekatan kekerabatan lebih mujarab dari

¹⁷⁹Yesaya Banari, Tokoh Adat dan Staf pengajar Padamara, Wawancara, Tobelo 1 Nopember -2015)

pada pendekatan formal pemerintah (*top daune*) tidak menyentuh akar rumput diharap penyelesaian lewat local wisdom (*kearifan lokal*) lewat wadah hibualamo. Tragedi atau konflik tahun 1999/2000 telah mencabik-cabik akar budaya/adat dalam tataran” persaudaraan” kerja sama serta gotong royong. Penyelesaian masalah konflik lewat adat lebih ampuh sekalipun pendekatan ini dianggap tradisional, tetapi ini sesuatu cara yang lebih hebat di dunia modern.

Demikian juga resolusi damai yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dan menghasilkan perdamaian di daerah konflik. Adapun Prinsip dasar Hibualamo lain; (1) Terbuka dalam berbagai penjuru /aspek yang bisa dibicarakan dalam rumah besar adat disimbolkan dengan empat penjuru pintu; Timur, Barat, Utara dan Selatan yang bisa dimasuki oleh siapa saja dari suku dan kelompok mana saja bukan hanya suku pagu, togutil dan modole. Sehingga prinsip keterbukaan sangat diutamakan termasuk dalam bermasyarakat dan pembinaan dalam kerukunan umat beragama. (2) Kebersamaan antara sesama manusia bukan hanya terbatas pada orang Tobelo dan Halmahera utara pada umumnya, juga kebersamaan tidak terbatas pada kepercayaan atau agama Islam, Kristen dan kepercayaan lokal yang mendiami jazirah Halmahera Utara. (3) Kekerabatan dikalangan orang-orang Tobelo sangat kuat dibandingkan dengan kerabatan karena agama, kerabatankarena di landasi dengan ikatan keluarga, suku dan adat itu sangat kuat dan perekat salah satu media penyelesaian konflik yang cepat dan tepat dalam penyelesaian konflik Tobelo Halmahera Utara. (4) Panji Besar dalam bingkai NKRI . Hibualamo berupaya mempertemukan semua suku, adat, agama yang mendiami Halmahera Utara harus bersatu, hidup rukun, aman dan damai dalam ikatan kekeluargaan.

Ikatan keluarga ini terbentuk karena satu kesatuan (klan laki-laki) dari leluhur sebagai peletak dasar suku tersebut ikatan keanggotaan individu dalam satu suku terbina secara vertikal (lewat keturunan darah), maupun secara horizontal lewat perkawinan yang terbentuk sebuah keluarga besar mereka diikat dengan sejumlah hak dan kewajiban antar suku tersebut

peranan ketua suku atau adat sangat sentral dalam berbagai urusan kemasyarakatan baik internal maupun eksternal. Kekayaan budaya lokal seperti ini memberikan sumbangan yang cukup besar dan menjadi modal dasar dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama.

Adat se atoran atau Hibualamo merupakan suatu wadah yang dapat mempersatukan masyarakat Ternate Mudafar Syah sebagai Sultan sangat dihargai dan di hormati serta Halmahera Utara, Heng Nomotemo (*jiko makoano*) dan sebagai Bupati Halmahra utara menyatakan bahwa "*Hibua Lamo adalah falsafah yang terbuka*" untuk semua orang sepanjang ia mau menerima dan tidak berbenturan falsafah tersebut, sedangkan menurut Adnan Amal, Hibualamo sebagai suku asli Tobelo yaitu berasal dari talaga lina. Sedangkan Loloda adalah Sabuah Gilomoko artinya sabuah besar dalam bentuk rumah adat Loloda (*Salu*) yang bermakna kekuatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Tobelo memiliki peluang besar untuk hidup rukun, hal ini di dukung oleh beberapa faktor yang meliputi:

1. Adanya falsafah budaya "*Hibualamo*" atau Sabua Lamo
2. Adanya budaya pola hidup "*kekerabatan*" dalam masyarakat
3. Adanya nilai-nilai leluhur yang di hayati oleh masyarakat karena berasal dari keturunan yang sama "*talaga lina*", dan turunan sama Togutil, Taboru serta Bahasa Galela/Tobelo menjadi satu (*Hoano Maradina*)
4. Adanya lembaga-lembaga budaya masyarakat
5. Adanya kerukunan hidup umat beragama yang menunjang terealisasinya otonomi daerah sebagai kepentingan bersama
6. Peranan para tokoh agama, adat dan masyarakat yang berpengaruh. Untuk menjaga kerukunan masyarakat dan agama.

Dari semua potensi ini di harapkan menjadi jembatan penghubung dan berpijak terciptanya kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Tobelo kabupaten Halmahera Utara, pasca kerusuhan atau masa-masa mendatang. Konsep kerukunan beragama berbasis kearifan lokal lebih mengarah pada aspek terdalam dari "

GIADUTU/GIANONGORU” sebagai perekat dalam hubungan darah atau kekeluargaan.

Yang mampu mempersatukan warga Tobelo dan Halamahera Utara yang bisa hidup bersama dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, suku dan budaya yang berbeda semuanya bisa duduk bersama.

Dalam filosofi *Hibualamo* terdapat lima unsur utama yang saling terkait dan tak dapat pisahkan satu dengan yang lainnya. Penuturan beberapa orang yang peneliti temui, bahwa lima nilai dalam adat tersebut merupakan filosofi hidup bermasyarakat. Kelima unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, *O dora* : dapat diartikan dengan (kasih), yakni kasih terhadap sesama manusia (antar individu) maupun antara individu dengan masyarakat. *O dora* memiliki makna mendalam sebagai dasar (*foundation*) hubungan saling mengasihi yang kental antar sesama dan juga diri sendiri. Inilah unsur yang mengikat mereka kedalam suatu masyarakat yang rukun, damai, dan aman. Nilai ini tercermin dalam praktek hidup keseharian di mana melalui kebiasaan membagi-bagi habis rejeki (hasil tangkapan di laut maupun buruan) kepada orang-orang sekelilingnya dihari itu saja, adalah suatu kewajiban moral yang tidak dipaksakan tetapi selalu dipraktekkan sekalipun konsekuensinya “besok besok cari lagi”. Apabila hasil tangkapan ataupun buruannya kecil sehingga tidak cukup dibagikan dalam bentuk daging mentah maka akan diwujudkan dalam bentuk saling mengantar (*baku antar*) hasil tangkapan atau buruan yang telah di masak dan secara halus diungkapkan dengan istilah “*iti mateongo*”, (bahasa Tobelo, dan ‘*hiti madabu*’ (bahasa Galela), keduanya berarti “biarpun hanya kuahnya, asal semua dapat merasakannya”.

Kedua, *O hayangi* (bahasa Tobelo) dan *O sayangi* (bahasa Galela) maknanya sama dengan kata sayang yang artinya masih dekat pula dengan *O dora*, akan tetapi *O hayangi* lebih dekat pada masalah tolong menolong, serta saling menjaga perasaan, dan tidak saling menyakiti apalagi saling membunuh. Wujud dari *O hayangi* dapat dilihat pada saat adanya

orang sakit ataupun meninggal dunia di mana masyarakat akan bahu-membahu untuk meringankan penderitaan ataupun duka cita dari satu keluarga yang ditimpa kemalangan. Selain itu suasana tolong-menolong ataupun gotong royong yang oleh masyarakat Tobelo disebut "*Hirond*" dan masyarakat Galela menyebut "*Poma Siro*", dapat dilihat pada saat membongkar lahan baru untuk menanam padi ataupun palawija, kelapa, cengke, cokelat dan lainnya, panen padi, membangun rumah termasuk membangun rumah ibadah antar komunitas yang berbeda agama. *O hayang/O sayangi* pada prinsipnya adalah bentuk empati di antara sesama warga untuk saling meringankan beban.

Ketiga, *O baliara* dapat diartikan dengan "pelihara" yang mengandung pengertian saling peduli, saling menopang/menunjang, saling melayani, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan bersama yang makmur, aman dan damai. Hal-hal negatif yang mengganggu kehidupan bersama harus dihindari sebagai wujud tanggung jawab bersama tanpa ada keterpaksaan untuk memelihara dan melanggengkan suasana yang baik (konduusif). Riak-riak "saling memelihara" antar individu maupun antar komunitas sangat kental dirasakan dan hal tersebut dapat dilihat dalam pemanfaatan "hadiah alam" berupa tanah yang subur, flora dan fauna yang beraneka ragam jenis dan bentuknya yang menjamin kelangsungan hidup bersama yang makmur dan damai.

Keempat, *O adili*, artinya keadilan yang didalamnya mengandung makna kesetaraan derajat, harkat dan martabat, kesetaraan hak dan kewajiban di depan aturan-aturan normatif yang diakui dan diterima sebagai hukum adat yang sangat dijunjung. Segala aktivitas dalam kehidupan bersama dilaksanakan secara bijaksana dan penuh kehati-hatian sehingga berbagai bentuk kesetaraan sebagaimana disebutkan di atas tidak terganggu ataupun dilecehkan. Kecurangan, penipuan, dan jenis perbuatan lainnya yang melanggar norma adat sebagai wujud memelihara kesetaraan dan keseimbangan untuk menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat.

Kelima, *O diai*, sama dengan kebenaran dan kejujuran yang erat kaitannya dengan *O adili* (keadilan). Norma yang diterima, disepakati dan dihargai sebagai “yang benar” merupakan kriteria yang menata kehidupan masyarakat. Kebenaran merupakan norma yang menentukan “diatas yang benar dan tidak di atas yang salah” karena itu masyarakat setempat sangat tegas untuk menyatakan sikap baik atas hal-hal yang salah ataupun tentang kebenaran. Implementasi *O diai* dalam kehidupan bersama di masyarakat *Hibualamo* tercermin lewat pengambilan keputusan dalam perkara-perkara di mana para ketua adat, para pendeta, para imam selalu tegas tanpa pandang bulu dalam menentukan keputusan.

Dengan tegas mereka harus member sanksi walaupun yang terdakwa adalah salah satu anggota keluarga mereka sendiri sehingga kebenaran yang diikuti keadilan benar-benar merata dalam tatanan *Hibualamo*.¹⁸⁰ Dari butir *Hibualamo* tersebut di atas memiliki pengaruh positif dalam komunikasi social beberapa etnik Halmahera Utara, terutama penerapannya dalam kehidupan mereka, sehingga terciptanya suasana egaliter (gotong royong dan demokratis) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga suasana tersebut menjadi cerminan nilai-nilai *Hibualamo*.

Selain beberapa nilai yang peneliti paparkan di atas, ada juga nilai lain yang tidak kalah menariknya dari budaya *Hibualamo* ini, di antaranya :

1. Nilai *Homakirio* atau *Pomakirio* (gotong royong)

Nilai *Homakirio/Pomakirio* (gotong royong) lebih pada konsep gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang sangat kental dan cukup terkenal sampai saat ini. Gotong royong juga berkaitan dengan unsur *O hayang* atau *O sayangi* yang didalamnya mengungkapkan hubungan ataupun kerja sama tanpa pamrih yang menuntut kerelaan dari tiap-tiap individu. Kerja sama juga bias muncul ketika orang menyadari bahwa mereka

¹⁸⁰ S. S. Duan, *Hein dan Hibualamo “Tebelo Pos” Menelusuri Jejak Kepemimpinannya* (Tobelo. Tobelo Pos dan PENDA Kab. Halmahera Utara, 2009), h. 55

memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama.

2. Nilai *Po Kokawasa* (demokrasi)

Kalau mengacu pada kata dasar demokrasi yakni 'demos' artinya *people* atau rakyat maka padanan dalam bahasa Galela dan Tobelo adalah '*Kawasa*'. Namun jika demokrasi diarahkan pada sistem politik yang mengatur kehidupan antar sesama, karenanya membutuhkan tenggang rasa sehingga kepentingan semua orang dalam komunitas terwadahi, tidak saling mendominasi, maka demokrasi sepadan dengan "*Po Kokawasa*" (dalam bahasa Galela) dan '*Ho Kokawasa*' (bahasa Tobelo) yang bisa bermakna hidup bermasyarakat atau tata aturan hidup bermasyarakat. Sebagai contoh '*kawasa madaailako*' atau aturan dalam masyarakat yang mencakup tata aturan antara pemimpin dengan rakyat. Dengan demikian demokrasi dalam konteks ini merupakan nilai yang mendasari aturan hidup bersama.¹⁸¹

Lebih lanjut, Murid, menambahkan sebagai nilai, demokrasi dan kawasa sangat menekankan dan bahkan bertumpu pada egaliter dalam konsep demos atau kawasa, antara *jiko makowano* (pemimpin) dan *kawasa* (yang dipimpin) memiliki derajat yang sama. Bahkan pemimpin memiliki otoritas sebagai pengatur, otoritas tersebut tidak lalu menjadi pembeda antara pemimpin dengan yang dipimpin, akan tetapi ada kesamaan bagian integral dari *kawasa* yang menjadi satu konsep sosial yang mengikat *jiko makowano* dan *kawasa* secara setara dalam persoalan hak dan kewajiban sosial.

Dengan demikian demokratis telah menjadi salah satu unsur yang terkandung dalam nilai-nilai adat *Hibualamo*, di mana nilai tersebut masih tetap relevan dengan konteks hidup saat ini dalam komunitas masyarakat yang semakin kompleks. Berdasarkan pengalaman konflik pada tahun 1999/2000 dan penyelesaiannya melalui proses rekonsiliasi yang sampai

¹⁸¹Murid Tonorio, Akademisi dan Budayawan Galela, wawancara, 2018.

saat ini tetap langgeng merupakan bukti bahwa nilai-nilai adat *Hibualamo* yang demokratis tidak dapat dikatakan mati ataupun lenyap ditelan perubahan.

Implementasi nilai demokratis dalam adat *Hibualamo* yang merupakan wujud dari *keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan lainnya* sampai saat ini masih terlihat dalam proses komunikasi sosial di masyarakat. Misalnya dalam kasus rumah tangga, biasanya seorang istri mengadakan tindakan kekerasan suami kepada Imam, atau Pendeta atau juga tokoh adat, tokoh masyarakat dan diselesaikan secara adil, dimana sang suami jika bersalah diberi tindakan ditempat itu dari mereka yang di sebutkan di atas. Dalam konteks ini setiap orang sebagai anggota masyarakat memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan.

Nilai demokratis lainnya dapat dilihat pada pemilihan *Jiko Ma Kolano* (pemimpin pemerintahan/bupati) yang pada prinsipnya tidak memandang perbedaan dalam beberapa *hoana* (klan/etnik) dan semua keputusan yang diambil didasarkan pada pilihan masyarakat dan pilihan tersebut dianggap mutlak dan harus diakui oleh semua etnik di Halmahera Utara. Kesepakatan masyarakat tersebut menjadi kesepakatan semua komunitas.

3. Konsep *Jou Gikimoi* (Relegius)

Salah satu nilai yang mendasar dalam adat *Hibualamo* adalah konsep Ketuhanan/ *jou gikimoi* dalam pandangan relegiusitas masyarakat Tobelo dan Galela, sebab segala perilaku serta tindakan manusianya selalu dihubungkan dengan kuasa yang tertinggi (*supra-natural*) di luar manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat *Hibualamo* adalah manusia religious, di mana sumber kebaikan tertinggi berasal dari pola hidup leluhur yang selalu menjadi panutan dalam tutur dan laku mereka setiap saat.

Dalam Agama-agama pra-literer (animisme dan dinamisme) etnik Tobelo dan Galela mengenal konsep *Gurumini* ataupun *Gomanga* sebagai roh leluhur atau "roh senior" yang

memiliki kekuatan transeden tetapi selalu ada dalam realita hidup manusia. Bagi masyarakat Halmahera Utara, para leluhur adalah kekuatan yang senantiasa menuntun mereka di manapun mereka berada sehingga dalam situasi yang bagaimanapun para leluhur selalu menjadi panutan dalam bertindak.

Hal tersebut juga dalam konsep agama Ibrahimic, dimana nilai ritual harus berimbang dengan nilai social. Seorang Kristen menurut Tindage (2006: 159) mengatakan diperlukan mengaplikasi ajaran Yesus dalam kehidupan social mereka, karena ini merupakan wujud dari panggilan menyatakan misi Allah mencakup misi perdamaian dengan sesame, sebagaimana kata Rasul Paulus 'Ia telah menciptakan berita perdamaian kepada kami (I Kor.5;19), hal yang sama juga berlaku dalam Islam, dimana umatnya diajarkan mengaplikasi semangat dan nilai ritual dalam dimenso social. Sehingga seseorang dalam Islam yang kuat ibadah ritual menjadikan pribadi mereka sangat baik dan luhur dalam kehidupan social.

Oleh karena itu nilai ketuhanan (*Jou Gikimoi*) pada etnik Tobelo dan Galela sangat berpengaruh positif dalam kehidupan mereka, hal ini dibuktikan dengan rekonsiliasi pasca konflik bagi etnik Tobelo dan Galela yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Hemat peneliti ini merupakan semangat dan nilai keagamaan yang menyatu dalam karakter dan kepribadian masyarakat Tobelo dan Galela. Dan ini juga merupakan perekat sosial yang tak bias dipungkiri eksistensinya dalam menghadirkan "common good" bagi masyarakat Halmahera Utara dengan identitas agama yang berbeda.

4. *Pomarimoi/Homarimoi* (Kebersamaan/Egaliter)

Nilai-nilai dalam adat *Hibualamo* sangat egaliter di mana dapat dilihat dari sistem kekerabatan dan juga dalam struktur masyarakatnya, etnik Tobelo dan Galela khususnya dan masyarakat Halmahera Utara umumnya tidak mengenal adanya hierarki atau keturunan raja-raja, sultan, dan sebagainya yang memiliki posisi yang lebih tinggi, kedudukan masyarakatnya sama dan tidak ada perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem

memiliki kekuatan transeden tetapi selalu ada dalam realita hidup manusia. Bagi masyarakat Halmahera Utara, para leluhur adalah kekuatan yang senantiasa menuntun mereka di manapun mereka berada sehingga dalam situasi yang bagaimanapun para leluhur selalu menjadi panutan dalam bertindak.

Hal tersebut juga dalam konsep agama Ibrahimic, dimana nilai ritual harus berimbang dengan nilai social. Seorang Kristen menurut Tindage (2006: 159) mengatakan diperlukan mengaplikasi ajaran Yesus dalam kehidupan social mereka, karena ini merupakan wujud dari panggilan menyatakan misi Allah mencakup misi perdamaian dengan sesame, sebagaimana kata Rasul Paulus '*la telah menciptakan berita perdamaian kepada kami* (I Kor.5;19), hal yang sama juga berlaku dalam Islam, dimana umatnya diajarkan mengaplikasi semangat dan nilai ritual dalam dimenso social. Sehingga seseorang dalam Islam yang kuat ibadah ritual menjadikan pribadi mereka sangat baik dan luhur dalam kehidupan social.

Oleh karena itu nilai ketuhanan (*Jou Gikimoi*) pada etnik Tobelo dan Galela sangat berpengaruh positif dalam kehidupan mereka, hal ini dibuktikan dengan rekonsiliasi pasca konflik bagi etnik Tobelo dan Galela yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Hemat peneliti ini merupakan semangat dan nilai keagamaan yang menyatu dalam karakter dan kepribadian masyarakat Tobelo dan Galela. Dan ini juga merupakan perekat sosial yang tak bias dipungkiri eksistensinya dalam menghadirkan "*common good*" bagi masyarakat Halmahera Utara dengan identitas agama yang berbeda.

4. *Pomarimoi/Homarimoi* (Kebersamaan/Egaliter)

Nilai-nilai dalam adat *Hibualamo* sangat egaliter di mana dapat dilihat dari sistem kekerabatan dan juga dalam struktur masyarakatnya, etnik Tobelo dan Galela khususnya dan masyarakat Halmahera Utara umumnya tidak mengenal adanya hierarki atau keturunan raja-raja, sultan, dan sebagainya yang memiliki posisi yang lebih tinggi, kedudukan masyarakatnya sama dan tidak ada perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem

kepemimpinan yang sangat berbeda dengan suku-suku lainnya di Maluku Utara. Di Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan masih ada sistem pemimpin kesultanan, yang bertumpuk pada seorang Sultan.

Pemerintahan semacam ini di dasarkan pada system warisan sehingga keturunan Sultan yang mutlak memerintah wilayah-wilayah di maksud turun temurun. Sedangkan dalam system pemerintahan masyarakat Tobelo gelar *Jiko Makowano* (raja Teluk) tidak berdasarkan warisan tetapi didasarkan pada pemilihan. Adapun sistem pemilihan *jiko makowano* dikenal dengan istilah *O* sejumlah tokoh-tokoh adat dari masing-masing *hoana* berkumpul di *Hibualamo* dan menentukan calon kemudian diuji kemampuannya baik dalam pengetahuan maupun kehebatannya sebagai seorang kesatria. Mereka yang terpilih adalah orang yang benar-benar tahan uji dan yang terbaik serta dapat dijadikan teladan bagi masyarakat secara umum.

Karena itu seorang Pimpinan masyarakat di Halmahera Utara benar-benar dari masyarakat yang setingkat sehingga ia tahu apa yang seharusnya dilakukan demi kesejahteraan bersama karena ia sendiri adalah anggota masyarakat yang hanya diberi wewenang untuk memimpin. Prinsip utama yang menjadi dasar kepemimpinan bagi masyarakat *Hibualamo* yakni sama rasa, di mana dengan slogan "perahu di darat sama-sama dijunjung, perahu di laut sama-sama di dayung" merupakan filosof kepemimpinan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang sampai saat ini tetap eksis walaupun mengalami perubahan dan di abadikan menjadi lambang adat *Hibualamo*.

Dalam hubungan dengan nilai-nilai dimaksud, peneliti melihat adanya keistimewaan yang di miliki masyarakat *Hibualamo* dalam sikap hidup bermasyarakat bermasyarakat yakni hubungan antar sesama manusia selalu dijunjung tinggi melalui falsafah "*Ngone O Ria Dodoto*". Falsafah ini mengandung makna sangat mendalam di mana semua manusia memiliki kesamaan derajat di dunia tanpa ada perbedaan. "*Ngone O Ria Dodoto*" merupakan

suatu penghargaan terhadap sesama yang dapat diartikan dengan satu "Ibu" atau "sekandung" sehingga ketika menyakiti yang lain berarti menyakiti saudara sendiri karena itu para "orang tua" akan tidak setuju dengan perbuatan dimaksud.

Konsep "orang tua" dalam kehidupan masyarakat *Hibualamo* tidak sebatas ayah ataupun ibu, tetapi orang tua dalam arti yang lebih luas yakni menyangkut ayah, ibu dan para leluhur sebagai "*the supreme good*" yang sangat dihargai. Karena itu mengasihi sesama berarti mengasihi orang tua atau leluhur dan sebaiknya jika menyakiti orang lain berarti menyakiti orang tua atau leluhur.

Dari nilai-nilai adat tersebut tercover seluruh tata krama bagi masyarakatnya yang sangat penting bagi segala tingkah laku masyarakat secara komunal maupun individu. Begitu pentingnya peran tata krama dalam hidup bermasyarakat sehingga setiap orang wajib mengedepankan tata karma dan bahkan telah menjadi hukum yang dipatuhi. Penuturan seorang informan bahwa Tata krama adalah apa yang menjengkelkan atau menyejukkan, yang busuk atau yang suci, yang mulia atau yang nista, yang barbar atau yang menghaluskan kita, yang bekerjanya konstan, mantap, seragam, dan tidak tampak, seperti udara yang kita hirup. Tata krama memberi bentuk dan warna pada seluruh kehidupan kita. Menurut kualitasnya, tata krama itu membantu moral, mendukungnya, atau sama sekali menghancurkannya. Dengan demikian kita harus menjunjung tinggi tata krama dalam kehidupan social.¹⁸²

Bentuk hubungan inipun terdapat dalam falsafah *Hibualamo* "*Ngone O Ria Dodoto*" yang di dalamnya mengutamakan relasi antar sesama dan dengan leluhur sebagai sumber kasih sayang, sehingga pada prinsipnya martabat manusia mendapat tempat yang paling utama dalam ranah kehidupan antar sesama. Ketika melihat realita masyarakat *Hibualamo* saat ini dengan pluralism agama dan juga suku maka penulis melihat bahwa nilai-nilai

¹⁸²Dr. Kasman Hi. Ahmad, wawancara, Tobelo, 15 Mei 2015

ataupun lima “mutiara” pemberian Tuhan bagi komunitas masyarakat *Hibualamo* masih sangat relevan untuk dipertahankan kelanggengannya. Sebab dalam situasi dewasa ini kesadaran mengenai pluralisme agama, suku ataupun budaya sangat dibutuhkan.

Dalam masyarakat adat dengan Agama yang berbeda biasanya terdapat dasar bersama yang diangkat dari adat ataupun budaya setempat yang merupakan *local genius* atau *social fabric* bagi komunitas pribumi. *Hibualamo* adalah wujud *local genius* yang dapat menjamin kelanggengan relasi bagi masyarakat Tobelo dan Galela. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya penulis melihat hal tersebut merupakan modal utama untuk mencapai keharmonisan bagi masyarakat Halmahera Utara saat ini, sehingga dengan pengalaman konflik dapat dijadikan batu loncatan untuk merajut tali persaudaraan secara utuh tanpa adanya perbedaan dalam pluralisme agama maupun kepentingan.

Dari pengalaman konflik dan rekonsiliasi yang telah terjadi dalam masyarakat Halmahera Utara, sangat tepat jika *Hibualamo* dijadikan dasar bersama atau sebagai global etnik dalam masyarakat setempat. Peneliti lebih memilih adat sebagai landasan bersama dalam masyarakat Halmahera Utara karena bagi penulis adat masih memiliki kewibawaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam pluralitas. Jika agama yang dijadikan dasar bagi kehidupan bersama maka tidak akan mungkin bagi kedua komunitas untuk saling menerima secara lapang dalam berbagai hal karena terdapat perbedaan mendasar dalam dogma ataupun aqidah yang dapat dijadikan tameng untuk tidak saling menerima.

Membangun kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis bukan suatu agenda yang ringan, agenda ini harus di jalankan dengan hati-hati mengingat agama lebih melibatkan emosi daripada aspek sosial lebih menegaskan klaim kebenaran daripada mencari kebenaran. Untuk itu dalam rangka membangun kerukunan hidup beragama harus berpijak pada prinsip dasar kerukunan bahwa kerukunan harus di bangun oleh semua komponen masyarakat termasuk peran adat budaya (kearifan local).

Keragaman masyarakat sangat dipengaruhi etnografi wilayah ini dengan keragaman budaya, kekerasan sosial budaya, kultur, adat istiadat Halmahera Utara yang sangat menonjol adalah adanya “ sistem pola kekerabatan”. Etnis besar yang mendiami daerah Halmahera Utara yaitu etnis Loloda, Galela dan Tobelo, di samping sub etnis lain yang mendiami daerah ini seperti etnis pagu, modole, tobaru dan sebagainya. Selain memiliki etnis ini masih terbagi lagi dalam ikatan suku-suku yang lebih kecil yang terdiri dari sejumlah besar keluarga. Menurut; Yesaya Banari Tokoh adat dan Staf pengajar Padamara Tobelo, Hibua lamo lebih dikenal dengan Haona dalam bahasa Tobelo dan Galela, Halu (sebuah tinggi), Bangsa/hibua dan Salu berarti rumah besar bertujuan untuk melakukan pertemuan atau berkumpul antara beberapa suku yang di Halmahera Utara.¹⁸³

D. Upaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik

1. Institusi / Lembaga Pengembangan Kerukunan

Salah satu lembaga Pembinaan kerukunan umat beragama yang sudah ada dan sangat berperan membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan keumatan atau kemasyarakatan adalah forum komunikasi umat beragama (FKUB) yang di bentuk oleh pemerintah dari tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota hingga Kecamatan kehadiran lembaga ini di harapkan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang bernuansa SARA dan menciptakan harmonisasi kerukunan hidup beragama yang selalu terbuka untuk mengadakan kordinasi dan konsultasi dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya dalam rangka membangun dan menjaga kerukunan umat beragama Kota Tobelo.

Menurut Ketua FKUB Kab Halmahera Utara pendeta S.S, Duan; sebelum terbentuk FKUB, di Tobelo sudah terbentuk FKKUB (2003-2006) melakukan dialog dan pembinaan secara intense dengan masyarakat/antar umat beragama. FKUB, antara Kristen dan Islam

¹⁸³Yesaya Banari, Tokoh Adat dan Staf pengajar Padamara, Wawancara, Tobelo 6 Juni 2018.

berbeda dalam pandangan teologisnya, tapi ada kesadaran bersama tentang hidup kebersamaan dalam pandangan kemanusiaan sesama orang Tobelo/Halmahera Utara. Mencari Akar masalah konflik jangan dibiarkan berlarut-larut, demikian juga membangun kesadaran masyarakat untuk mengahiri konflik demi kepentingan daerah kalau dibiarkan daerah ini akan hancur dan yang rugi atau yang korban akibat konflik ini adalah anak daerah dan akan diisi oleh orang luar. Membangun kesadaran anak daerah untuk mengahiri konflik dan bersatu kembali bahwa kita adalah bersaudara, satu keturunan, suku, adat istiadat yang sama. Persolan agama adalah urusan pribadi (privat) urusan umat masing-masing tidak perlu saling intervensi antara satu dengan lain,¹⁸⁴ dalam persolan keakinan atau aqidah agama yang dianut oleh umat.

Tugas dan fungsi FKUB Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait juga telah melakukan pembinaan terhadap komunitas antar umat beragama yaitu melakukan :

- 1). Pembinaan FKUB bekerja sama dengan Pemerintah/Kesbangpol, Kandepag Halmahera Utara membina umat beragama dan berdiolog dengan masyarakat yang bertikai untuk mencari penyelesaian dan solusi yang terbaik.
- 2). Penyelesaian masalah dari atas/top down tidak akan menyelesaikan tapi harus dilakukan dari bawah akar rumput melibatkan semua masyarakat komponen yang terkait.
- 3). Mencari akar masalah yang tepat, memadukan dan keberanian mencari kebaruan atau pembaharuan dalam rangka mendamaikan masyarakat yang terlibat konflik secara langsung.
- 4). Untuk mencari akar masalah atau salusi harus melibatkan orang-orang yang tau persis atau faham seperti, para ahli, PT : IAIN, STT, Unira, Pemuka Masyarakat, Pemerintah dan Institusi Adat lainnya.¹⁸⁵ FKUB juga melakukan pembinaan antar umat beragama secara dini dalam bentuk kema remaja bacarita dari berbagai latar belakang sosial, agama, budaya yang berbeda pada tingkat pelajar SMA dan sederajat sekabupaten Halmahera Utara di Galela.

¹⁸⁴ Ketua FKUB Halut (S.S Duan, Wawancara, Tobelo, 26 September 2018
¹⁸⁵ S.S. Duan, Wawancara, Tobelo, 25 Nopember 2018 .

Selain FKUB di atas ada juga organisasi sosial keagamaan yang secara khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama begitu pula ada forum-forum yang di prakarsai dan di bentuk oleh anak-anak muda yaitu Forum antar Pemuda dari berbagai agama seperti Remaja Masjid Pemuda Jema'at Gereja dan lain-lain yang dalam kegiatannya berpotensi untuk mendukung kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat antar umat beragama. Juga peran Gereja GMIH yang sangat berarti membina umat. Tugas Gereja adalah perdamaian diri terhadap sesama manusia atau alam. Berdamai dalam pengertian membuka diri dari segala hal termasuk dalam menyelesaikan persolan konflik antar umat beragama.¹⁸⁶

Demikian juga pandangan Kandepag Halmahera Utara Salmin A. Kadir: Kerukunan antar umat beragama pasca rusuh sangat baik antara pemerintah dengan masyarakat saling mendukung untuk menciptakan umat beragama dalam masyarakat. Pembinaan, umat beragama lewat wadah FKUB Kabupaten sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik.¹⁸⁷ Intitusi keagamaan lain yang mendukung terciptanya kerukunan hidup beragama di Tobelo seperti **Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tobelo Halmahera Utara, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al-Khairaat, Dewan Senode, GMIH** yang berada di Kota Tobelo yang memegang peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan masalah konflik.

Selain institusi keagamaan tersebut diatas serana Ibadahpun berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan perilaku umat beragama. Salah satu peranan Gereja dan Masjid dalam Upaya perdamaian konflik di Maluku Utara dalam menciptakan perdamaian menurut penuturan seseorang Pastor Drs. Titus N. Rahail M.Sc mengungkapkan bahwa. "Untuk membangun hubungan yang harmonis dianatar sesama pemeluk agama, semua pihak harus bersama-sama menyatukan langkah dan pandangan untuk membangun generasi bangsa,

¹⁸⁶S.S. Duan, Wawancara, Tobelo, 22 September 2018.

¹⁸⁷Salmin A.Kadir, M.Pd, Kandepag Halmahera Utara, Wawancara, Tobelo, 4 Pebruari 2018.

walaupun kita berbeda dalam hal keimanan dan ideologi (keyakinan) masing-masing, tetapi masalah itu tidak untuk dijadikan sebagai alat perdebatan, oleh karena semua agama memiliki tujuan yang satu (sama) yaitu menuju pada yang “Kuasa” “Tuhan”. Menurut mantan Ketua MUI tahun 2013-2014 Maluku Utara . Drs. H. Bujang Hasan, M.Pdi mengenai hal ini bahwa: “Perdamaian hanya dapat diwujudkan melalui lembaga dan sarana-sarana damai. Mengapa? karena sejatinya konflik kekerasan tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer semata, namun juga harus dilihat sebagai sebuah fenomena sosial. Konflik kekerasan juga memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear, ia sangat tergantung dari dinamika lingkungan politik yang spesifik pula.¹⁸⁸

Penyebab konflik kekerasanpun tidak bisa direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Dan selain itu, konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan”. Dan harus melalui mekanisme yang diatur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang bertikai duduk bersama dan membukan diri untuk berdialog untuk mencari solusi perdamaian.

2. Pembinaan kerukunan Lewat Institusi Adat

Pembinaan potensi kerukunan, dalam upaya pembinaan potensi kerukunan beragama di masyarakat Tobelo dan Halmahera pada umumnya. pasca kerusuhan antara lain dapat dilakukan melalui nilai-nilai atau norma-norma yang diperoleh masyarakat yang dapat diajarkan melalui budaya dan kearifan lokal sebagaimana tercermin dalam masyarakat Tobelo Halmahera Utara yang bernaung di bawah falsafah *Hibualamo* “*Ngone O Ria Dodoto*” yang mengandung nilai-nilai perekat atau pemersatu. Dimasyarakat Maluku Utara khususnya di Ternate di kenal dengan; *Adat se atorang, Istiadat se Kabasaran, Galib Selakudu,*

¹⁸⁸Drs. H.Bujan Hasan,M, Pdi. Ketua MUI Priode 2013-2014 Maluku Utara.

sere duniru, Cin se Cingare, Bobaso serasai, cara sengale, Lao Se Bannar, Duka secinta, Baso se hormat, kearifan berlaku di masyarakat Ternate dan *MOLOKU KEARAHAN* pada umumnya, sedangkan dikawasan Tobelo Halmahera Utara antara lain :

- a. Peranata Adat dan Nilai kekeluargaan
- b. Nilai kekerabatan (*Hoana Ngimoi*)
- c. Nilai religi/gikirimoi (Konsep Kepercayaan)
- d. Nilai Toto Ade (cerita-cerita non formal yang mengandung pesan-pesan kebaikan).
- e. Nilai kesenian : Bobaso, Lelehe, Denge-denge, Tide-tide dan Cakalele.
- f. Nilai Bari (kerja sama, tolong-menolong, saling membantu) :
 - i. *Kia Nomanara* (bingin apa /kerja apa)
 - ii. *Katu* (Atap)
 - iii. *Tiba* (Bambu)
 - iv. *Tahu Miakana* (Bikin Rumah)
 - v. *Doro deraki Miakana* (Bikin Kebun)

Nilai-nilai tersebut di atas mengandung pesan-pesan yang cukup mendalam di dalam masyarakat yang sudah terbina sejak puluhan tahun yang silam dan telah di wariskan nenek moyang mereka. Dan nilai ini mengabarkan dikalangan masyarakat Tobelo, Galela, Loloda misalnya budaya Toto ade, Menurut, Hein Namo Temo (sebagai *jiko makoano*) budaya toto ade ini di lakukan di berbagai kesempatan baik dalam pesta perkawinan, kematian, maupun melakukan upacara keagamaan dan adapt-istiadat karena cerita-cerita bersifat non formal ini yang berlaku di masyarakat bahkan di dalam keluarga juga sebagai cerita pengantar tidur. Pesan-pesan *Toto Ade* ini sangat mendalam di masyarakat karena menyangkut persatuan,

semangat gotong royong, semangat ke pahlawanan dan kekeluargaan, cerita ini di jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan. Sekaligus di budayakan dalam masyarakat. Nilai –nilai tersebut di atas di ilhami oleh falsafah *Hibualamo* dan nilai sosial lain antara lain :

1. *Odora* (kasi sayang)
2. *Obanari* (kebenaran)
3. *Oadili* (keadilan)
4. *Obarakati* (persetujuan)
5. *Ole-leani* (melayani/kerja sama)

Selain itu ada nilai yang menyangkut tentang motivasi kehidupan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi antara lain :

1. *Doro* (kebun jangka pendek)
2. *Raki* (kebun jangka panjang)
3. *Bari* (kerja sama/tolong-menolong) dalam membut kebun, memanjak kelapa, membuat Rumah serta kerja sama dalam bentuk lain dstnya.

Konsep *doro* dan *raki* sangat berbeda dalam pandangan orang-orang Tobelo, Galela dan loloda *Doro* adalah perkebunan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kepentingan sehari-hari misalnya menanam *rica* (cabe), tomat, pisan, sayur-sayuran dan lain-lainnya. Sedang *raki* adalah perkebunan yang bersifat jangka panjang untuk kehidupan yang akan di wariskan kepada anak cucu kelak misalnya menanam, kelapa, pala, cengkeh, coklat, durian dan seterusnya menjadi investasi masa depan yang di persiapkan oleh orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya.¹⁸⁹ Istilah *doro* berarti kebun, tapi dalam perkembangan selanjutnya merujuk pada pertanian subsistensi, pertanian, perkebunan di sebut *raki* sebagai

¹⁸⁹ Murid Tonirio, *Doro Deraki Transformasi Sosial Ekonomi Pertanian Galela Kabupaten Halmahera Utara* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2016), h. 101

investasi masa depan anak-anak dan keluarga masyarakat Galela dan Halmahera Utara pada umumnya. Karena Raki adalah modal investasi masa depan, secara ekonomi dapat terpenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan suatu keluarga Tobelo-Galela, maka secara ekspelisit status sosial dapat dihargai dan dihormati dan sekaligus berperan sebagai tokoh masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat dan lingkungannya dimana ia berada.

3. Pembinaan Kerukunan Lewat Institusi Keagamaan

Pembinaan kerukunan beragama telah dilakukan oleh pemerintah lewat institusi formal maupun non formal yang berada di Daerah antara lain; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tobelo Halmahera Utara, Forum Kerukunan umat beragama (FKUB), Dewan-dewan gereja, GEMIH, DEWAN SINODE, Muhammadiyah/NU, Alkhairat, Walubi, Pemuda gereja. Selain itu menurut Nisawa Salim; pembinaan umat beragama dilakukan melalui Remaja Mesjid, Majelis ta'lim, Mangaji, baca barjanji, Olahraga dan kegiatan sosial lainnya.¹⁹⁰

Pembinaan dilakukan lewat wadah tersebut di atas baik lewat institusi adat maupun keagamaan hal dapat dilakukan demi terciptanya kerukunan, beragama di masyarakat selalu baik sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam masyarakat. kegiatan pembinaan dalam bentuk penyuluhan, ceramah agama, Majelis Ta'lim, khotbah, penataran maupun lewat media cetak serta media sosial lainnya.

Dalam diskursus Teologi dan sosio cultural semua kita sepakat bahwa moralitas nilai agama akan senantiasa mengajarkan kasi sayang hormat menghormati, dan menampilkan segala tindakan yang bersifat anarkis dan destruktif dalam menyelesaikan setiap masalah. Dalam tataran normatif, tidak ada anjuran agama manapun yang membenarkan perilaku

¹⁹⁰Nisawa Salim Imm Mesjid Raya Tobelo, Wawancara, Tobelo, 7 Pebruari 2018

kekerasan dan anarkis, doktrin agama apapun tidak akan mentolelir penggunaan simbol agama sebagai alat legitimasi perilaku perusakan dan destruksi.

Dalam tataran realitas, tindakan kekerasan sering kali melibatkan umat beragama, membawa simbol-simbol keagamaan, dan menjadi korban adalah sarana prasarana keberagaman juga. Hal ini sangat logis mengingat masyarakat Indonesia merupakan Masyarakat relegius, masyarakat yang beragama. Demikian pula realitas masyarakat yang ada di Maluku Utara khususnya di Tobelo Halmahera Utara.

Konflik sosial yang terjadi beberapa tahun silam hingga merambat ke Tobelo kelihatannya melibatkan sentimen dan simbol keagamaan, fenomena ini pun terjadi di mana-mana di tanah air. Yang nota bene masyarakat relegius, dimana nilai kasih sayang dan slogan anti kekerasan terus di komandangkan, tiba-tiba membuat kerusakan dan menjadi beringas dan ganas.

Ironisnya di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal "Hibua Lamo" maupun "adat seatorong" serta memiliki nilai-nilai relegiusitas yang tinggi, justru sering kali terjadi peristiwa kekerasan, dan lebih tragis lagi, dengan mengatasnamakan ajaran agama. (simbol-simbol keagamaan). Suatu pandangan yang sangat bertentangan dengan noram dan nilai yang berusaha di wujudkan oleh setiap ajaran agama.

Sekalipun para tokoh dan pengajar agama telah berupaya memperkenalkan ajaran yang rama, dan penuh toleransi antara sesamanya, penganut ajaran yang lain. Namun kemudian fenomena sosial yang muncul tak dapat dielakan dan di perkirakan menjadi potensi pemicu konflik sosial. Potensi pemicu itu adalah titik beratnya terletak pada kesan "penyaingan politik" diantara agama yang di kemas melalui stigma-stigma atau melegitimasi agama sebagai sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹¹

¹⁹¹Lihat. Said Agil Al-Munawar, h. 167

Fenomena tersebut diatas, dapat mengetuk nurani umat beragama agar senantiasa meningkatkan pilar-pilar agama lebih intensif, dengan mengedepankan moralitas agama, misalnya dengan menyampaikan pesan-pesan damai, cinta, sayang dan menghormati sesama umat manusia, atas satu keyakinan maupu terhadap keyakinan agama yang lain, pada prinsipnya bahwa manusia berasal dari keturunan yang satu (Adam) dan berasal dari ciptaan yang sama yaitu Tuhan.

Substansi keberagamaan manusia adalaah meyakini adanya suatu zat di luar dirinya yang bersifat mutlak. Zat yang mutlak itu memberikan bimbingan kepada manusia yang di sebut ajaran (wahyu). Inti ajaran semua agama adalah kebaikan dan kebenaran, baik kebenaran objektif maupun subjektif: kebenaran persial maupun universal. Sejauh ini, terdapat titik pusat yang di kemukakan agama-agama dan menjadi satu karakteristik yang menonjol; islam dengan ajaran tauhid dan kemuliaan Tuhan, Kristen dengan kasih sayang, Kong Hucu dengan prikemanusiaan, Hindu dengan perenunganya, Budha dengan kontemplasi.

Dari semua inti ajaran agama selalu mengarahkan, mendidik,menunjuki manusia kearah yang satu, yaitu kebahagiaan dan kebenaran sejati (hakiki). indikator pemahaman agama seperti ini di terima oleh semua ajaran agama, dan atas dasar itu pula selalu melihat manusia sebagai sahabat, kerabat, dan saudara sesama umat manusia (ukhuwah insaniyah), bukan makhluk yang di bentuk atau di tiadakan.

Hal ini yang perlu dihindari adalah menjaga jarak antara agama kerukunan sosial karena dalam pendekatan phisokologi sosial, perilaku seseorang maupun kelompok itu di picu oleh berbagai motifasi yang berbeda. Ada beberapa kemungkinan kekerasan atas nama agama dapat terjadi antara lain:

Pertama, hampir semua agama besar di dunia di lahirkan pada masyarakat yang tertutup dan langsung berhadapan dengan musuh. Oleh karenanya banyak sekali ungkapan dogma agama secara tekstual menyatakan permusuhan dan mengutuk keberadaan agama lain.

Kedua, setiap agama menawarkan jalan keselamatan yang kemudian di pahami secara eksklusif, sehingga seakan-akan hanya terdapat satu pintu menuju sorga. Lebih ekstrim lagi, dengan mengutuk dan membasmi keberadaan agama lain di anggap sebagai satu ibadah dan amal kesalehan. Dan mengklaim agamanya yang di anut yang paling benar, dan bukan sekeyakinan dianggap salah.

Ketiga, setiap agama pada prinsipnya melakukan realitas sosial berupa *the community of believers*, begitu muncul sebuah komunitas dengan identitas serta ikatan nilai yang di yakini dan di bela secara emosional, maka pada saat itu pula akan muncul pula apa yang di sebut *outsiders atau other group (minhum)*.

Persoalan mulai muncul jika perilaku kelompok ini sudah bercampur dengan kepentingan sekunder, terutama berkaitan dengan fasilitas ekonomi dan politik, yang mengentaskan telasi kompetitif dan hegemoni. Disinilah akan ketemu antara motivasi dan tindakan keagamaan dengan motivasi dan tindakan non agama. Terlepas dari motif yang melatar belakanginya, persoalannya, bagaimana mencegah agar tidak timbul konflik antar kelompok agama, solusi moral yang harus di tegakan adalah upaya memperkuat etika politik dan ekonomi yang bersifat positif, jadi bukan hukum keagamaan yang hanya bisa di terima oleh satu kelompok agama.

Menurut hemat peneliti, hubungan antar umat beragama akan terpelihara jika demokrasi dan wibawa hukum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu segera di kembangkan pembelajaran yang berorientasi pada konsep toleransi yang minat dan wajar. Pada masyarakat majemuk serta di Maluku Utara khususnya di Tobelo, kerukunan ternyata masi

menjadi primadona (barang mewah). Mewahnya kerukunan itu semakin terbukti dengan rendahnya "daya beli" masyarakat-terhadap kerukunan itu sendiri. Yaitu mudahnya masyarakat terprofokasi kedalam subjektifitas keagamaan sehingga nampak emosi yang begitu agresif, liar dan destruktif hanya karena tidak siap menerima perbedaan.

Kemajuan sebenarnya bisa memperkaya budaya nasional, ternyata belum dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa. Justru kemajuan itu menjadi api dalam sekam yang setiap saat bisa tersulut. Rentetan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini begitu merobek-merobek persaudaraan di daerah ini. Robekan itu semakin terasa nyeri ketika unsur-unsur suku, agama, ras, antar golongan, yang sering di rumuskan dalam okronim ikut mempertajam konflik yang terjadi korban setiap insiden adalah masyarakat yang tidak tau persoalan. Karena mereka hanya dijadikan bagi yang berkepentingan.

Kerusuhan antar etnik yang seringkali terejadi hal ini menandakan ada sesuatu yang keliru dalam hubungan sosial masyarakat di daerah ini, dampak politis dari wacana SARA yang subjektif itu tidak tuntas akar persoalan dari setiap kerusuhan, karena SARA akhirnya menjadi sensitif untuk di bicarakan dan menyatakan hal yang tabu. Kerusuhan di Tobelo Halmahera Utara segera teratasi berbeda dengan kasus bernuansa SARA di daerah lain di Indonesia seperti pada, Ambon, poso dll.

Keragaman suku, adat-istiadat agama di Tobelo Halmahera Utara, hal ini menyebabkan sikap keterbukaan menerima segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. Sehingga kerusuhan di Tobelo segera di selesaikan dengan pendekatan multi kulturalisme utamanya pendekatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam bingkai "Hibua Lamo" sebagai wadah pemersatu dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat Tobelo khususnya di Halmahera Utara.

Selain itu Upaya pembinaan kerukunan beragama telah dilakukan dengan melibatkan semua unsur baik Pemerintah, Masyarakat, Agama dan Adat serta unsur organisasi Pemuda dan sosial lain dalam upaya pembinaan melalui ; (1) Gerakan dialog keterbukaan antar tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kabupaten dan kecamatan, (2) Penyuluhan agama menyangkut kesadaran kerukunan hidup umat beragama melalui rumah Ibadah Mesjid, Mushallah, Majelis Ta'lim, Remaja Mesjid dan Gereja, Jemat Gereja serta organisasi keagamaan lainnya, dan (3) Pembinaan melalui institusi Adat yang sangat dihargai dan hormati oleh masyarakat setempat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Dengan model pengelolaan kerukunan beragama berbasis nilai-nilai kearifan lokal ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam bertetangga tanpa membedakan Ras, Suku dan Agama yang menonjol adalah rasa kekeluargaan. Hal inilah yang mendorong sehingga dapat terbina dan terpelihara nilai kekeluargaan dalam masyarakat sebagai wujud dari warisan leluhur masa lalu yang diimplementasikan dalam kesadaran nilai-nilai kearifan lokal, sehingga Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya tetap hidup berdampingan aman dan damai sejahtera dalam bingkai kerukunan antar umat beragama, berbeda prinsip dan keakinan (pandangan teologis) namun tetap menghargai dan menghormati sebagai sesama manusia yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari Tuhan yang Satu sebagai pencipta alam semesta atau *Jou gikirimoi*. Untuk itu kehadiran manusia dimuka bumi sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia bukan sebaliknya, sehingga manusia dapat hidup rukun, damai dan bahagia antara sesamanya sebagai tujuan akhir dari sebuah proses kehidupan manusia diatas permukaan dunia ini khususnya Tobelo dan Halmahera Utara Pada umumnya tercipta masyarakat yang damai, toleran, dan hormani yang di dambakan masyarakat Tobelo Pasca konflik.

Menurut Rusdi Doya Kemenag Halut, menyatakan bahwa Pembinaan umat beragama kedepan lewat FKUB perlu ditingkatkan lewat jalur koordinasi dan antisipasi awal apabila terjadi kekacauan di masyarakat maka penyelesaian melibatkan instansi terkait.¹⁹²

Hal senada berdasarkan fakta di lapangan bahwa Pemicu insiden sering di picu oleh ula anak muda dalam pesta dan mereka minum miras dan mabuk-mabukan dalam pesta. insiden di popilo bukan persoalan syarah, tapi persoalan batas dan potensi desa. Selain itu Pembinaan Kandepak Halut terhadap umat beragama lewat: penyuluh, majlis ta,lim, TPQ dll. Peran tokoh-tokoh agama, pelesain kasus Mamuya dengan pendekatan keamanan, kemenag juga punya peran penting dalam menyelesaikan masalah lewat Bimas Kristen, dan pemerintah untuk menyelesaikan proses penyelesaian. Selanjunya hal ini juga di pertegas oleh Rusman Soleman;

Kerukunan beragama; merujuk pada Visi dan Misi Pemerintahan Halmahera Utara, salah satu adalah menjaga stabilitas keamanan masyarakat selalu aman dan damai untuk memperoleh kemajuan dalam wadah hibua lama. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat terbina secara baik serta lembaga-keagamaan lain. Melaksanakan hari-hari besar Nasional dan keagamaan bersama. Pembinaan keagamaan bersama antara kandepag dan FKUB Bersama. Pelepasan dan penjemputan Jama Haji Kab Halut. Menyelenggarakan MTQ dan STQ Kementerian Agama Halmahera Utara. Kerukunan agama di Halut tercipta dengan baik selama ini.¹⁹³

Bupati/Jiko makalano menyatakan bahwa Pasca kekonsiliasi antara masyarakat dengan pemerintah serta semua konponen yang terlibat dalam konflik di Tobelo/Galela dan Halmahera Utara pada umumnya telah membuka diri untuk saling menerima dan berjanji untuk mengakhiri konflik dari kedua belah pihak dan janji hidup bersama di masyarakat secara damai bersama menjaga ketenteraman. Sebagai pemerintah dan pemangku adat mengharap perdamaian tetap tercipta di bumi Hibualama sebagai simbol pemersatu masyarakat Tobelo-Galela dan Halmahera Utara secara keseluruhan tetap menjaga keutuhan masyarakat.¹⁹⁴

¹⁹²Wawancara: Menurut Rusdi Doya Kemenag Halut, Tobelo.

¹⁹³Mantan Wakil Bupati, wawancara DR. Rusman Soleman, SE. M.AK.

¹⁹⁴Lihat Hein Namotemo dan Hibua Lamo, 2008, h. 51.

Konflik horizontal yang melanda propinsi Maluku Utara dan berimbas ke Tobelo dari berbagai lini, merupakan potensi konflik yang maha dahsyat, bila agama tidak di pahami secara baik dan benar. Agama tidak di pahami dalam aspek- normatif teologis, tapi lebih papa tataran realitas yang memberikan ruang kepada penganut untuk melakukan interpretasi sesuai dengan kondisi di hadapi dalam masyarat dimana pengut umat beragama berada.

Adapun sebab-sebab konflik antara lain kesenjangan sosial, ekonomi, politik, etnis, juga menyangkut isu SARA yang dijadikan sebagai pemicu konflik antar agama yang terjadi di mana-mana.¹⁹⁵ Kota Tobelo adalah salah satu wilayah yang memiliki paham keagamaan yang bersifat (*multi kulturalistik*) yang dijadikan sampel penelitian Upaya pembinaan kerukunan beragama pasca konflik di Tobelo, dan ingin membangun kometmen bersama dalam bingkai persaudaraan (*Giodutu*) dalam wadah *Hibualamo* sebagai Falsafah hidup orang-orang yang mendiami jazirah Halmahera Utara.

Kerukunan hidup beragama hanya dapat di capai apa bila masing-masing agama bersikap lapang dada satu sama lain, dan juga klaim eksklusifisme- teologis harus di hindari. Untuk menciptakan kerukunan atas dasar itu, maka bukan semangat untuk menang sendiri yang perlu di kembangkan, adalah prinsip "setuju dalam perbedaan " maknanya bahwa orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidup, dengan kebebasanya untuk menganut keyakinan agamanya yang di anut. Orang-orang Tobelo Halmahera Utara sejak dulu, hidup rukun dan damai selalu mengedepankan sifat kekeluargaan, karena mereka berasal dari keturunan sama "*Hoano ngimoi/Soa Mogiowa*" dan berhimpung di bawah wadah "*Hibualamo* " sebagai wadah pemersatu. Akan tetapi dalam catatan sejarah konflik di tanah air tragedi Tobelo di nilai sangat sadis dan biadab, di mensi familjar yang di junjung tinggi dengan pendekatan adat

¹⁹⁵Lihat. Abdul Asis Saldina, h. 31.

budaya “Hibualamo” lembaga adat merupakan simbol perekrut yang menampung semua unsur “perbedaan ” baik agama bahasa, etnis, serta pola hidup kekerabatan sesama mereka, ternyata tidak menemukan lagi resep yang menjawab untuk menghentikan gelombang kerusuhan.

Kerukunan hidup beragama dan solidaritas sosial yang begitu kuat dan membudaya di masyarakat Tobelo selama ini seolah-olah putus begitu saja akibat kerusuhan yang melanda tahun 1999/2000 yang lalu. Antara kelompok Islam melawan kelompok Kristen yang menelan korban jiwa yang cukup banyak begitu juga harta benda di antara kedua belah pihak yang bertikai. Desa-desa muslim yang mendapat imbas kerusuhan di kecamatan Tobelo antara lain: desa Goulogo, Togoliua, Gorua, Popilo, kampung baru gamsungi dan wari. Gamsungi dan Wari yang mendapat serangan dari pihak Kristen dan menelan korban sekitar 800 orang lebih dan di perkirakan 200 orang muslim di bakar hidup-hidup di Mesjid Baitulrahman di desa popilo. Bukti-bukti kuburan masal masi ada terdapat di depan halaman mesjid seperti dikemukakan oleh Muhammad dan Samiun Korois Informasi Anggota Masyarakat: Pembantain , Kuburang Masa! 200 orang lebih dan dimakamkan di depan mesjid Popilo pada masa rusuh oleh Aparat keamanan dan masyarat popilo yang datang dari Galela dalam pengunsian.¹⁹⁶

Kondisi terakhir masyarakat Popilo dan Gorua pada saat peneliti dilapangan, hubungan antar umat beragama menurut Bapak Imam Mesjid Anshar Popilo (Imam Tamrin Lajau), Kristen –Islam sesudah pasca rusuh ada sekat pemisah, dibandingkan sebelum rusuh tidak ada sekat, juga masi ada rasa takut atau was-was terutama ibu-ibu Masi trauma akan terjadi lagi kalau ada factor pemicu anak-anak muda sering berkeliahi, mabuk dst. Kondisi terakhir di Pilolo dan Mede ada ketegangan karena perebutan potensi desa paser/tambang.¹⁹⁷

¹⁹⁶Muhammad dan Samiun korois, Tokoh Masyarakat Popilo, Wawancara, Tobelo, 25 September 2018.

¹⁹⁷Tamrin Lajau Imam Mesjid Anshar Popilo, Wawancara, Tobelo,26 September 2018.

Demikian juga dilansir oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam ini di wakili oleh KESBANPOL bahwa kasus yang terjadi di Popilo adalah persoalan batas wilayah, bukan Agama dalam hal ini, Kesbangpol dan FKUB, punya peran besar dalam membina umat singga kehidupan toleransi umat beragama di tobelo tetap terjaga dengan baik.

Kasus Polilo dan Mede adalah persoalan potensi desa (tambang pasir) bukan persoalan agama . Masyarakat popilo dan mede serta sebagain masyarakat muslim tobelo masi menyimpan trauma tentang masa lalu sehingga mereka tetap waspada kemungkinan yang akan terjadi kembali, tapi sejauni pasca bentrok sudah beransur-ansur membaik karena ada upaya perdamaian pihak Pemerintah Kabupaten.¹⁹⁸ Sampai saat ini konflik antar umat beragama dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Menciptakan perdamaian dan toleransi bersama dengan umat yang lain dapat dilihat dalam bentuk, gotong royon bersama dan selain itu buka puasa bersama.¹⁹⁹

Konflik ini juga tidak hanya di Tobelo tapi berimbas sampai di Kecamatan Loloda Utara dan mengakibatkan semua rumah-rumah muslim hancur terbakar seperti Desa Ngajama, Tate dan Pocau, terkecuali desa Supu sekalipun dikelilingi oleh beberapa desa Kristen seperti desa Posi-posi, Podolo, Teru-teru dan desa Igio. Di daratan Halmahera Utara.

Menurut hasil pengamatan selama berada dilokasi penelitian di Tobelo Halmahera Utara, sesudah kerusuhan telah tercipta kerukunan agama dengan baik dan harmonis dalam masyarakat baik Islam maupun Kristen. Hal ini terjadi karena didukung oleh beberapa faktor antara lain; (1) Keterlibatan semua tokoh agama baik Islam maupun Kristen, tokoh masyarakat, Adat dan Pemuda.(2) Keterlibatan semua institusi Pemerintah, Masyarakat dan Agama serta organisai sosial lainnya. Faktor-faktor tersebut diatas menjadi faktor penentu dan pendorong terciptanya kerukunan masyarakat dan kerukunan agama pasca kerusuhan di

¹⁹⁸Drs.Samsuddin Rasyid Sekretaris Kesbanpol Halmahera Utara, Wawancara, 5 Juni 1018.

¹⁹⁹ Drs.Samsuddin Rasyid, Wawancara, 6 Juni 1018.

Tobelo dan Halmahera Utara. Sekalipun kondisi terakhir mencuak kasus internal umat beragama di Mamayu, GMIH dengan SSI, Perpecahan GMIH Artodoks dan GMIH Reformasi Fersi Pendeta Tod Duan. Hal ini di perkuat oleh Pendeta Jeane Djou tentang Dualisme kepemimpinan GMIH-SSI saling merebut kepemimpin Jemaat dalam penyelesaiannya Bimas Kristen tidak dilibatkan dalam konflik internal.²⁰⁰ Demikian juga kasus Popilo dan Mede dalam persoalan batas Wilayah atau potensi Desa (tambang), tidak berarti mengganggu kerukunan beragama di Tobelo dan Halmahera utara pada umumnya.

E. Analisis Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Tobelo

Tobelo adalah ibu kota Kabupaten Halmahera utara yang menjadi sasaran penelitian yang terkait dengan penyelesaian konflik antar umat beragama di Tobelo. Masyarakat Tobelo adalah sangat plural dari sisi agama maupun budaya dan sangat kental dengan nilai kearifan lokal sehingga mereka hidup rukun dan damai antara pemeluk agama ini terlihat ketika peneliti berada di lapangan apalagi dalam suasana bulan Ramadhan mereka saling menghargai antara penganut agama sekalipun secara psikologis trauma konflik masih membekas dalam hati mereka dan sering terpikirkan semoga peristiwa ini jangan terulang lagi. Secara internal konflik antara Jemaat Kristen Sinode GMIH dan SSI belum terselesaikan pasca putusan MK. Kedua belah pihak harus membuka diri untuk menyelesaikan tanpa harus mengorban masyarakat dengan mempertahankan ego dan kepentingan secara pribadi atau kelompok. Pasca konflik di Tobelo dan Halmahera Utara dapat di selesaikan dengan cepat dibandingkan dengan daerah lain seperti Ambon dan Poso karena pendekatan lebih kemasyarat bawah dengan pola penyelesaian konflik secara kekeluargaan satu darah dan keturunan "*giadutu-gianongoru*" peran budaya lokal hibua lamo sangat strategis dalam penyelesaian konflik antarumat beragama.

²⁰⁰Jeane Djou, S. Ag. Pendeta, Bimas Kristen Kemenag Halut, Wawancara, Tobelo, 8 Juni 2018

Relasi antar umat beragama terbangun dengan baik pasca konflik antara kristen muslim dengan nilai –nilai kearifan lokal dengan pendekatan giadutu dan gianongoru satu darah atau satu keturunan serta nilai kekeluargaan. Kondisi ini yang perlu dipertahankan dan dirindukan oleh masyarakat yang pernah dilanda konflik di Tobelo Halmahera Utara beberapa tahun silang 1999/2001.

Pasca konflik Kondisi kerukunan antar umat beragama berjalan dengan bagus. indikatornya, masing-masing umat beragama saling menghormati dan menghargai , dalam pelaksanaan ibadah dengan aman mereka tidak hantui dengan rasa takut seperti terjadi pada masa sebelumnya. Demikian pula setelah konflik sering terjadi insiden di masyarakat khususnya anak mudah pesta dan mabuk-mabukan selain pembakaran sekolah Al-Khairat yang memicu amarah umat Islam di Tobelo dan Maluku Utara tepi itu semua dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan oknum atau pelaku pembakaran telah diamankan dan ditangani oleh aparat kepolisian. Selanjutnya sikap intoleran dan paham radikalisme belum terindikasi baik secara institusi/lembaga maupun secara perorangan. Ada beberapa insiden terjadi itu bukan berarti kelompok teroris /radikalis tetapi itu hanya kesalahan paham aliran keagamaan dapat diduga sebagai aliran wahabi demikian juga yang terjadi Galela/Luwari aliran Lu dan La. Ada temuan bendera isis, tetapi sebatas simpatisan dan aparat segera mengamankan, akan tetapi itu hanya bersifat personal. Berdasarkan informasi dan asumsi tersebut diatas maka kami sampaikan beberapa pandangan dan masukan beberapa tokoh agama, adat, dan Pemerintah yang merupakan Narasumber melalui hasil wawancara mendalam terhadap pihak terkait menyangkut penyelesaian konflik antar umat beragama.

Penyelesaian konflik antara Islam-Kristen telah dilakukan lewat perjanjian damai dengan pendekatan budaya lokal "*Hibua Lamo*" beberapa waktu yang lalu dan mereka bersepakat untuk mengakhiri konflik dan tidak akan mengulangi. Konflik intern umat kristen

telah dilakukan penyelesaian pasca putusan MA tentang senketa BPHS GMIH dan BPHI SSI tidak menemukan titik temu karena masing-masing mempertahankan dalilnya dan kepentingan kelompok yang menganggap benar dan mengabaikan kondisi riil yang ada di masyarakat. Pasca putusan MA kedua belah pihak diharapkan untuk membuka diri melakukan upaya rekonsiliasi (perdamaian) tanpa harus melihat siapa yang benar atau salah demi kepentingan Jemaat Gereja dan Institusi GMIH Tobelo. Sementara itu sekretaris BPHS GMIH Pdt Verdianus Guselaw, M. Teol; menyatakan sekalipun ada Putusan MA, tapi kami menganggap putusan itu tidak terikat dan belum Final masi berstatus PK, sehingga kami menghimbau kepada jemaat Gereja tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa tanpa terpengaruh putusan yang belum mengikat tersebut.²⁰¹ Berbeda dengan pandangan Tod Duan seharusnya mereka mengikuti dan tunduk pada putusan MA yang sudah final dan mengikat seharusnya patut pada aturan hukum tersebut.²⁰² Lebih lanjut menurut Pdt Todduan; konflik internal umat Kristen Tobelo telah diupayakan rekonsiliasi berdasarkan putusan MA RI Nomor : 3016 K/PDPT/2017, dan putusan pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nomor 06/PDT/No. 17/PT, TTE tanggal 8 Mei 2017. Menyatakan bahwa “ BPHS GMIH yang Sah adalah BPHS GMIH hasil sidang Sinode Istimewa (SSI; GMIH yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 September 2013”). Seharusnya pihak Pdt Anton Piga STh dan Pdt Denius Ice, MTh dkk menerima atas putusan MA yang mengikat secara hukum dan menerima upaya perdamaian.²⁰³ Dengan putusan MA tersebut diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima dan upaya melakukan kekonsiliasai untuk menciptakan perdamaian di Tobelo dan Jemaat gereja GMIH di Halmahera Utara, sehingga tidak berimbas ke daerah lain di Maluku Utara. Konsekwensi hukum dari putusan MA itu, bahwa semua aset GMIH berada dibawah pengelolaan dan pengawasan BPHS GMIH yang sah dibawah kepemimpinan Pdt.

²⁰¹ Pdt. Verdianur Guvelaw, M. Teol, Wawancara, Tobelo. 5 Juni – 2018

²⁰² Pdt. Tod Duan, Wawancara, Tobelo. 22 September 2018.

²⁰³ Tobelo Wawancara; Tod Duan, 22 September 2018

Lewian Sambaina, MTh selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Alven Ternate, MTh selaku Sekretaris Umum Sinode GMIH yang beralamat Jln. Kawasan Pemerintahan (Depan kantor Bupati) Halmahera Utara.²⁰⁴ Peneliti melihat peralihan aset ini yang menjadi persoalan dan perdebatan panjang kedua belah pihak saling mempertahankan sampai saat ini sekalipun ada upaya negosiasi dan rekonsiliasi yang sedang berjalan dengan harapan semoga konflik internal agama di Tobelo segera diselesaikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pdt. Abram Igu, M.Si bahwa Konflik tidak semuanya salah, perlu dilihat latar belakang mengapa terjadi konflik dari kedua belah pihak yang bertikai apakah persoalan intenal atau eksternal, Penyebab lain karena miras dan mabuk-mabukan anak mudah dan mereka saling berkelahi. Konflik inter umat beragama kristen versi GMI dan SSI setelah putusan MA semua pihak belum dapat menerima dengan baik. konflik pada masa Hen Nomotemo dapat di selesai melalui pendekatan atau perjajian perdamaian kedua belah pihak dengan pendekatan budaya lokal hibua lamo. Terkait dengan insiden umat Islam-Kristen Pasca pembakaran sekolah Al-Kairat dapat diselesaian dengan pihak terkait sehingga relasi umat –kristen membaik/tenang dan tidak menimbulkan kecuriaan diantara mereka Islam-kristen di Tobelo. Salah satu wujud kebersamaan dan toleransi umat beragama itu dapat dilihat dari ucapan selamat bulan ramadhan dan idul Fitri dari SINODE GMIH bukan sekedar slokan tetapi merupan simbol perdamaian dan saling menghargai antara sesama umat beragama.²⁰⁵ Ketua MUI Halut H. Jaksa Samaun menyatakan bahwa Kepedulian sesama umat muslim /kristen saling berkomunikasi. Toleransi antara muslim –kristen berjalan dengan bagus. Relasi umat-Islam –Kristen pasca pembakaran sekolah alkhairat tergannggu tapi setelah itu hubungan kedua belah pihak berjalan dengan baik namum tetap waspada dengan pengalaman masa lalu semoga peristiwa ini tidak

²⁰⁴ Dokumen Pemberitahuan Keputusan MA RI. No. 3016 K/PDT/20017, tertanggal 22 Desember 2017.

²⁰⁵ Wawancara, Pdt. Abram Igu, M.Si. Tobelo, 5-6-2018

berulang lagi dan ini menjadi perhatian baik umat Islam maupun Kristen di Halmahera Utara.²⁰⁶

Berdasarkan pandangan Dr. Julianus Mojau (pendeta/ Dosen Unira) bahwa Pasca konflik peran hibua lama atau budaya lokal punya kontribusi besar dalam penyelesaian konflik di Halmahera Utara. Budaya adalah modal dasar atau kohesi sosial yang tumbuh dimasyarakat dan bukan di kontruksi oleh seorang dalam rangka meligitimasi kekuasaan tetapi benar-benar ada dan hidup di masyarakat sebagai perekat sosial. Budaya hibua lama lesu beberapa tahun terakhir pasca Hen Namotemo, terutama di pemerintahan Frans Nanere ini terlihat simbol dikantor bupati memakai baju adat dan rumah adat Hibua lamo tidak terurus dengan baik. Politisasi Budaya dalam rangka memperkuat kekuasaan, Intrik politik dan pelebagaan adat sebagai instrumen pemerintah yang otoritatif dalam penguatan kekuasaan. Perang pemerintah seharusnya menjadi mediator/mediasi terhadap berbagai masalah termasuk konflik internal agama Kristen dialami saat ini sehingga dapat terjadi konsialisasi dengan baik terhadap pihak yang bertikai. Hibua lama sebagai modal dasar atau modal sosial, Hibua lama lesu atau tidak ada pergerakan, sehingga kemunculan awal sebagai evoria dan tidak terinternasionalisasi dengan baik dan tidak terstruktur dengan baik di dalam masyarakat. sumbangan besar hibua lama dalam rekonsiliasi/perdamaian dalam konflik di Tobelo Halmahera Utara serta relasi antar umat beragama dan toleransi antar umat beragama terjalin dengan baik di masyarakat.²⁰⁷

Antisipasi penyelesaian konflik ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Halmahera Utara, menurut Wakil Bupati Muhlis Tapi Tapi menyatakan bahwa Pemerintah dengan stok khorder lain segera rapat dan menyampaikan informasi tentang situasi dan isu global terkait dengan isu konflik dan teroris dan radikalisme untuk mengantisipasi secara

²⁰⁶ Ketu MUI Halut (H. Jaksa Samaun), wawancara, Tobelo, 30-5-2018

²⁰⁷ Dr. Julianus Mojau (pendeta/ Dosen Unira) wawancara, Tobelo, 5-6-2018

dini di Tobelo Halmahera Utara.²⁰⁸ Toleransi beragama pasca konflik berjalan dengan baik di Tobelo dan Halmahera utara pada umumnya hal ini dapat dilihat di masyarakat beraktivitas seperti biasa baik muslim maupun Kristen. Konflik internal agama kristen antara GMIH dan SSI belum terselesaikan pasca putusan MA, upaya rekonsiliasi sudah dilakukan. Upaya pemerintah tetap mendorong supaya konflik ini segera berakhir dengan catatan mereka saling menerima, dan tidak mengedepan ego dan kepentingan kelompok jamaat masing-masing. Selanjutnya Kesbanpol Halut (Sekretaris) terkait isu konflik dan teroris/radikalisme dapat terdeteksi di beberapa titik dalam kaitan dengan pemahaman agama namun tidak dalam bentuk gerakan/ institusi , walaupun ada hanya sebatas simpatisan seperti memakai maju isis dan diantisipasi secara cepat oleh aparat keamanan yang berpotensi melakukan gerakan intoleran. Pemerintah segerah melakukan rapat bersama instansi terkait dalam rangka mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu radikalisme dan Bon yang terjadi di Gereja suraba jangan sampe ada pengaruh/dampak sampai di Tobelo Halmahera Utara yang akan menimbulkan potensi konflik antar umat beragama.²⁰⁹ menciptakan toleransi bersama dengan umat yang lain dapat dilihat dalam bentuk, gotong royong bersama dan selain itu buka puasa bersama dan kegiatan keagamaan lainnya kedua belah pihak turut berpartisipasi. Kantong-kantong ekonomi perlu digerakan dan ditingkatkan sehingga masyarakat dengan kesibukan mereka dapat melakukan hal yang produktif tidak melakukan hal-hal. Rotasi ekonomi perlu digerakan untuk mengatasi masyarakat terpengaruh dari gerakan radikalisme. Peran FKUB Kabupaten dan kerjasama dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan Kerukunan umat beragama pasca konflik sangat di harapkan. Kader belanegara dalam rangka meningkat kewaspadaan kesadaran nasionalisme. Menghidupkan Pos keamanan / ronda bersama kristen dan muslim di Tobelo.

²⁰⁸ Muhlis Tapi Tapi wakil Bupati, Wawancara, Tobelo, 29,5-2018.

²⁰⁹ Sekretaris Kesbanpol Halut (Samsudin Rasyid), wawancara. Tobelo, 29-30-2018

Pandangan Kapolres Halut, Masalah konflik telah berakhir dan harapan masyarakat semoga kondisi tidak berulang kemabali seperti pada tahun 1999/2000 dengan harapan Tobelo dan Halmahera Utara pada umum tetap aman dan terkendali. Toleransi agama dan hubungan masyarakat berjalan dengan baik atau bagus dan menjalankan aktivitas masyarakat sebagai mana biasa, sekalipun adanya peristiwa bom gereja surabaya , namun masyarakat tobelo tidak terpengaruh atau berdampak negatif atau ketakutan. Koordinasi dengan stakholderk terkait dengan pembinaan dan isu terorisme, demikian juga penanganan konflik segera teratasi pengalaman masa lalu mudah-mudahan tidak terulang itu merupakan pengalaman pahit, pengalamanitu tertanam dalam memori generasi muda tentang masa lalu.²¹⁰ Menyangkut Toleransi beragama berjalan dengan baik, watak maluku utara rama, mereka cepat berdamai harus mulai dari diri sendiri. Daya tanggal masyarakat tentang konflik dan radikalisme perlu ditingkatkan, Kondisi masyarakat Tobelo Halmahera pada saat ini aman dan terkendali. Hoax atau isu yang terkait dengan gerakan terorisme atau upaya adu domba dapat terdeteksi secara dini sehingga tidak terpengaruh dengan isu tersebut masyarakat sudah perpikir rasional. Ada gerakan yang terdi tapi itu hanya bersifat pribadi tidak menaman kelompok keagamaan tertentu. Dalam hal kewaspadaan gerakan terorisme dan pasca bon Gereja Subaya. Pihak polres dan pihak terkait telah melakukan rapat koordisi yang dipimpin langsung Oleh Bupati Halmahera Utara dalam rangka antisipasi dan pencegahan dini pengaruh paham radikalisme dan terorisme yang mengakibatkan terjadi konflik, Kapolres juga membentuk posko keamanan di setiap lingkungan atau desa dalam bentuk Pos jaga atau pos Ronda dari kedua konitas agama Islam - kristen dan secara bergiliran menjaga keamanan daerah atau lingkungan masing-masing di kecamatan Tobelo baik di Gosoma maupun di Kao.

²¹⁰ Irfan Indarto (Kapoires Halut), wawancara, Tobelo, 28-29- 2018.

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Roke Saway, bahwa Kelompok garis keras atau teroris tidak ada di Tobelo atau Galela karena tidak ada indikasi atau gejala-gejala yang menunjukkan tidak terdeteksi baik yang bersifat organisasi atau kelompok maupun perorangan. Penyelesaian konflik dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya lokal (Hibua Lamo) dengan konsep giadutu dan gianongoru satu keturunan dan satu darah atau hubungan persaudaraan itu sangat kental di Tobelo dan pendekatan ini dianggap sangat efektif.²¹¹ Harapan pemerintah daerah Halmahera Utara Bupati sekaligus sebagai *Jiko makalano*, mengharapkan bahwa "Pasca kekonsiliasi antara masyarakat dengan pemerintah serta semua komponen yang terlibat dalam konflik di Tobelo/Galela dan Halmahera Utara pada umumnya telah membuka diri untuk saling menerima dan berjanji untuk mengakhiri konflik dari kedua belah pihak dan janji hidup bersama di masyarakat secara damai bersama menjaga ketenteraman. Sebagai pemerintah dan pemangku adat berharap perdamaian tetap tercipta di bumi Hibualama sebagai simbol pemersatu masyarakat Tobelo-Galela dan Halmahera Utara secara keseluruhan tetap menjaga keutuhan masyarakat". Himpunan dan seruan ini juga dipertegas oleh Roke Sawai bahwa Kerusuhan di Tobelo segera/cepat diselesaikan dibandingkan di daerah lain di Indonesia karena melalui hubungan kekeluargaan atau saudara antara pihak Islam dan Kristen, komitmen sangat mengakar dalam masyarakat di Halmahera Utara Kata kuncinya "*Hubungan saudara, darah, dan kekeluargaan*) hubungan ini dapat melunakan dari kepentingan lain termasuk doktrin agama yang diyakini masing-masing antar umat beragama. Pandangan ini juga pertegas oleh Sayuti Mauraji (Kesbanpol penanganan konflik/Kebangsaan) Toleransi berjalan dengan baik dengan melibatkan pemerintah FKUB, tokoh masyarakat, adat untuk melakukan pertemuan bersama dalam rangka antisipatif terhadap gangguan keamanan maupun gerakan

²¹¹.Roke Saway (tokoh masyarakat) wawancara. Tobelo, 29-5-2018.

radikalisme yang memecah belah bangsa dan persatuan. menghidupkan pos bela negara di Tobelo gosoma dengan melibatkan pemudah dari Islam-kristen jaga bersama untuk menjaga lingkungan dari gangguan keamanan masarakat. Realasi umat beragama terjalin dengan baik dari kedua pelah pihak Islam-kristen di Tobelo.²¹²

Hubungan harmonis telah terbinah mesrah begitu lama dalam masyarakat Tobelo, Galela bahkan semenanjung Zajirah Halmahera Utara namun hubungan itu tercoreng ketiga terjadi konflik horizontal yang melanda bumi *Hibualamo*. Rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian damai yang di prakarsai oleh anak cucu Hibualamo pada tanggal, 19 April 2001, “deklarasi damai” di lapangan hibua lamo sebagai upaya merekatkan kembali hubungan yang tercerai berai di bumi hibua lamo. Dengan demikian wadah *Hibualamo* mengandung nilai filosofi yang universal sebagai pusat kekerabatan tanpa membedakan asal-usul seseorang selama menerima nilai-nilai budaya masyarakat Hibualamo yang berorientasi kearifan lokal.

Hal ini dapat segera di antisipasi oleh Pemerintah dan Pihak terkait sehingga dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat kondusif kembali kerukunan antar umat beragama di Tobelo.²¹³ Hal ini di dukun dengan pernyataan tokoh agama ; Pengurus Mesjid Muttaqin Gorua (Modin/khatib) Mansur Yoba: Toleransi sangat bagus tercipta dalam masyarakat antara kedua belah pihak umat Islam dan Kristen sesudah rusuh semakin baik. Menurut Jamaludin B : Masyarakat saling menghargai antara satu dengan lain, menyatu atau berbaur dengan yang lain keluar masuk keluarga muslim dan Nasrani, dapat bersosialisasi antara satu dengan lain. Sering terjadi salah paham antara anak muda Muslim-Kristen pemicu adalah minuman keras atau mabuk bukan faktor agama.²¹⁴ Peneliti setelah melakukan

²¹² Sayuti Mauraji/Kesbanpol, penangan konflik/Kebangsaan, Wawancara, Tobelo, 5-6-2018

²¹³ S.S. Duan, wawancara Tobelo, 22 September 2018.

²¹⁴ Pengurus Mesjid Muttaqin Gorua Modin /khatib :wawancara , Mansur Yoba, 10 Juni 2018).

konfirmasi dengan Bapak Nisawa Salim Imam Masjid Raya Tobelo menyatakan: “Kondisi umat Islam khusus di Tobelo, aman seperti biasa,. Kondisi ini mudah-mudahan dapat terpelihara dengan baik setelah pasca rusuh salin mencurigai mulai hilang- tetapi harus tepat waspada.

Faktor-faktor pemicu yang sering muncul beberapa waktu yang lalu adalah anak-anak mudah sering minung dan mabuk dan menimbulkan korban, tetapi suasana ini masyarakat tidak terpancing dan segera diselesaikan oleh pihak yang berwajib bersama kordinasi dengan tokoh masyarakat kedua belah pihak Islam-Kristen. Pasca konflik Pada tahun 2003 setelah kembali ke Tobelo. Masyarakat masih dihantui ketakutan, namun kondisi ini kembali normal tahun 2005 keatas masyarakat semakin sadar bahwa kerusakan harus diahiri karena kedua belah pihak tidak saling menguntungkan malah merugikan harta bendan dan nyawa, dan hubungan kekeluargaan juga terganggu dan saling mencurigai antara kedua belah pihak Islam dan Kristen. Hubungan antar agama/toleransi beragama tercipta dengan baik seperti sebelumnya. Pembinaan umat dilakukan melalui Remas/Remaja mesjid, kegiatan social, olahraga dan mengaji, baca barjanji untuk mengisi kegiantan keagamaan sesudah rusuh.

Pembantu Iman Mesjid Attaqwa Dufa-dufa Tobelo “ Kondisi Umat beragama semakin terbuka dan saling menerima (keluar-masuk) antara satu dengan lain.Toleransi beragama tercipta dengan baik dan aman,Tidak memandang sebela mata, tetapi saling menghargai. Hidup atau pergaulan dalam masarakat semakin bebas tidak ada keraguan lagi.²¹⁵ Juga menurut Muhammad Kari Masyakat hidup tenan tidak takut lagi,Toleransi beragama berjalan dengan baik,Suasana kekeluargaan semakin akrab karena masyarakat

²¹⁵Muh Ahmad Pembatu Imam Mesjid Dufa-dufa Tobelo, Wawancara, Tobelo, 10 Maret 2018

dufa-dufa mayoritas Islam/muslim, Rasa dendam tidak ada lagi mereka suda lupa hingga hidup berdamai dalam masyarakat Tobelo".²¹⁶

Harapan pemerintah daerah Halmahera Utara Tokoh masyarakat sekaligus sebagai *Jiko makalano*, mengharapkan bahwa "Pasca kekonsiliasi antara masyarakat dengan pemerintah serta semua konponen yang telibat dalam konflik di Tobelo/Galela dan Halmahera Utara pada umumnnya telah membuka diri untuk seling menerima dan berjanji untuk mengakhiri konflik dari kedua belah pihak dan janji hidup bersama di masyarat secara damai bersama menjaga ketenteraman. Sebagai pemerintantah dan pemangku adat mengharap perdaian tetap tercipta di bumi Hibualama sebagai simbol pemersatu masyarakat Tobelo-Galela dan Halmahera Utara secara keseluruhan tetap menjaga keutahan masyarakat".
Himbauan dan seruan ini juga dipertegas oleh Roke Sawa ; Kerusuhan di Tobelo segera/cepat diselesaikan dibandingkan di daerah lain di Indonesia karena melalui hubungan kekeluargaan atau sudara antara pihak Islam dan Kristen, kometmen sangat mengakar dalam masyarakat di Halmahera Utara Kata kuncintanya "*Hubungan saudara, darah, dan kekeluargaan*) hubungan ini dapat melunakan dari kepentingan lain termasuk doktrin agama yang di yakini masing antar umat beragama."²¹⁷

Dengan model penyelesaian konflik dan pembinaan kerukunan antar umat beragama berbasis kearifan lokal ini di harapkan dapat tercipta kerukunan yang hormoni, damai sejahtara di bumi Halmahera Utara khususnya di Tobelo. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut peneliti masyarakat Tobelo dengan budaya terbuka mereka cepat menerima kenyataan itu sebagai pelajaran yang berharga, bahwa kedepan masyarakat harus hidup tetap aman dan damai singgga dapat melaksanakan aktifitas sebagai mana layaknya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.

2018 ²¹⁶Muhammad Kari, Wakil Imam Mesjid Attaqawa Dufa-Dufa Tobelo, Wawancara, Tobelo, 26-Juli

²¹⁷ Roke Sawai, Asisten I Kab. Halut , Wawancara, Tobelo, 5 Juni 2018.

Kondisi ini juga peneliti melihat secara langsung pada tanggal 5-10 juni 2018 di Tobelo bahwa masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi, Ibu-ibu yang menjual sayur, ikan di pasar, maupun para buru pelabuhan tetap lancar dan aman, demikian juga dalam melaksanakan ibadah baik Muslim maupun Kristen sebagaimana biasa tanpa ada ketakutan. Hal ini juga di pertegas oleh kepala Kementerian Agama Halmahera Utara bahwa, sampai saat ini kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, aman, damai, dan harmoni antara sesama pemeluk agama.²¹⁸

Hanya saja secara psikologis sampai saat ini mereka masi mengalami trauma psikologis yang belum menghilang dalam benak yang pernah mereka alami pada masa rusu, dan mereka berharap jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Masyarakat Halmahera Utara khususnya Tobelo sangat majemuk dan heterogen, dengan kemajemukan adalah suatu kekuatan, karena kekuatan itu adalah saling menghargai dan menghormati, saling menghargai adalah inti kerukunan beragaman. Kerukunan dibangun atas kekuatan primordial lewat kekeluargaan *gia dutuku* dan *gio nongoru*. Roh utama ini yang hilang, maka penulis ingin mengembalikan agar masyarakat Tobelo duduk kembali bersama di dalam rumah adat Hibualamo secara aman, damai dan harmonis dalam kehidupan umat beragama.

Hal yang menarik dan menjadi temuan penelitian ini adalah penyelesaian konflik antar umat beragama di Tobelo harus dibangun di atas nilai-nilai kearifan lokal hibualamo, hubungan antara kedua belah pihak Islam-Kristen tetap terjaga dan terpelihara di atas nilai kekeluargaan *giadutu* dan *gia nongoru*, tanpa harus saling meniadakan agama, suku dan adat. Pasca konflik kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik sehingga relasi antara Islam-Kristen tetap terjalin damai saling menghormati, rukun, dan harmoni serta tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, di harapkan pula agar perjumpaan antara Islam dan Kristen di daerah ini tidak dalam konteks saling meniadakan

²¹⁸Salmin A. Kadir, Kandepag Kementerian Agama, wawancara, 6 Juni 2018

tetapi sebaliknya saling menghormati dan melindungi masing-masing dalam kerangka NKRI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya maka dapat di tarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik antar umat beragama di Tobelo harus di bangunan diatas nilai-nilai kearifan lokal hibuah lamo, hubungan antara kedua belah pihak Islam-Kristen tetap terjaga dan terpelihara diatas nilai kekeluargaan giadutu dan gia nongoru, tanpa harus saling meniadakan agama, suku dan adat . Pasca konflik kerukunan antar umat bergama tetap terjaga dengan baik sehingga relasi antara Islam-Kristen tetap terjalin damai saling menghormati , rukun, dan harmoni serta tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, di harapkan pula agar perjumpaan antara Islam dan Kristen di daerah ini tidak dalam konteks saling meniadakan tetapi sebaliknya saling menghormati dan melindungi masing-masing dalam kerangka NKRI. Demikian pula penyelesaian konflik antar umat kristen telah dilakukan pasca putusan MA tentang senketa BPHS GMIH dan BPHI SSI tidak menemukan titik temu karena masing-masing mempertahankan ego dan kepentingan kelompok yang menganggap benar dan mengabaikan kondisi riil yang ada di masyarakat. Pasca putusan MA kedua belah pihak diharapkan untuk membuka diri melakukan upaya rekonsiliasi (perdamaian) tanpa harus melihat siapa yang benar atau salah demi kepentingan Jemaat Gereja dan Institusi GMIH Tobelo.
2. Kerukunan antarumat beragama pasca konflik adalah terciptanya suatu suasana dalam masyarakat yang aman, tenang, tenteram dan harmonis dalam melaksanakan aktifitas sosial ekonomi, budaya dan agama serta beribadah dengan aman dan nyaman. Saling

menghormati dan menghargai antara umat beragama, serta melahirkan sikap toleransi dan tenggang rasa dengan penuh kasih sayang. Masyarakat Tobelo Halmahera Utara sangat majemuk, dengan kemajemukan adalah suatu kekuatan, karena kekuatan itu adalah saling menghargai dan menghormati, saling menghargai adalah inti kerukunan beragaman. Kerukunan dibangau atas kekuatan primordial lewat kekeluargaan *gia dutu* dan *gio nongoru* dalam bingkai adat Hibualamo. Dalam menciptakan kerukunan hakiki bukan kerukunan agama yang bersifat semu atau sementara.

3. Hubungan antarumat beragama sebelum konflik di Tobelo Halmahera Utara menunjukkan bahwa suasana kekeluargaan sangat baik karena saling mengenal dan saling menyapa antara satu keluarga dengan keluarga yang lain sekalipun berbeda agama, namun setelah konflik hubungan dan relasi kekeluargaan ini mulai pudar, karena saling mencurigai dan tidak percaya kepada komunitas agama yang satu dengan agama yang lain. Tetapi kondisi masyarakat Tobelo pasca konflik menjaling hubungan baru antara Islam-Kristen, maka konflik Tobelo dapat berakhir dengan cepat dibandingkan di daerah lain di Indonesia, karena melalui hubungan kekeluargaan atau saudara antara Islam-Kristen. Hubungan *Gia dutu/ gia nongoro* adalah sebuah konsep bersifat lokal memiliki perspektif global dan universal. Konsep *dutu* seyogiannya dipahami kembali sebagai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang melampaui batas-batas geneologis, hubungan kekerabatan yang bernilai tinggi. Hubungan *dutu/gia nongoru* tidak dianggap sebagai *o nyawa masomowa* (orang lain/bukan keluarga), tapi kita semua adalah bersaudara.
4. Dalam upaya penyelesaian konflik antar umat beragama dilakukan secara sinergitas melibat institusi keagamaan antara lain; MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah, Alkhairat, Remaja Mesjid, Dewan Gereja, Sinode, GEMIH, Lembaga adat

Hibualamo, sebagai perekat dan lambang pemersatu, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal hibualamo. Model penyelesaian konflik dan pembinaan kerukunan antar umat beragama harus berbasis kearifan lokal dan melibatkan semua unsur antara lain; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh remaja maupun pemerintah. serta melibatkan semua institusi keagamaan baik Islam maupun Kristen dan pembinaan harus di mulai dari mesjid maupun gereja sebagai simbol bagi orang-orang yang beragama, dan lebih penting lagi pola pembinaan dan penyelesaian konflik di masyarakat harus di mulai dari akar rumput atau dari bawah ke atas (Kultural), bukan dari atas kebawah atau terstruktural yang selama ini di lakukan oleh pemerintah, dan di harapkan semua unsur yang terlibat harus menahan diri dan mau mengakhiri konflik yang melanda daerah ini.

B. Implikasi Penelitian

1. Pasca rekonsiliasi perdamaian di bumi Hibualamo masyarakat hidup rukun dan damai, maka diharapkan kepada pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten hendaknya menjaga kerukunan umat beragama yang sudah terbina dengan baik ini dan lebih ditingkatkan hingga tercipta masyarakat yang damai dan toleran dalam menjalankan aktifitas kemasyarakatan maupun ibadah, bagi setiap pemeluk agama.
2. Bahwa untuk membangun kerukunan antar umat beragama kedepan di Tobelo dan Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya, maka diharapkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan pembinaan dan berdasarkan nilai-nilai lokaal dan dialog keagamaan dengan melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta institusi keagamaan lainnya.
3. Salah satu upaya penyelesaian konflik antar umat beragama serta pembinaan kerukunan antar umat beragama harus berdasarkan pada budaya lokal (*kearifan lokal*)

dan berorientasi kepada nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan dengan pendekatan Hibua lamo sebagai wadah pemersatu. Dalam upaya pembinaan kerukunan antarumat beragama dapat melibatkan semua unsur pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan stakholder lainnya. Dengan model pembinaan kerukunan beragama berbasis budaya ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui institusi Pemerintah, Organisasi keagamaan, dan Adat. Diharapkan kiranya hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait di Tobelo Halmahera Utara untuk selanjutnya melahirkan kebijakan publik khususnya dalam bidang pembangunan keagamaan serta membina kerukunan antarumat beragama di daerah ini dengan berorientasi pada nilai-nilai budaya lokal hibua lamo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Kitab.

Amal, Adnan. *Orang Galela Alam pikiran, Tradisi dan Budaya.* Jakarta: tp, 2013.

Aslan , Adnan . *Pluralisme Agama dalam Filsafat Islam dan Kristen Seyyed Hossein Nasr- John Hick.* Terj. Syahri A. Tanjung. Bandung: Alifya, 2004.

Ata Ujan, Andre. et.al. *Multikulturalisme: Belajar Bersama dalam Perbedaan.* Jakarta: PT. Indeks, 2011.

Alwy, Des dan Hamma A. Willard. *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak.* Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Aloysius, G. *The Study of Religion-in-Society: A View From Below*", dalam *Religion And Society.* Vol.42.,No. 1., March, 1995.

A.H. Din, Makbul, *Komunikasi Antarumat Berbeda Agama Dalam Konstruksi Budaya Lokal (Studi Kasus pada komunitas Islam dan Kristen di Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara)* .Desertasi, Bandun: Universitas Padjadjaran, 2015

Abdullah, Irwan dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global.* Cet. II; Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008.

Ajawaila, J. W. " Hibualamo: Upaya Mencari Jati Diri," dalam S.S. Duan, *Hein dan Hibualamo: Menelusuri Jejak Kepemimpinannya.* Tobelo: Tobelo Pos, 2008.

Aminudin. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar . 2006

Abdulrahman, M. Yusuf (ed.), *Ternate Bandar Jalur Sutra.* Ternate: LinTas. 2000

_____. *Studi Agama, Normativitas atau Historitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1999.

Arifin,Syamsul. *Studi Agama; Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporel.* Malang: UMM Pres. 2009

Armstron, Karen. *A Hintory of God : The 4,000-Year Quest of Judaism, Chistianity and Islam.* All right undar and pan-American Copyright conventions : Ballantine Books, New York, 1993.

Abdullah,Taufik. *Metodologi Penelitian Agama,* Cet. I. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998

Ahmad, Kasman Hi, ed. *Damai yang terkoyak Catatan kelim Dari Bumi Halmahera.* Cet. I. Ternate, Madani Press, 2000.

- Ali, Mukti. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Aqil Siraj, Said. *Prularisme dan Teologi Kerukunan*, makalah di sampaikan pada pelatihan muslimah NU, di Ternate. 19 Juni 2007.
- Amal Tomagola, Tamrin. *Republik Kapling*. Yogyakarta : Resist Book, 2006.
- Adeney W.F. "Toleransi", *Encyclopedia of Religion in Ethics*. Vol XII t.d
- Almunawar, Said Agil Husen. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Cet, I. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Alfred, R. R. Agama dan Politik, dalam Roland Robertson (ed.). *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993.
- Bulis, Al-Yasu'I. *al-Munjidu fi al-Lughati wa al-A'laam*, Beirut: Dar Masyriq, 2005.
- Baso, Ahmad. *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*. Jakarta: Desantara, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, Bungin, Burhan (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2015
- Bertrand, Jacques. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan. *Potensi Modal Sosial pada Budaya Lokal dalam pembangunan Daaerah*. Makassar, 2005.
- Basyuni, M. Muhammad. Menteri Agama RI, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Balitbang dan DIKLAT Departemen Agama RI, 2006.
- Badan Pusat Statistik. *Ternate dalam angka*. Ternate: BPS, 2015.
- Badan Pusat Statistik Halmahera Utara dalam angka 2015.
- Buku Pedoman Pelaksana: *Peraturan Bersama Kemenag dan Mendagri*. Sekretariat Badan Litbang dan Diklat RI Tahun 2006.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction; A Social Critique of The Judgement of Taste*. Paris: by Les Editional, 1979
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief : Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*. Jakarta : Paramadina, 2000
- Connoly, Peter ed. *Approach to The Study of Relegion*. Titerjemahkan dengan judul: *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Cet I. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Chang, William. *Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: INIS, 2003

- Durkheim, Emile. "The Elementary Forms of Religious Life", dalam *A Reader in Anthropology of Religion*. Michael Lambek, ed., Australia: Blackwell Publishing, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. edisi III Cet II: Jakarta: Balai Bustaka, 2002.
- Dinsie, H Amas & Rinto Taib. *Ternate; Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Perdamain Maluku Utara*. Ternate: LeKRa-MKR, 2008.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darajat, Zakiyah. *Perbandingan Agama*. Cet. II Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Effendy, Bahtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Fatoohi, Louay. *The Mystery Historical Jesus*, Bandung: Mizan, 2012.
- Giddens, Anthony dan David Held (ed). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Grose, George B et.al. *Tiga Agama Satu Tuhan*. Bandung: Paramadina. 1999.
- Hasan, Abu dkk. *Mujam Magayis Fil al-lughah*, Jilid III (tt. Mustafā al-Baby Al-Halaby, 139 H/1971 M).
- Husen Al-Munawar, Said Agil. *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta; Ciputat Pres. 2003.
- Humah, Darsis. "MIA' TONAKA: Properti Rights Orang-orang Tobelo Di Bidang Agraria". Laporan Penelitian. Ternate : LP3M, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama ; bagian I perdebatan budaya terhadap aliran kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Konghucu di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999.
- Haire, James. *Sejarah Gereja di Halmahera*. Jakarta: BPK.GM,1992.
- Hugh, Miall. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Terjemahkan oleh Tri Budhi Sasrio dengan judul *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husen, M. Rahmi ed. *Potret Gelisah Negeri Pinggiran, Prespektif Kritis Atas Maluku Utara*. Ternate: Pustaka FOSHAL, 2005.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. *Sosiologi Edisi Keenam*. Terj. Aminuddin Ram dan Titi Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*. Cet. III, Jakarta: BHARATARA, 1989.
- Hamim, Thoha dkk. *Resolusi Konflik Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kerukunan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya : Bina Ilmu, 1979.
- Harmoni, *Fenomena Demokrat Islams*. Vol III, No 12, 2004.
- Ibn Faris Ibn zakariyah, Abu Hasan, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* jilid III, t.t.: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1971.
- Iskandar, Syarifudin. *Konflik Etnik dalam Masyarakat Majemuk*. Malang: UM Press, 2006.
- Immanuel, Victor Tanja . *Pluralisme agama dan problema sosial; Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer* . Cet. I. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998.
- Junaidi, M. *Sejarah konflik dan perdamaian di Maluku Utara; Refleksi terhadap sejarah Moloku Kie Raha*; tt.
- J. Ngelow, Zakaria. *Monoteisme Trinitas Keilahian menurut Iman Kristen* " Makalah seminar" Alauddin Makassar, 17 Maret 1998.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Kuntowijoyo. *Identitas Polititik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Kementerian Agama Rēpublik Indonesia. *Alquran dan Terjemaahannya*. Bandung: Fitrah Rabbani, 2012.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Lesang, Indra dkk. *Konflik dan Pergerakan Sosial*. Yokyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Nottingha, Elizabet K. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawar Arab-Indonesia*. Jakarta : 1997.
- Mahmud, Adnan. *Membentang Nalar Gusdur*. Jakarta: Orbit Puplshing, 2016
- Mansurnoor, Arifin, *Historical Burden and Promising Future among Muslim and Christian Minorities in Western and Muslim Countries*" dalam *Islam and the west*, Chaider S. Bamualim (ed). (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri [UIN] Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Shiftung 2003.
- Ma'arif, A. Syafi'I, et.al. *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleransi*. cet.I. Depag Malut dan UMMU Press, Yogyakarta 2004.
- _____. *Masa Depan Islam di Indonesia, dalam Abdurahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute; The Maarif Institute, 2009.

- _____. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Moctar, Ikqra & Herman Oesman (ed). *Jalan Panjang Perdamaian, Sebuah Pemikiran Untuk Maluku Utara*. Ternate : PTD-PMU, 2007
- Siahaan , M. Hotman. *Agama dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Keislaman Yang Hanif*. Jakarta: Paramadina, 2013.
- _____. *Umat Islam Indonesia Memasuki Zaman Modern* "kata pengantar" dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet:I; Jakarta: Paramadina, 1992.
- _____. *Islam Doktrin dan Peredaban*. Cetakan Ke III; Jakarat: Paramadina. 1995.
- _____. *Islam Agama kemanusiaan, Membangun Tradisi Visi Baru Islam Indonesia*. Cet II. Jakarta, Paramadina, 2003.
- Mangunwijaya, YB. *Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Mudhar, M Atho. dalam Kasman Hi. Ahmad, *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleransi*. Cet. I, Ternate: Ummu Press, 2004.
- Mukhaer dan Nurdin Abbas. *Bara di Maluku Utara "Upaya Untuk Mempertahankan Sejengkal Tanah"*. Jakarta: Yayasan Lukman Harun, 2000.
- Mathar, M. Qasim. " *Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa Depan*". Orasi Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat dan Pemikiran Modern dalam Islam. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007.
- Manaf, Mudjahid Abdul. *Ilmu Penbandingan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994
- Mimery, Nehemiah. *Injil Synoptis : Injil Matius, Markus, Lukas*. Jakarta Barat : Mimery Press, tt.
- Muslim dalam Kitab-kitab Kuning*. Cet I. Jakarta: Puslitbang Pdd Agama dan Keagamaan Kemenag RI. 2011.
- Muharto, *Fitrologi Akar Perdamaian Dan Konflik*. Yogyakarta; Pustaka Puitika, 2015
- Martin, Richard C. *Approaches to Islam in Relegious Studes*. The university of Arizona Press, 1985
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak – Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Cet.II; Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Nata, Abbudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- N. Bellah, Robert. *Beyond Belief, Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta : LP3ES. 1994.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 2000.

- _____. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI-Press. 2010.
- Nasir, Haroon. "Religious Approach for Liberation from Poverty: A. Christian and Islamic Perspective". dalam *al-Mushir*, Vol. 43. Number. 4., 2001.
- Nakha'I , Imam. *Figih Pluralitas* . Cet. I. Jakarta: Puslitbang Pendidikan agama dan Keagamaan Kemenag RI, 2011.
- Narwako, J Dwi & Bagon Suyanto (ed). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet.V. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011.
- Nanere, Jan ed. *Halmahera Berdarah*. Ambon: BIMASPELA. 2000.
- Paul, Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT Gramedia, 1986.
- Putuhena, M. Saleh. *Perjumpaan Islam dan Kristen di Ambon serta Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*. Makalah, 2000.
- Puslitbang Kehidupan Beragama. Depag RI, *Fenomena Demokrat Islamis*. Harmoni, Vol III. Jakarta: 2004.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Relegion*. New York: Oxford university Pres, 1996.
- Robinson. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Budi Munawar. *Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme*. Jakarta, Grasindo, 2010.
- _____. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. cet I. Jakarta Paramadinah, 2001.
- Raharjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Budaya*. Cet. I; Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Pendekatan terhadap Islam Dalam Studi Agama*, dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*. Terj. Zakiyuddin Baidhawiy. Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2001.
- Rustam, Kastor. *Konspirasi Politik RMS Dan Kristen Menghancurkan ummat Islam Di Ambon Maluku*. Cet. II, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000
- Ridwan, M. Deden. Dalam Kasman Hi. Ahmad, *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleran*. Ternate: UMMU Pres, 2004.
- Rahim, Muhammad Ataur. *Jesus a Prophet of Islam*. London : MWH London Publishers, 1979.
- Saumur, Amanan Soleman, *Modal Sosial*, Jakarta: CV. Az-Zahra, 2013.

- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Cet IV . Bandung: Mizan, 1999
- _____. *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1998.
- Sirry, A. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Syuhada, Abduh. *Beragama Secara Kultural*. Harmani Vol, III No 10, 2004
- Soekarta, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. III. Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sahrodi, Jamali. *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Soetrisno, Loekman. *Konflik Sosial; Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press, 2003.
- Syafuan, Rozi. et.al. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, tt.
- Sapsuha, Taher. *Pendidikan pasca konflik; Pendidikan Multikultural Berbasis konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Cet 18. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sabri, Mohammad. *Keberagaman yang Saling Menyapa*. Yogyakarta: ITTAQA Press, 1999.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2009.
- _____. *Pengajar Kelas Pengelolaan Konflik dan Analisis Perdamaian Indonesia*. Departemen Sosiologi UNAIR. Tt.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Subagya, Rahmat. *Kepercayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1876.
- Sulaiman, Rusydi. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2014.
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. *Filsafat dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV ANDI OFFSET, 2007.
- Schuman, Olaf. *Keluar dari Benteng Pertahanan*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- _____. *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan*. cet I. Jakarta: Bpk Gunung mulia, 2004.

_____. 10 Ulama Bicara Isa Al-Masih dan Ajarannya (Membangun Kesadaran Kritis Hubungan Muslim Kristen). Jakarta: Kompas-Gramedia, 2013.

Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif Dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2013.

Steenbrink, Karel. *Kawan Dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1995.

Surwandono & Sidiq Ahmadi. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

Sitompul, ed. *Agama dalam Konflik; Mencari Format Kehadiran Agama-agama dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Bidang Marturia-PGI, 2005.

Thomas, F. O'dea. *Sosiologi Agama Suatu Pengenal Awal*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Tanja, Immanuel Victor. *Anatomi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Sebuah, Tinjauan Sosial Budaya Dalam, W.Siring, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa*. Jakarta :BPK GM. 2002.

Tonirio, Murid. DORO DERAKI. *Trinsformasi Sosial Ekonomi Pertanian Galela, Kab Halmahera Utara*. Jogyakarta: Tanah Air Beta, 2016

Ubaidillah, A dkk. *CIVIC EDUCATION, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Press, 2000.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja grafind Persada, 1980.

Usman, Sunyoto. *Integrasi dan Ketahan Nasional, Sumbangan Sosial terhadap ketahanan Nasional*. Jogyakarta: Gaja Mada University Press, 1995.

Wilfred, Cantwell Smith. *Kitab Suci Agama- Agama*. Jakarta : Teraju. 2005.

Wehr, Paul. *Conflict Regulation*, Boulder. CO: Wesview Press, 1979.

Webster's *New Tweticth century Dictionary of the English Langguage*. Unabridge 2 nd ed; t.t.: Williamcollins publisher, Inc.,t,th.

Waileruny, Semuel. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Obor Indonesia, 2010

Watt, William Montgomery. *Titik Temu Islam Kristen Persepsi dan Salah Persepsi*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996.

Yustion, dkk (Dewan Redaksi). *Islam dan Kebudayaan: Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993.

Yahya, Abjan dkk . *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Zulkarnain, dkk. *Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan*

Terisolasi di Pulau Enggano dalam Sinopsis dan Indeks Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003 Cet. I; Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2004.

http://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera10ubDmmJmT5Ipwk232IKew3ebm-.pdf
(Hubungan Kristen-Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara).

<http://www.reocities.com/Augusta/fairway/9542/terus.htm> Hidayatullah Edisi Maret 2000 .

Hasil Penelitian dan Jurnal :

Abdur Rozaki, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal", *Flamma*, V.24, 2004.

Budi Setyono, " Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Vol.3 No. 2, 2013.

Cate Buchanan, *Pengelolaan konflik di Indonesia - sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Centre For Humanitarian Dialogue, 2001).

Ebin E. Danius, *Hubungan Kristen Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara : Tesis Universitas Halmahera*, 2008.

Ruddy Tindage, *Damai Sejati : Rekonsiliasi di Tobelo, Kajian Teologi dan Komunikasi*. Jakarta: YAKOMA- PGI, 2006.

Wasisto Raharjo Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi konflik keagamaan* (*Jurnal Walisongo*, Volume 21, Nomor 2, Nopember 2012. Tulisan ini menganalisis kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan di masyarakat pasca konflik Maluku .

Hamza Tualeka, *Konflik dan integrasi sosial Bernuansa keagamaan*. (Disertasi) Surabaya: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kawasan Pemerintahan Nomor I A
TOBELO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 07

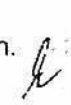
1. Dasar


- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
 - d. Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/1075.DI tanggal 28 Maret 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara.
2. Menunjuk Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : B-130/ C1/ TL.00/ 05/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian
3. Bahwa setelah diteliti permohonan dari persyaratan yang disampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada prinsipnya tidak berkeberatan dan memberi ijin penelitian kepada:

Nama	: Drs. ANSAR TOHE, M.FIL.I
NIP	: 1965011 199403 1 002
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Judul Penelitian	: "PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA (SUATU PENDEKATAN BUDAYA LOKAL) "
Lokasi Penelitian	: Tobelo Kab. Halmahera Utara
Waktu Penelitian	: 30 Mei s/d 30 Juni 2018
Bidang Peneliti	: Keagamaan
Status Peneliti	: Perorangan
Alamat peneliti	: Desa Kampung Cina Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara.

4. Dengan ketentuan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dalam melaksanakan kegiatan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
6. Rekomendasi ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal **30 Juni 2018**, dan dapat dibatalkan apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

a.n.  BUPATI HALMAHERA UTARA
KEPALA BADAN


Drs. WENAS ROMPIS
PEMBINA Tkt. I, IV/b
NIP. 19690902 199802 1 004

TEMBUSAN, Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Bupati Halmahera Utara;
3. Wakil Bupati Halmahera Utara;
4. Kepala Kesbangpol Prov. Maluku Utara di Sofifi;
5. Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara;
6. Ketua Sinode Kab. Halmahera Utara;
7. Tokoh Adat;
8. Tokoh Agama;
9. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

Jalan. Lumba-lumba Kelurahan. Dufa-dufa Ternate
Telepon . (0921) 3121426 Faksimile (0921) 3123773 Ternate 97727
Webside www.iain.ternate.ac.id

Nomor : B-130/C1/TL.00/05/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin dan Rekomendasi Penelitian

Yth, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Di -

Tobelo

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Sehubungan dengan dilaksanakan Penelitian oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri Ternate atas nama Dr. Ansar Tohe, M.Fil.I. dengan judul "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Suatu Pendekatan Budaya Lokal)", maka disampaikan sebagaimana perihal surat di atas.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

Ternate, 23 Mei 2018

An. Rektor,
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan



Agus Salim Bujang, MA.

Tembusan:

1. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
2. Kementerian Agama Kab. Halmahera Utara
3. Ketua SINODE
4. Tokoh Adat
5. Tokoh Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

Jalan Lumba-lumba Kelurahan Dufa-dufa Ternate 97727
Telepon (0921) 3121426 Faximile (0921) 3123773
Website: www.iain_ternate.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 169 /In.16/05/2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penelitian Dosen Institut Agama Islam Negeri Ternate, maka perlu melakukan kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate menugaskan dosen untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Dasar : Berdasarkan Surat Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Nomor: B-131/C1/TL.00/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Dr. Ansar Tohe, M.Fil. I
NIP : 196507111994031002
Jabatan : Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ternate

Untuk : Melakukan penelitian dimaksud pada tanggal 28 Mei s.d 07 Juni 2018 bertempat di Tobelo Provinsi Maluku Utara.

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas.

Ternate 24 Mei 2018

